



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan pertanggungjawaban uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk untuk menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan pertanggungjawaban uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
14. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
18. Basis Kas Menuju Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrua.
19. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
20. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
21. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
23. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
24. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
26. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
27. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
28. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
31. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaranyang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
34. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
35. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
37. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
38. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasaidan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
39. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
41. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntan siaga rakun/posyang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan akuntansi keuangan Daerah baik di tingkat PPKD dan SKPD serta bertujuan untuk :

- a. memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul;
- b. pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan *auditable*;
- c. mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur proses akuntansi dan pelaporan keuangan menghasilkan Laporan; dan
- e. Keuangan Konsolidasi yang lengkap dan akurat secara tepat waktu serta sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

PPKD sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib mempedomani Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam suatu Modul Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pedoman akuntansi dan pelaporan di tingkat SKPD dan PPKD.
- (2) Modul sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II : SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA, Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja dan Beban, Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang, Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap, Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Lainnya, Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban, Koreksi Kesalahan, Penyajian kembali (restatement) neraca.

BAB III : SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Memuat Sistem dan Prosedur Akuntansi Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA, Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja dan Beban, Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang, Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi, Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban, Sistem dan Prosedur Akuntansi Pembiayaan, Koreksi Kesalahan.

BAB IV : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Menjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Menjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB VI : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB VII : BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar merupakan daftar yang berisi akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap, yang digunakan didalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 5

Modul sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 6

- (1) BAS merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas level 1 sampai dengan level 5 yang meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Di tetapkan di Langara
Pada tanggal, 20 Desember 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN <i>II</i>		
3	<i>BKD</i>		
4	BAGIAN HUKUM		



Diundangkan di Langara

Pada tanggal, 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR. 64





BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah melakukan fasilitasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan serangkaian Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup antara lain, Sistem dan Prosedur Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam tahap pelaksanaan tata usaha keuangan daerah diperlukan pedoman Sistem dan Prosedur Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang meliputi sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan APBD dan pengeluaran APBD serta sistem dan prosedur akuntansi.

Pedoman Sistem dan Prosedur Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan informasi minimal yang dapat digunakan sebagai salah satu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Daerah sesuai, yang substansinya tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Sistem dan Prosedur dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ini, kiranya kerjasama yang telah terjalin selama ini tetap terpelihara dalam rangka keberlangsungan penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi Pemerintahan yang berterima secara umum.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai Peraturan Perundangan di atas dan mencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai Peraturan Perundang-undangan di atas.

Memenuhi amanat Peraturan Perundangan yaitu Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih rinci dan implementatif, maka perlu disusun Modul Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusun dan diterbitkannya Modul Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tepat waktu.

2. Tujuan

Sistem akuntansi pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyusunan Modul Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan bertujuan untuk memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, termasuk ketentuan yang berlaku.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar Hukum dan Sistematiika Penyajian Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

BAB II : SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Memuat Akuntansi Satuan Kerja, Sistem dan Prosedur Akuntansi Anggaran, Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja, Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang, Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap, dan Prosedur Akuntansi Aset Lainnya, Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban

BAB III : SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Memuat Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sistem dan Prosedur Akuntansi Pendapatan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja, Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang, Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi PPKD, Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap, , Sistem dan Prosedur Akuntansi Kewajiban, Sistem dan Prosedur Akuntansi Selisih Kas PPKD

BAB IV : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Menjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Menjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB VI : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

A. AKUNTANSI SATUAN KERJA

1. Kerangka Hukum

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi berbasis elektronik. Permendagri 7/2022.

2. Deskripsi Kegiatan

Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Meskipun memiliki perbedaan dalam kewenangan, dalam arsitektur SAPD, keduanya memiliki sifat yang sama dalam akuntansinya, yaitu sebagai satuan kerja.

Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Pihak Terkait

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain Kas berdasarkan bukti- bukti yang terkait.
- Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing.
- Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Bendahara di SKPD

Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPD memiliki tugas :

- Menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

B. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD, dengan jurnal sebagai berikut :

Estimasi Pendapatan	xxx
Defisit	xxx
Apropriasi Belanja	xxx
Surplus	xxx

Jurnal atas transaksi tersebut akan menjadi angka laporan dalam kolom anggaran di Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD diperbolehkan untuk tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran. Namun harus dikelola dalam sebuah sistem sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam :

1. Buku besar (sebagai header).
2. Neraca saldo.
3. Laporan Realisasi Anggaran.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
5. Neraca
6. Laporan Operasional
7. Laporan Arus Kas
8. Laporan Perubahan ekuitas

C. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.

a. PA/KPA

Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan;

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

- 1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya;
- 3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan

- c. Bendahara Penerimaan SKPD
 - 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan
 - 2) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari dan atau paling lambat satu hari kerja berikutnya
- d. BUD

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan
- e. Pihak Ketiga

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yangterkait dengan penerimaan pendapatan
2. Dokumen yang terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

 - Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKP-Daerah)
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD)
 - Bukti Penerimaan (BP)
 - Surat Tanda Setoran(STS)
 - Bukti transfer/setor
 - Nota kredit bank
 - Bukti memorial
 - Bukti transaksi penerimaan kas lainnya
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :

 - a. Selama tahun berjalan, Pendapatan diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA)
 - b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan yaitu :
 - 1) Pendapatan diakui sebelum penerimaan kas
 - 2) Pendapatan diakui setelah penerimaan kas.

Langkah 1

- a. PPK-SKPD menerima SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan
- b. Berdasarkan dokumen SPJ Penerimaan dan lampirannya, PPK-SKPD mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" di Debit dan "Akun Pendapatan sesuai jenisnya" di kredit.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Pendapatan	xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Khusus Pendapatan. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini (Halaman 32).

- c. Pendapatan yang diterima kemudian disetor kepada Kasda. PPK-SKPD kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut dengan menjurnal "RK PPKD" di Debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit.

RK PPKD	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

Catatan: Pada saat setoran pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Daerah, Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi penerimaan tersebut dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di Debit dan "RK Satker sesuai dengan nama satkernya" di kredit.

- d. Dalam kondisi sebenarnya, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga.

Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, PPK-SKPD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD, mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal "Akun Pendapatan sesuai jenisnya" di Debit dan "RK PPKD" di kredit.

Pendapatan	xxx
RK PPKD	xxx

Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan.

Catatan: Pada saat pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Daerah, Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dengan menjurnal "RK Satker sesuai dengan nama satkernya" di Debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (non recurring) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi PPKD dengan menjurnal "SILPA" di Debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Langkah 2

- a. Setiap periode, jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Contoh format Buku Besar SKPD dapat dilihat di lampiran Sisdur Akuntansi ini (Halaman 33).
- b. Di akhir periode tertentu, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh format Neraca Saldo dapat dilihat di lampiran Sisdur Akuntansi ini (Halaman 34).

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi pendapatan. Dinas Badan Keuangan Daerah akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD.

Pada tanggal 7 Februari 2022 PPK-SKPD DinKes menerima SPJ Penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara Penerimaan DinKes. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2006, Dinas Kesehatan telah menerima pendapatan retribusi sebagai berikut:

10 Januari 2022	Dinas Kesehatan menerima retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar 5 juta rupiah.
11 Januari 2022	Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan menyetor uang retribusi sebesar 5 juta rupiah tersebut ke Bank Kasda.
19 Januari 2022	Bendahara Penerimaan Pembantu (di Puskesmas Kec. Wawonii Barat) menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar 2,2 juta rupiah.
20 Januari 2022	Bendahara Penerimaan Pembantu menyetor uang retribusi sebesar 2,2 juta rupiah tersebut ke Bank Kasda.
28 Januari 2022	Diterima info dari BUD bahwa telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran uang pendaftaran Mahasiswa/I Akademi Keperawatan untuk tahun 2021. Kelebihan ini disebabkan adanya kesalahan perhitungan dalam sistem komputer. Pembayaran kelebihan tersebut sebesar 50 juta rupiah

Dari transaksi ini, PPK-SKPD Badan Keuangan Daerah akan mencatat jurnal sebagai berikut:

10 - jan	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	5000000	
	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		5000000
11 - jan	2.3.1.01.01	RK PPKD	5.000.000	
	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		5.000.000
19 - jan	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	2.200.000	
	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		2.200.000
20 - jan	2.3.1.01.01	RK PPKD	2.200.000	
	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		2.200.000
28 - jan	4.1.4.12.01	Lain-lain PAD yang sah - Uang Pendaftaran	50.000.000	
	2.3.1.01.01	RK PPKD		50.000.000

D. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/ vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2022, pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

b. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran

c. Bendahara Pengeluaran

- 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya
- 2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi
- 3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan atau membuat SPP
- 4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya
- 5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK SKPD

d. PPK SKPD

- 1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.
- 2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal.
- 3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat
- 4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar.
- 5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D

2. Dokumen yang terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:

- Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan
- Surat Bukti Pengeluaran/Belanja
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran
- Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)
- SP2D LS/GU/Nihil
- Dokumen Kontrak/Perjanjian
- Dokumen lainnya

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah :

Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:

- Melalui Uang Persediaan

Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Melalui Kas daerah (LS)

Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi pengakuan Beban yaitu :

- 1) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun;
- 2) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Akuntansi Belanja UP/GU/TU

Langkah 1

PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal "Kas di Bendahara Pengeluaran" di Debit dan "RK PPKD" di kredit.

Kas di bendahara pengeluaran	xxx
RK PPKD	xxx

Langkah 2

Secara berkala, PPK-SKPD menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat transaksi-transaksi belanja periode sebelumnya dengan menjurnal "Belanja sesuai jenisnya" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit.

Belanja	xxx
Kas di bendahara pengeluaran	xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat belanja, maka dibuatlah Buku Jurnal khusus Belanja. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini.

Langkah 3

- Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja. Contoh format buku besar dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini (Halaman 33).
- Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh format Neraca Saldo dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini (Halaman 34).

Akuntansi Belanja LS (Langsung)

Belanja LS yang dimaksud adalah Belanja LS Gaji & Tunjangan dan Belanja LS Barang & Jasa. Dalam konteks belanja LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan.

Langkah 1

PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D terkait, PPK-SKPD mencatat transaksi belanja dengan menjurnal "Belanja sesuai jenisnya" di debit dan "RK-PPKD" di kredit.

Belanja	xxx
RK PPKD	xxx

Catatan: Pada saat terjadi pembayaran belanja LS melalui rekening Kas Daerah, PPK-SKPKD akan mencatat transaksi tersebut dengan menjurnal " RK Satker sesuai dengan nama satkernya" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat belanja LS, maka dibuatlah Buku Jurnal khusus untuk belanja LS. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini (Halaman 38).

Dalam kasus LS Gaji dan tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem Akuntansi PPKD.

Catatan: Pada saat transfer gaji dan tunjangan dari rekening Kas Daerah, PPK-SKPKD akan mencatat potongan terhadap gaji dan tunjangan dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Hutang PFK" di kredit. Sewaktu, potongan tersebut ditransfer ke rekening yang terkait, maka transaksi tersebut akan dijurnal "Hutang PFK" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Hutang di jurnal umum.

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Hutang Pajak	xxx

Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SSP) telah diterima, dilakukan penghapusan hutang pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Hutang Pajak	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPD juga mengakui penambahan aset dengan menjurnal "Aset sesuai jenisnya" di debit dan "Diinvestasikan dalam Aset Tetap" di kredit.

Belanja Modal	xxx
Kas di bendahara pengeluaran	xxx
Aset	xxx
Diinvestasikan dlm Aset Tetap	xxx

Langkah 2

- Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja. Contoh format Buku Besar dapat dilihat pada Sisdur Akuntansi ini (Halaman 36).
- Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh format Neraca Saldo dapat dilihat pada Sisdur Akuntansi ini (Halaman 37).

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi belanja. Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD.

Pada tanggal 7 Februari 2022 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ Pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran DinKes. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2022, Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi belanja sebagai berikut:

- 4 Januari 2022 Dinas Kesehatan menerima SP2D atas pembayaran gaji bulan Januari dengan rincian :
- | | |
|---------------------------|------------------|
| Gaji Pokok | Rp 999.510.000,- |
| Tunjangan Keluarga | Rp 87.457.125,- |
| Tunjangan Fungsional | Rp 99.951.000,- |
| Tunjangan Fungsional Umum | Rp 62.469.375,- |
- Dengan iuran Wajib Pegawai sebesar Rp 52.240.000,- dan Tabungan Perumahan Pegawai sebesar Rp 22.575.000,-
- 5 Januari 2022 Dinas Kesehatan menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- atas pencairan SP2D UP.

- 8 Januari 2022 Dinas Kesehatan membeli alat tulis kantor senilai Rp 5.000.000,-.
- 12 Januari 2022 Dinas Kesehatan membeli bahan obat-obatan senilai Rp 15.000.000,-
- 25 Januari 2022 Dinas Kesehatan melakukan pengisian tabung gas senilai Rp 2.000.000,-
- 27 Januari 2022 Untuk keperluan kegiatan fogging, dilakukan belanja bahan kimia senilai Rp75.000.000,-
- 28 Januari 2022 Dinas Kesehatan melakukan pembelian ambulans yang dilengkapi dengan alat-alat kesehatan senilai Rp 250 juta. Dari jumlah tersebut, Bendahara pengeluaran memungut PPN senilai Rp. 22.727.273

Belanja bahan kimia terkait dengan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, dan melibatkan pihak ketiga. Dana langsung dicairkan oleh BUD kepada pihak ketiga, sehingga Dinas Kesehatan tidak mencatat penerimaan kas terlebih dahulu (mekanisme LS).

Dari transaksi ini, PPK-SKPD DinKes akan mencatat jurnal sebagai berikut:

4-Jan	5.1.1.01.01	Gaji dan Tunjangan	999.510.000	
	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	87.457.125	
	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	99.951.000	
	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.469.375	
	2.3.1.01.01	RK PPKD		1.249.387.500
5-Jan	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	
	2.3.1.01.01	RK PPKD		30.000.000
8-Jan	5.2.2.01.01	Belanja ATK	5.000.000	
	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000
12-Jan	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	15.000.000	
	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		15.000.000
25-Jan	5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	2.000.000	
	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.000.000
27-Jan	5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	75.000.000	
	2.3.1.01.01	RK PPKD		75.000.000
28-Jan	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Ambulans	250.000.000	
	2.3.1.01.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		250.000.000
28-Jan	2.3.1.01.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	22.727.273	
	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN		22.727.273
28-Jan	1.3.2.02.10	Alat Angkutan Darat Bermotor - Ambulans	250.000.000	
	3.2.2.01.01	Diinvestasikan Dalam Aktiva Tetap		250.000.000

E. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak yang terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal.
- Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- Bukti Memorial
- Dokumen lain yang dipersamakan

3. Sistem Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:

- Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapanPendapatan-LOyang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatatkan pengakuan Pendapatan-LOdan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima

Pembayarannya

Piutang	xxx	
Pendapatan		xxx

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan yang sudah diakui tahun sebelumnya

Pendapatan	xxx	
Piutang		xxx

b. Mencatat Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapus bukuan dan penghapus tagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat penghapus bukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang.

Sedangkan untuk penghapus tagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal

Penyisihan Piutang		xxx
Beban Penyisihan Piutang		xxx
Piutang	xxx	

F. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

a. Penyimpan Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

d. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2. Dokumen yang terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:

- Bukti Belanja Persediaan
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun
- SP2D LS

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:

Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

1) Pada awal tahun

PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca

Beban Persediaan	xxx	
Persediaan		xxx

2) Pada saat pembelian

PPK-SKPD akan mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Beban Persediaan Kas	xxx	
Bendahara Pengeluaran		xxx

- 3) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan. PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.

Persediaan	xxx	
Beban Persediaan		xxx

G. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP SKPD

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam 2 kelompok besar transaksi, yaitu :

- Penambahan nilai Aset
- Pengurangan nilai Aset

1. Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2. Dokumen Sumber

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
- SP2D LS
- SPJ
- Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap
- Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset
- Dokumen lain yang dipersamakan

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.

Langkah 1

Berdasarkan bukti transaksi yang berupa:

- a. Berita acara penerimaan barang, dan atau
- b. Berita acara serah terima barang, dan atau
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan

PPK-SKPD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut dapat dikembangkan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- 1) Jenis/nama aset tetap
- 2) Kode rekening terkait
- 3) Klasifikasi aset tetap
- 4) Nilai aset tetap
- 5) Tanggal transaksi

Langkah 2

Dalam kasus penambahan nilai aset, berdasarkan bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mengakui penambahan aset dengan menjurnal "Aset sesuai jenisnya" di debit dan "Diinvestasikan dalam Aset Tetap" di kredit.

Aset	xxx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx

Dalam kasus pengurangan aset, Berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD mengakui pengurangan aset dengan menjurnal "Diinvestasikan dalam Aset Tetap" di debit dan "Aset sesuai jenisnya" di kredit.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx
Aset Tetap	xxx

Secara periodik, buku jurnal atas transaksi aset tetap tersebut diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Langkah 3

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Ilustrasi Jurnal

Pencatatan aset tetap dalam buku jurnal merupakan proses lanjutan dari pencatatan belanja daerah yang menghasilkan aset tetap. Oleh karena itu, jurnal untuk mencatat saat perolehan aset tetap sering disebut sebagai jurnal collolary. Pencatatan aset tetap dapat dilakukan baik oleh SKPD maupun SKPKD, bergantung pada siapa yang melakukan belanja atas aset tersebut. Berikut adalah beberapa contoh jurnal terkait dengan aset tetap. Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD.

1. Perolehan Aset Tetap

✓ Pembelian

Dinas Kesehatan membeli papan tulis elektronik untuk ruang meeting dengan harga jual 3 juta rupiah. Agar papan tulis elektronik ini siap digunakan, ada biaya-biaya tambahan yang harus dibayar meliputi biaya pengangkutan dan biaya instalasi masing-masing sebesar 100 ribu rupiah. Oleh karena itu Dinas Kesehatan akan mencatat nilai papan tulis elektronik tersebut sebesar 3,2 juta rupiah.

5.2.3.10.09	Belanja Modal - Papan Tulis Elektronik	3.200.000
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.200.000
1.3.2.09.09	Peralatan Kantor - Papan Tulis Elektronik	3.200.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dlm Aset Tetap	3.200.000
Pembelian papan tulis elektronik		

✓ Hibah

Pemda memperoleh donasi dari Bank Dunia berupa lima buah mobil Kijang. Mobil Kijang dengan tipe dan kriteria yang sama tersebut mempunyai nilai wajar masing-masing sebesar

120 juta rupiah. Aset tersebut kemudian diserahkan kepada SKPD. Maka jurnal yang harus dibuat di akuntansi SKPKD adalah:

1.3.2.02.03	Kendaraan	600.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dlm Aset Tetap	600.000.000
Penerimaan hibah berupa mobil Kijang dari Bank Dunia		

2. Penyusutan

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Jurnal penyusutan aset tetap ini dibuat di akhir tahun.

3.2.2.01.01	Diinvestasikan dlm Aset Tetap	640.000
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan - Papan tulis elektronik	640.000
Penyusutan papan tulis elektronik oleh Dinas Kesehatan dengan metode garis lurus dan estimasi masa manfaat AC selama 5 tahun		

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pemda sedang mendirikan bangunan puskesmas. Gedung puskesmas ini akan dibangun Dinas Kesehatan pada tahun 2021. Tanggal 31 Desember 2021 puskesmas tersebut belum selesai dibangun. Maka Dinas Kesehatan akan mencatat jurnal sebagai berikut:

1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	100.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	100.000.000
Mencatat biaya yang telah dikeluarkan selama pembangunan sampai 31 Desember 2021		

Pada 31 Mei 2022, puskesmas ini telah selesai di bangunan. Maka Dinas Kesehatan menjurnal sebagai berikut:

3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	100.000.000
1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	100.000.000
Jurnal balik atas pencatatan terdahulu yang telah dicatat		

1.3.3.01.01	Gedung	400.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan pada Aset Tetap	400.000.000
Mencatat pada pos aset tetap yang bersangkutan		

4. Pelepasan Aset Tetap

Di kantor Dinas Kesehatan, terdapat lima buah komputer lama yang rusak dan tidak terpakai. Atas persetujuan Kepala Daerah dilakukan penghapusan atas komputer tersebut, Kepala Dinas melakukan pelelangan ke masyarakat. Uang hasil penjualan komputer tersebut akan dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

3.2.2.01.01	Diinvestasikan dlm Aset Tetap	5.000.000
1.3.2.11.02	Peralatan – Komputer	5.000.000
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	5.000.000
4.1.4.01.02	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000
Jurnal untuk mencatat pengurangan aset tetap dan penerimaan pendapatan dari hasil pelepasan aset		

H. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD adalah :

- a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

2. Dokumen yang terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban antara lain:

- Surat Perjanjian Hutang
- Nota kredit/ Nota Debit
- SP2D LS

3. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK SKPD akan mengakui adanya utang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat "Beban...(sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Utang Belanja" di kredit dengan jurnal:

Beban.....	xxx
Utang Belanja.....	xxx

Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD mencatat "Aset Tetap" di debit dan "Utang Belanja" di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap	xxx
Utang Belanja.....	xxx

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat "Utang Belanja" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" (untuk kasus belanja menggunakan UP) atau "RK PPKD" (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja	xxx
Kas di Bendahar Pengeluaran	xxx
Utang Belanja	xxx
RK PPKD	xxx

1. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya :

- ✓ koreksi kesalahan pencatatan
merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
- ✓ Pengakuan asset, hutang, dan ekuitas.
merupakan pengakuan terhadap perolehan asset yang dilakukan oleh SKPD. Pengakuan aset sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh SKPD
- ✓ Jurnal depresiasi
Merupakan jurnal depresiasi terhadap aset yang dimiliki oleh SKPD
- ✓ Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment
Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment)

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

Langkah 1

PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

Langkah 2

PPK-SKPD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan.

Langkah 3

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi non kas. Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD.

- 26 Januari 2022 Dilakukan koreksi atas kesalahan pencatatan belanja yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2021. Pada tanggal tersebut dilakukan belanja ATK senilai Rp 5 juta, namun dicatat ke kode rekening 5.2.2.01.02 (Belanja Dokumen)
- 15 Februari 2022 Dilakukan koreksi atas kesalahan pencatatan penerimaan SP2D UP. Dana SP2D UP senilai Rp 30 juta dicatat dengan mendebit rekening kas di bendahara penerimaan. Seharusnya rekening yang didebit adalah rekening kas di bendahara pengeluaran
- 28 Juni 2022 Dari 5 buah kendaraan hibah yang diterima, satu diantaranya dihibahkan kembali ke RSUD sebagai kendaraan operasional. Sewaktu pertama kali diterima, kendaraan ini dicatat dengan nilai Rp 120 juta.
- 5 Juli 2022 Diterima Surat Keputusan penghapusan barang (penghapusan komputer yang musnah karena kebakaran di gudang). Nilai komputer ini di neraca sebesar Rp 7 juta

Dari transaksi ini, PPK-SKPD Dinas Kesehatan akan mencatat jurnal sebagai berikut:

26-Jan	5.2.2.01.01	Belanja ATK	5.000.000	
	5.2.2.01.02	Belanja Dokumen		5.000.000
15 -Feb	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	
	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		30.000.000
28- Juni	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dlm Aset Tetap	120.000.000	
	1.3.2.02.03	Kendaraan		120.000.000
5-Juli	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dlm Aset Tetap	7.000.000	
	1.3.2.09.01	Mesin Tik		7.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
BUKU BESAR

SKPD :
 KODE REKENING :
 NAMA REKENING :
 PAGU APBD :
 PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

....., tanggal.....

PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
BUKU BESAR

SKPD :
KODE REKENING :
NAMA REKENING :
PAGU APBD :
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

....., tanggal.....

PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
BUKU BESAR

SKPD :
 KODE REKENING :
 NAMA REKENING :
 PAGU APBD :
 PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
				/	
	Jumlah				

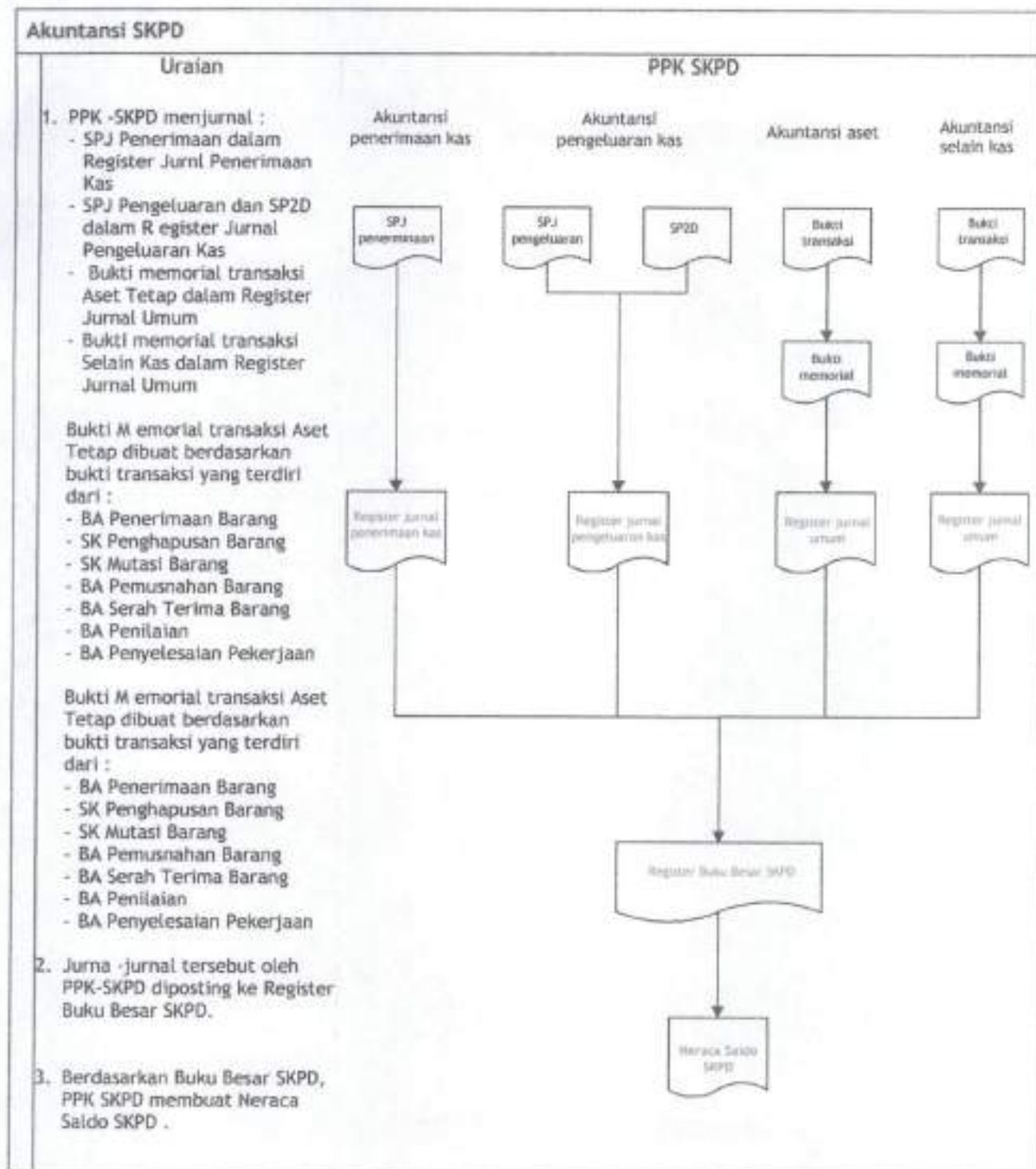
....., tanggal.....

PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Bagan Alir Akuntansi SKPD



BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

A. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUAGNAN DAERAH (PPKD)

1.1. Kerangka Hukum

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi berbasis elektronik. Permendagri 7/2022

1.2. Deskripsi Kegiatan

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Keuangan Daerah (BKD).

Badan/Biro/Bagian Keuangan juga menyusun RKA-SKPKD selaku Pejabat Pengguna Anggaran. Kosekuensi atas keadaan ini adalah bahwa PPK-SKPKD hanya mengurus masalah pendapatan/belanja untuk satuan kerja saja.

Dalam pelaksanaan anggaran transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja
2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level Pemerintah Daerah seperti pendapatan dana perimbangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tiga terduga. Termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang jangka panjang.

Tata cara dan perlakuan akuntansi oleh SKPKD sebagai satuan kerja mengikuti tata cara dan perlakuan akuntansi seperti yang sudah dijelaskan oleh prosedur 1.1.

Pada prosedur 1.2 ini akan dijelaskan tata cara dan perlakuan akuntansi bagi SKPKD yang berfungsi merekam transaksi-transaksi oleh (pada level) pemerintah daerah.

Dengan demikian, prosedur 1.2 ini akan meliputi:

1. Akuntansi Pendapatan (Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya)
2. Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga)
3. Akuntansi Pembiayaan
4. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang)
5. Akuntansi Hutang
6. Akuntansi Konsolidator
7. Akuntansi Selain Kas

1.3. Pihak Terkait

1. Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Hutang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait.
- Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing.
- Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Bendahara di SKPKD

Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPKD memiliki tugas :

- Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi PPKD.

B. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD, dengan jurnal sebagai berikut :

Estimasi Pendapatan SILPA	xxx xxx
Apropriasi Belanja (SILPA)	xxx xxx

Estimasi Penerimaan Pembiayaan SILPA	xxx xxx
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan (SILPA)	xxx xxx

Jurnal atas transaksi tersebut akan menjadi angka laporan dalam kolom anggaran di Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD diperkenankan untuk tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran. Namun harus dikelola dalam sebuah sistem sedemikian rupa sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam:

1. Buku besar (sebagai header)
2. Neraca saldo
3. Laporan Realisasi Anggaran.

C. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti Dana Perimbangan.

Langkah 1

- a. Fungsi Akuntansi di SKPKD (yang biasanya dilakukan oleh Bidang Akuntansi SKPKD di BPKD) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan.
- b. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen Laporan tersebut, Fungsi Akuntansi di SKPKD menjurnal penerimaan kas dari dana perimbangan sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Dana Perimbangan	xxx

Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Terhadap pengembalian ini, maka PPK-SKPKD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal "Akun Pendapatan sesuai jenisnya " di Debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Pendapatan	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Langkah 3

- Jurnal pendapatan yang telah dibuat kemudian di posting ke Buku Besar SKPKD.
- Setiap akhir bulan, Fungsi Akuntansi di SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar SKPKD ke dalam Neraca Saldo.

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi pendapatan.

- 5 Maret 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menerima Dana Alokasi Umum sebesar Rp 2 Milyar.
- 10 April 2022 BPKD menerima Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 20 Milyar.
- 15 April 2022 Diterima Pendapatan Bagi Hasil dari PBB sebesar Rp 1 Milyar dan BPHTB sebesar Rp 200 Juta
- 5 Mei 2022 Dilakukan pengembalian Pendapatan Bagi Hasil dari PBB untuk tahun 2005 sebesar Rp 15 juta
- 7 Juni 2022 Diterima Pendapatan Bagi Hasil dari PPh 21 sebesar Rp 300 juta

Dari transaksi ini, PPK-SKPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut :

5-Mar	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	2.000.000.000	
	4.2.2.01.01	Pendapatan Dana Perimbangan - DAU		2.000.000.000
10-Apr	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	20.000.000.000	
	4.2.3.01.01	Pendapatan Dana Perimbangan - DAK		20.000.000.000
15- Apr	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	1.200.000.000	
	4.2.1.01.01	Bagi Hasil PBB		1.000.000.000
	4.2.1.01.02	Bagi Hasil BPHTB		200.000.000
5-Mei	4.2.1.01.01	Bagi Hasil PBB	15.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		15.000.000
7-Juni	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
	4.2.1.01.03	Bagi Hasil PPh 21		300.000.000

D. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi Belanja SKPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Langkah 1

Fungsi Akuntansi SKPKD menerima SP2D dari Kuasa BUD. Berdasarkan SP2D terkait, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat transaksi ke jurnal sebagai berikut:

Belanja Bunga/Subsidi/.....	xx.xxx.xxx
Kas di Kas Daerah	xx.xxx.xxx

Langkah 2

- Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja. Contoh format Buku Besar dapat dilihat pada Sisdur Akuntansi ini (*Halaman 69*).
- Di akhir bulan, Fungsi Akuntansi SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo. Contoh format Neraca Saldo dapat dilihat pada Sisdur Akuntansi ini (*Halaman 70*).

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi belanja.

3 Maret 2022	Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan pembayaran subsidi untuk tahun 2022 kepada PDAM setempat sebesar Rp 250 juta
20 Maret 2022	Dilakukan belanja untuk Bantuan Keuangan bagi kesejahteraan guru SD sebesar Rp 200 juta
5 April 2022	Dilakukan transfer dana sebesar Rp 100 juta kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan jalan desa
10 April 2022	Dilakukan transfer dana sebesar Rp 400 juta sebagai dana bantuan untuk Partai Politik

Dari transaksi ini, PPK-SKPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut:

3-Mar	5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMD	250.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		250.000.000
20-Mar	5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga	200.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		200.000.000
5-Apr	5.1.4.03.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	100.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		100.000.000
10-Apr	5.1.5.01.01	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	400.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		400.000.000

a. Akuntansi Pembiayaan SKPKD

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi Pembiayaan SKPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti dana cadangan, pinjaman, dan utang

1. Penerimaan Pembiayaan

Langkah 1

- Fungsi Akuntansi SKPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjumlahan akuntansi pembiayaan pada SKPKD (akuntansi penerimaan/pengeluaran kas).
- Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD harus mengidentifikasi

penerimaan kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dapat berupa penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal penerimaan kas dari dana perimbangan sebagai berikut :

Pencatiran Dana Cadangan	1 Kas di Kas Daerah	xxx	
	2 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan		xxx xxx

Penerimaan Pinjaman Daerah	1 Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman kpd PD	xxx	xxx
	2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	xxx	xxx

Penerimaan Utang Daerah	1 Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan - Utang Dalam Negeri	xxx	xxx
	2 Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Panjang Utang Dalam Negeri	xxx	xxx

Langkah 3

- Jurnal-jurnal tersebut kemudian di posting ke Buku Besar SKPKD.
- Setiap akhir bulan, Fungsi Akuntansi SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar SKPKD ke dalam Neraca Saldo.

II. Pengeluaran Pembiayaan

Langkah 1

- a. Fungsi Akuntansi SKPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pembiayaan pada SKPKD (akuntansi penerimaan/pengeluaran kas).
- b. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD harus mengidentifikasi pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau untuk pemberian pinjaman daerah.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal pengeluaran kas dari Kas Daerah sebagai berikut :

Pembentukan Dana Cadangan	1	Pengeluaran Pembiayaan - Dana Cadangan Kas di Kas Daerah	xxx xxx
	2	Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx xxx

Penyertaan Modal Pemda	1	Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal PEMDA Kas di Kas Daerah	xxx xxx
	2	Penyertaan Modal PEMDA Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang	xxx xxx

Pembayaran Pokok Utang	1	Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran Pokok Utang Kas di Kas Daerah	xxx xxx
	2	Utang Dalam Negeri Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jngka Panjang	xxx xxx

Langkah 3

- Jurnal-jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum (jurnal collolary-nya) kemudian di posting ke Buku Besar SKPKD.
- Setiap akhir bulan, Fungsi Akuntansi SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar SKPKD ke dalam Neraca Saldo.

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi pembiayaan

20 Feb 2022	Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan transfer dana untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp 500 juta
10 Juni 2022	Dilakukan transfer dana sebesar Rp 2 Milyar sebagai tambahan penyertaan modal Pemda di PDAM
30 Juni 2022	Diterima dana pinjaman dari Lembaga Perbankan senilai Rp 5 Milyar. Hutang ini jatuh tempo dalam waktu 5 tahun ke depan

Dari transaksi ini, PPK-SKPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut:

20-Feb	6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		500.000.000
	1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000.000	
	3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		500.000.000
10-Jun	6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda di BUMD	2.000.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		2.000.000.000
	1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000.000	
	3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		2.000.000.000
30-Jun	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	5.000.000.000	
	6.1.4.03.01	Pinjaman Pemda kepada Lembaga Perbankan		5.000.000.000

E. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG PPKD

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak yang terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal dan Neraca.
- b. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan kedalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang PPKD :

- 1) Hasil RUPS / Dokumen yang dipersamakan
- 2) Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan Hasil Pajak, Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Bos Kurang Salur
- 3) Perpres untuk DAU
- 4) Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- 5) Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada PPKD adalah:

- a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Pada akhir tahun, PPK-PPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-SKPD mencatatkan pengakuan Pendapatan dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya.

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan yang sudah diakui tahun sebelumnya

Pendapatan	xxx
Piutang	xxx

- b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya

Setiap akhir periode akuntansi PPK-PPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan	xxx
Tagihan Pinjaman	xxx

- c. Mencatat Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusan bukuan dan penghapus tagihan piutang, maka PPK-PPKD akan mencatat penghapus bukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapus tagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Penyisihan Piutang	xxx
Beban Penyisihan Piutang	xxx
Piutang	xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan

Penyisihan Piutang	xxx
Piutang	xxx

F. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI INVESTASI PPKD

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

1. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

- 1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
- 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

2. Dokumen yang terkait

- a) SP2D LS
- b) Nota Kredit
- c) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

a. Perolehan Investasi

- 1) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (managemen kas), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Investasi Jk Pendek	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal.

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
SAL	xxx

- 2) Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan-PMPD	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

b. Pelepasan Investasi

- 1) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan bunga	xxx	
Investasi jangka pendek		xxx

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima

SAL perubahan	xxx
Penerimaan pembiayaan	xxx

- 2) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah	xxx
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang	xxx
Utang dalam negeri obligasi	xxx

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan pembiayaan	xxx

Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang.

Kas di Kas Daerah	xxx
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang	xxx
Utang dalam negeri obligasi	xxx

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan pembiayaan	xxx

c. Hasil Investasi

- 1) Hasil Investasi jangka pendek

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan bunga	xxx

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan bunga	xxx

- 2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode :

- a) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal

Kas di Kas Daerah	xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda	xxx

Perubahan SAL	xxx
laba yang dibagikan kepada Pemda	xxx

b) Metode Ekuitas

Pembukuaan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah	xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda	xxx

Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi - PPKD membukukan dalam buku jurnal

Kas di Kas Daerah	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx

Perubahan SAL	xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda	xxx

c) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan

Pembukuaan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan bunga dana bergulir	xxx

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan bunga dana bergulir	xxx

G. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN PPKD

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau Peraturan Perundang-undangan.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas :

a. BUD

- 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang
- 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

b. Fungsi Akuntansi PPKD

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen yang terkait

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah

- a. Surat Perjanjian Utang
- b. Nota kredit
- c. SP2D LS

3. Sistem dan prosedur pelaksanaan akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan).

a. Penambahan Kewajiban

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah	xxx
Hutang Jangka panjang	xxx

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Bagian lancar Hutang jk. Panjang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Perubahan SAL	xxx

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jk. Panjang	xxx
Surplus penyelesaian utang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Perubahan SAL	xxx

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-PPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jangka panjang	xxx
Bagian lancar Hutang jk. Panjang	xxx

H. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Transaksi penerimaan pembiayaan antara lain sebagai berikut :

- a. Perolehan Utang/penerimaan pinjaman
- b. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain
- c. Divestasi atas Penyertaan Investasi
- d. Pencairan Dana Cadangan

Sedangkan transaksi atas pengeluaran pembiayaan antara lain adalah :

- a. Pembayaran Pokok Utang
- b. Pemberian pinjaman kepada entitas lain
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- d. Pembentukan Dana Cadangan

1. Pihak yang terkait

- a. Fungsi Akuntansi PPKD
- b. PPKD

2. Dokumen yang terkait

Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencatatan penerimaan/pengeluaran pembiayaan antara lain sebagai berikut:

3. Sistem dan prosedur pelaksanaan akuntansi

a) Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Pada saat terjadi transaksi penerimaan utang/kewajiban jangka pendek, berdasarkan dokumen perjanjian utang piutang dan nota kredit dari Bank, fungsi akuntansi PPKD mencatat :

Kas di Kas Daerah	xxx
Kewajiban Jangka Panjang	xxx

Pada saat terjadi transaksi penerimaan pencairan dana cadangan yang dananya diterima kembali ke Kas Daerah, berdasarkan SK Persetujuan Pencairan dana cadangan dan nota kredit dari bank, fungsi akuntansi PPKD mencatat :

Kas di Kas Daerah	xxx
Dana Cadangan	xxx

Pada saat terjadi transaksi pelepasan investasi (divestasi), berdasarkan nota kredit dari bank dan SK persetujuan investasi permanen, fungsi akuntansi PPKD mencatat :

Kas di Kas Daerah	xxx
Investasi Permanen	xxx

Pencatatan tersebut dilakukan pada saat kasnya diterima di Kas daerah Bersamaan dengan transaksi di atas, Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di kredit dengan jurnal :

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

b) Pengeluaran Pembiayaan

Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset non lancar dan kewajiban jangka panjang.

Pada saat terjadi transaksi pembayaran pokok utang/kewajiban jangka pendek, fungsi akuntansi PPKD mencatat :

Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pada saat terjadi transaksi investasi baru atau penambahan investasi jangka panjang maka fungsi akuntansi PPKD mencatat :

Investasi Permanen	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pencatatan tersebut dilakukan pada saat di terbitkannya SP2D Bersamaan dengan transaksi di atas, Fungsi akuntansi PPKD mencatat :

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Perubahan SAL	xxx

1. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PPKD

Prosedur akuntansi aset pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang.

Langkah 1

Berdasarkan bukti transaksi yang ada, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- 1) Jenis/nama investasi
- 2) Kode rekening terkait
- 3) Nilai investasi
- 4) Tanggal transaksi

Langkah 2

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Jurnal pengakuan investasi, sebagai berikut:

Investasi	XXX
Diinvestasikan dlm Investasi	XXX

Jurnal pelepasan investasi, sebagai berikut:

Diinvestasikan dlm Investasi	XXX
Investasi ...	XXX

Secara periodik, buku jurnal atas transaksi investasi jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait.

Langkah 3

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi aset SKPKD yang terkait dengan transaksi pembiayaan oleh SKPKD

1 Maret 2022 Badan Keuangan Daerah (BKD) menempatkan dana sebesar Rp 20 Milyar di SBI.

15 Mei 2022 Dilakukan pencairan dana atas deposito yang dimiliki oleh Pemda di Bank Daerah senilai Rp 2 Milyar. Pada saat pencairan, diterima bunga deposito senilai Rp 20 juta

23 Juni 2022 BPKD melakukan pembelian Obligasi BUMN senilai Rp 1 Milyar

Dari transaksi ini, PPK-SKPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut:

1-Mar	1.2.1.04.01	Investasi dalam Surat Utang Negara	20.000.000.000	
	3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		20.000.000.000
Merupakan Jurnal Kololari atas pembelian SBI. Pengeluaran kas melalui Kas Daerah dicatat dengan menjurnal "Belanja Pembiayaan - SBI" di Debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit				
15-Mei		Diinvestasikan dalam Deposito		
		Investasi dalam Deposito		
Merupakan Jurnal Kololari atas pencairan deposito. Penerimaan kas melalui Kas Daerah dicatat dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di Debit dan "Pencairan Deposito" di kredit				
1-Mar	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	20.000.000	
	4.1.4.03.01	Pendapatan Bunga Deposito		20.000.000
	1.1.2.02.01	Investasi dalam Obligasi	1.000.000.000	
	3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		1.000.000.000

a. Akuntansi Hutang SKPKD

Prosedur akuntansi hutang pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Langkah 1

Berdasarkan bukti transaksi yang ada, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- 1) Jenis/nama hutang jangka panjang
- 2) Kode rekening terkait
- 3) Nilai hutang
- 4) Tanggal transaksi

Langkah 2

Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Jurnal pengakuan hutang, sebagai berikut:

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang JP	XX.XXX.XXX
Hutang Jangka Panjang	XX.XXX.XXX

Jurnal pembayaran hutang, sebagai berikut:

Hutang jangka panjang	XX.XXX.XXX
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang JP	XX.XXX.XXX

Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait.

Langkah 3

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi aset SKPKD yang terkait dengan transaksi pembiayaan oleh SKPKD

- 1 Maret 2022 BPKD menerima dana pinjaman dari pemerintah pusat senilai Rp 1 Milyar untuk menutup Defisit APBD
- 30 Maret 2022 BPKD melakukan pembayaran dana pinjaman dari BUMD senilai Rp 1 Milyar yang dilakukan di tahun 2021

Dari transaksi ini, PPK-SKPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut :

1-Mar	3.2.4.01.01	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	1.000.000.000	
	2.2.1.03.01	Hutang Jangka Panjang		1.000.000.000
	Merupakan Jurnal Kololari atas penerimaan pinjaman pemerintah pusat. Penerimaan kas melalui Kas Daerah dicatat dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di Debit dan "Penerimaan Pinjaman Pemerintah Pusat" di kredit			
30-Mar	2.2.1.03.01	Hutang Jangka Panjang	1.000.000.000	
	3.2.4.01.01	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang		1.000.000.000
	Merupakan Jurnal Kololari atas pembayaran pinjaman BUMD. Pembayaran melalui Kas Daerah dicatat dengan menjurnal "Pembayaran Pinjaman BUMD" di Debit dan " Kas di Kas Daerah" di kredit			

b. Akuntansi Konsolidator

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan sebuah arsitektur seperti Akuntansi cabang di Sektor Swasta. Maka, dalam pelaksanaan transaksinya, SKPKD diibaratkan sebagai kantor pusat (home office) dan SKPD sebagai kantor cabang (branch office).

Dengan skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKD dan SKPD. Akun yang dimaksud adalah R/K Pemda dan R/K SKPD.

Langkah 1

- Fungsi Akuntansi SKPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi konsolidator pada SKPKD.
- Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD harus mengidentifikasi aliran kas dari BUD kepada bendahara pengeluaran SKPD (berdasarkan dokumen sumber SP2D) dan sebaliknya aliran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke BUD (berdasarkan dokumen sumber Nota Kredit).

Langkah 2

Fungsi Akuntansi SKPD kemudian mencatat aliran dana dari Kas Daerah ke kas bendahara pengeluaran SKPD dengan jurnal sebagai berikut :

RK SKPD.....	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Catatan : Penerimaan dana di Bendahara Pengeluaran dicatat oleh PPK SKPD dengan menurnal "Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di kredit

Sedangkan untuk mencatat aliran dana dari Bendahara Penerimaan SKPD ke Kas Daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat jurnal sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah	xxx
RK SKPD	xxx

Catatan : *Transfer dana di Bendahara Penerimaan dicatat oleh PPK SKPD dengan menurnal "RK-PPKD" di debit dan " Kas di Bendahara Pengeluaran D" di kredit.*

Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi antara SKPKD dan SKPD.

- 4 Januari 2022 Menerbitkan SP2D atas pembayaran gaji bulan Januari untuk Dinas Kesehatan dengan rincian :
- Gaji Pokok Rp 999.510.000,-
 - Tunjangan Keluarga Rp 87.457.125,-
 - Tunjangan Fungsional Rp 99.951.000,-
 - Tunjangan Fungsional Umum Rp 62.469.375,-
- Dengan iuran Wajib Pegawai sebesar Rp 52.240.000,- dan Tabungan Perumahan Pegawai sebesar Rp 22.575.000,-
- 5 Januari 2022 Diterbitkan SP2D UP kepada Dinas Kesehatan senilai Rp 30 juta.
- 11 Januari 2022 Menerima setoran dari Dinas Kesehatan atas retribusi kesehatan senilai Rp 5 juta

- 20 Januari 2022 Menerbitkan SP2D GU kepada Dinas Pendidikan senilai Rp 35 juta
- 27 Januari 2022 Menerbitkan SP2D LS kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp 75 juta untuk pembelian bahan kimia untuk kegiatan Fogging. Dari pembayaran ini, dipungut PPN senilai Rp.6.818.182
- 28 Januari 2022 Melakukan pembayaran atas kelebihan uang pendaftaran mahasiswa/i Akademi Keperawatan untuk tahun 2021. Pembayaran tersebut senilai Rp. 50 juta

Dari transaksi ini, PPK-SKPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut:

4-Jan	1.1.9.01.03	RK Dinas Kesehatan	1.249.387.500	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		1.249.387.500
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	74.815.000	
	2.1.1.01.01	Hutang PFK - IWP		52.240.000
	2.1.1.05.01	Hutang PFK - Taperum		22.575.000
5-Jan	1.1.9.01.03	RK Dinas Kesehatan	30.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		30.000.000
11-Jan	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
	1.1.9.01.03	RK Dinas Kesehatan		5.000.000
20-Jan	1.1.9.01.01	RK Dinas Kesehatan	35.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		35.000.000
27-Jan	1.1.9.01.03	RK Dinas Kesehatan	75.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		75.000.000
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	6.818.182	
	2.1.3.03.01	Hutang PPN		6.818.182
28-Jan	1.1.9.01.03	RK Dinas Kesehatan	50.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		50.000.000

J. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS PPKD

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi:

- ✓ koreksi kesalahan pencatatan
merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
- ✓ Pengakuan hutang, dan ekuitas.
merupakan pengakuan terhadap perolehan aset, hutang dan ekuitas yang dilakukan oleh SKPKD. Pengakuan aset sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh SKPKD
- ✓ Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment
Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPKD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment)

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti transaksi jika tersedia.

Langkah 1

PPK-SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

Langkah 2

PPK-SKPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan.

Langkah 3

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
BUKU BESAR

SKPD
KODE REKENING
NAMA REKENING
PAGU APBD
PAGU PERUBAHAN APBD

Tanggal	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

....., tanggal.....

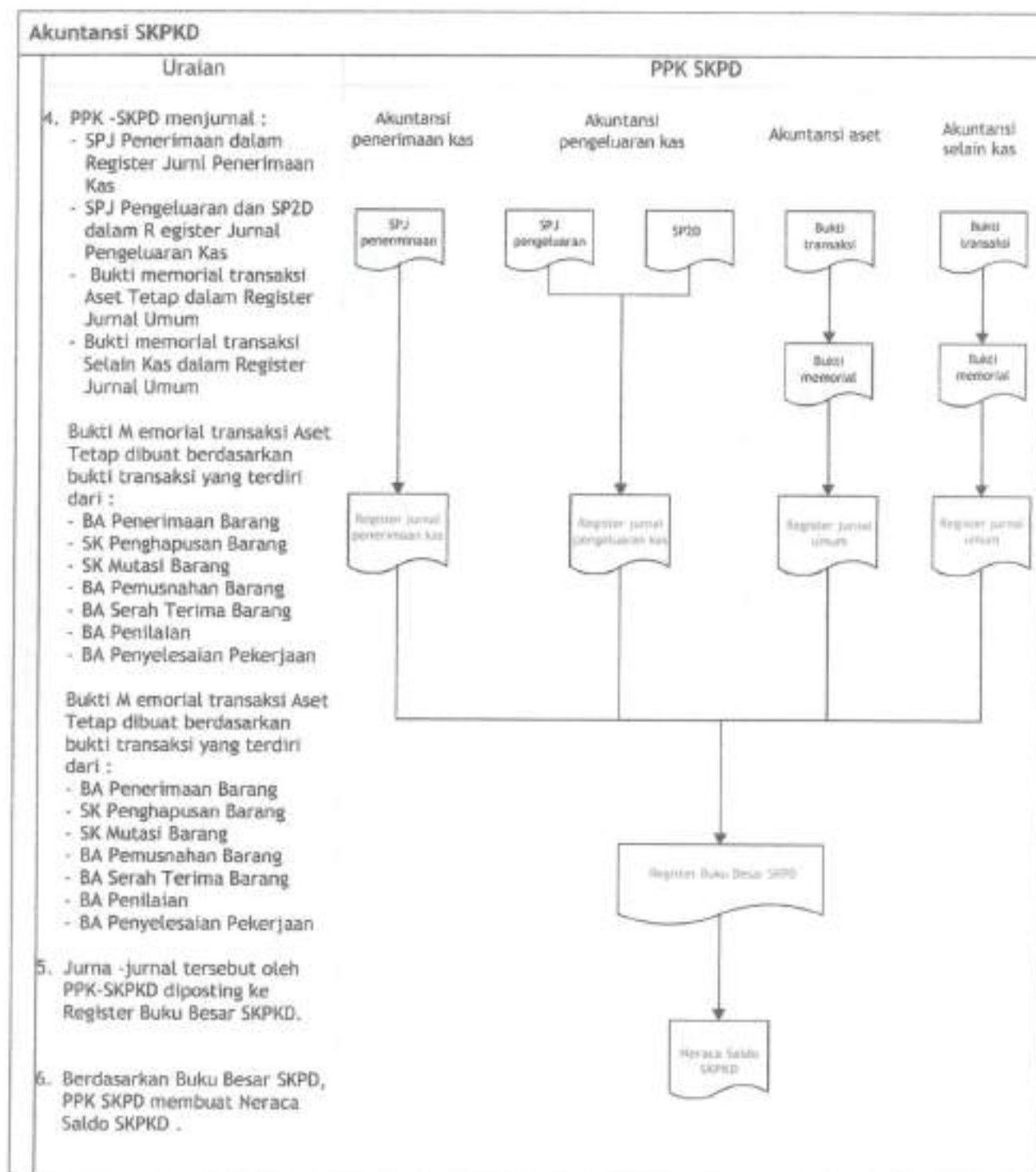
PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Bagan Alir Akuntansi SKPKD



BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1. Kerangka Hukum

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP no. 71 tahun 2010

Laporan Keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

4.2. Deskripsi Kegiatan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

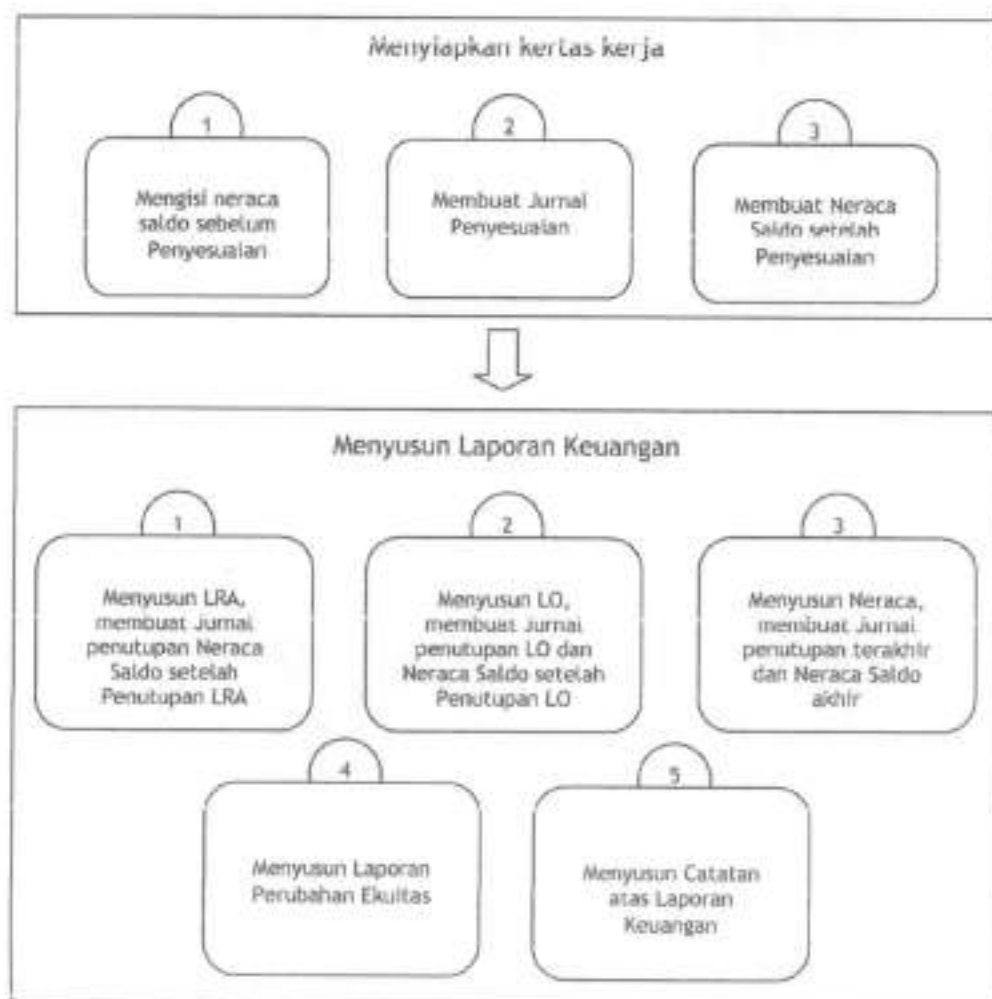
- ✓ Aset
- ✓ Kewajiban
- ✓ Ekuitas Dana
- ✓ Pendapatan
- ✓ Belanja
- ✓ Transfer
- ✓ Pembiayaan, dan
- ✓ Arus kas

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD:



Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu:

Semester, yang dimulai dari periode Januari - Juni

Tahunan, yang dimulai dari periode Januari - Desember

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Langkah 1 (Kertas Kerja)

- a. PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Contoh dokumen kertas kerja (worksheet) adalah sebagai berikut :

[illegible]

- b. PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut (dalam contoh ini adalah Dinas Kesehatan):

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000									
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000									
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000									
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000									
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000									
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000									
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		75.000.000								
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN		25.000.000								
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang										
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan										
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap		1.452.000.000								
3.4.1.01.01	RK Pemda		1.342.500.000								
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi		50.000.000								
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	950.000.000									
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.000.000									
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	30.000.000									
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	150.000.000									
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000									
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000									
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000									
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000									
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000									
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000									
		2.944.500.000	2.944.500.000								

- c. PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- ✓ Koreksi kesalahan / Pemindah bukuan
- ✓ Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment)
- ✓ Pencatatan piutang persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

Contoh jurnal penyesuaian adalah :

Pengakuan Piutang yang belum tertagih	1	Piutang	xxx
	1	Cadangan Piutang	xxx

Pengakuan Persediaan yang ada	1	Persediaan	xxx
	1	Cadangan Persediaan	xxx

Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut (dalam contoh ini adalah Dinas Kesehatan). Dalam contoh ini, terdapat dua jurnal penyesuaian untuk pengakuan piutang retribusi sebesar Rp 60 juta dan pengakuan persediaan obat-obatan sebesar 30 juta

1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	60.000.000	
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang		60.000.000
3.1.2.01.01	Persediaan Obat-obatan	30.000.000	
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan		30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian	
		D	K	D	K
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000			
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi				
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan			60.000.000	
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000		30.000.000	
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000			
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000			
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000			
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000			
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		75.000.000		
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN		25.000.000		
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang				60.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan				30.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap		1.452.000.000		
3.4.1.01.01	RK Pemda		1.342.500.000		
	SILPA				
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi		50.000.000		
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	750.000.000			
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	75.000.000			
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	10.000.000			
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	150.000.000			
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000			
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000			
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000			
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000			
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000			
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000			
		2.944.500.000	2.944.500.000	90.000.000	90.000.000

- d. PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut (dalam contoh ini adalah Dinas Kesehatan)

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	
		D	K	D	K	D	K
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000				1.500.000	
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi			60.000.000		60.000.000	
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan			30.000.000		30.000.000	
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000				100.000.000	
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000				20.000.000	
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000				7.000.000	
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000				750.000.000	
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000				650.000.000	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		75.000.000				75.000.000
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN		25.000.000				25.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang				60.000.000		60.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan				30.000.000		30.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap		1.452.000.000				1.452.000.000
3.4.1.01.01	RK Pemda		1.342.500.000				1.342.500.000
	SILPA						
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi		50.000.000				50.000.000
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	950.000.000				950.000.000	
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.000.000				95.000.000	
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	30.000.000				30.000.000	
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	150.000.000				150.000.000	
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000				10.000.000	
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000				1.000.000	
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000				75.000.000	
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000				50.000.000	
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000				20.000.000	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000				35.000.000	
		2.944.500.000	2.944.500.000	90.000.000	90.000.000	3.034.500.000	3.034.500.000

- e. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran" yang terdapat pada Kertas Kerja.
- f. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca" yang terdapat pada Kertas Kerja.
- g. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPK-SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPD belum membuat Jurnal Penutup.

Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut (dalam contoh ini adalah Dinas Kesehatan)

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000				1.500.000				1.500.000	
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi			60.000.000		60.000.000				60.000.000	
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan			30.000.000		30.000.000				30.000.000	
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000				100.000.000				100.000.000	
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000				20.000.000				20.000.000	
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000				7.000.000				7.000.000	
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000				750.000.000				750.000.000	
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000				650.000.000				650.000.000	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset		75.000.000				75.000.000				75.000.000
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN		25.000.000				25.000.000				25.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang			60.000.000			60.000.000				60.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan			30.000.000			30.000.000				30.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap		1.452.000.000				1.452.000.000				1.452.000.000
3.4.1.01.01	RK Pemda		1.342.500.000				1.342.500.000				1.342.500.000
	SILPA										
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi		50.000.000				50.000.000			1.366.000.000	
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	950.000.000				950.000.000		950.000.000			
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.000.000				95.000.000		95.000.000			
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan	30.000.000				30.000.000		30.000.000			
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional	150.000.000				150.000.000		150.000.000			
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000				10.000.000		10.000.000			
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000				1.000.000		1.000.000			
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000				75.000.000		75.000.000			
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000				50.000.000		50.000.000			
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000				20.000.000		20.000.000			
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000				35.000.000		35.000.000			
		2.944.500.000	2.944.500.000	90.000.000	90.000.000	3.034.500.000	3.034.500.000	1.416.000.000	50.000.000	2.984.500.000	2.984.500.000

Langkah 2 (Jurnal Penutup)

Pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pendapatan	xxx
Apropriasi Belanja	xxx
Defisit	xxx
Belanja	xxx
Estimasi Pendapatan	xxx
Surplus	xxx

Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Contoh Jurnal Penutup untuk Neraca Saldo diatas dan Neraca Saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut :

4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi	50.000.000	
3.1.1.01.01	SILPA		50.000.000
3.1.1.01.01	SILPA	1.416.000.000	
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	950.000.000	
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.000.000	
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	30.000.000	
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	150.000.000	
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000	
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000	
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000	
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000	
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo	
		D	K
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000	-
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	60.000.000	-
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	30.000.000	-
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000	-
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000	-
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000	-
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000	-
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000	-
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	75.000.000
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN	-	25.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	-	60.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan	-	30.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap	-	1.452.000.000
3.4.1.01.01	RK Pemda	-	1.342.500.000
3.1.1.01.01	SILPA	1.366.000.000	-
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi	-	-
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	-	-
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	-	-
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	-	-
5.1.1.01.05	Belanja Tunjngn Fungsional Umum	-	-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	-	-
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	-	-
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	-	-
5.2.2.03.01	Belanja telepon	-	-
5.2.2.03.02	Belanja air	-	-
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	-	-
		2.984.500.000	2.984.500.000

Langkah 3 (Menyusun Laporan Keuangan)

Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD terdiri dari

1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran

Membuat jurnal penutup LRA dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPK SKPD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam tahap sebagai berikut:

a. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit-LRA

Pendapatan-LRA	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Surplus/defisit-LRA	xxx

b. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit-LRA pada akun Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi

Surplus/defisit LRA	xxx
Perubahan SAL	xxx

2) Menyusun Laporan Operasional

jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO

PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

3) Menyusun Neraca

Jurnal penutup akhir dan Neraca Saldo Akhir Bersamaan dengan pembuatan LO, PPK SKPD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Berikut ini contoh jurnal penutup LO

Pendapatan-LO	xxx
Surplus/Defisit - LO	xxx
Beban	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, PPK SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPK SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas.

Berikut jurnal penutup akhir

Surplus/Defisit - LO	xxx
Ekuitas	xxx

Setelah membuat jurnal penutup akhir, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

PPK SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a) Informasi umum tentang entitas akuntansi.
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi- transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut adalah contoh dari Laporan Keuangan yang dihasilkan Satuan Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

SKPD.....

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah					
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah					
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
	Jumlah					
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERSI					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang					
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Tanah					
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin					
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan					
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya					
2.2.6	Belanja Aset Lainnya					
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga					
	Jumlah					
	Surplus/(Defisit)					

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
SKPD LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan			
1.1.2	Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang			
2.2	BELANJA MODAL			
2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan Belanja			
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah			
	Surplus/ (Defisit)			

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NERACA SKPD.....
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Piutang				
Piutang Retribusi				
Piutang Lain-lain				
Persediaan				
Jumlah				
ASET TETAP				
Tanah				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat Berat				
Alat-alat Angkutan				
Alat Bengkel				
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
Alat Ukur				
Alat-alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung				
Bangunan Monumen				
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi)				
Instalasi				
Jaringan				
Aset Tetap Lainnya				
Buku dan Perpustakaan				

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
Jumlah				
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud				
Aset Lain-Lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Uang Muka dari Kas Daerah				
Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang				
Cadangan Persediaan				
Jumlah				
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI				
RK PENDA				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Aset
	5.1.4	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset cjan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada SKPD.
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	

Langkah 4 (Pembuatan Jurnal Balik)

Jurnal Balik adalah proses pilihan yang dilakukan setelah pembuatan laporan keuangan. Jurnal balik adalah proses penjurnalan kembali untuk akun-akun yang dilakukan penyesuaian (misalnya persediaan) agar pada kondisi awal neraca periode berikutnya, nilainya menjadi nihil. Secara singkatnya, jurnal balik adalah jurnal penyesuaian dengan rekening yang sebelumnya di debit menjadi kredit dan rekening yang sebelumnya dikredit menjadi di debit. Contoh jurnal balik adalah :

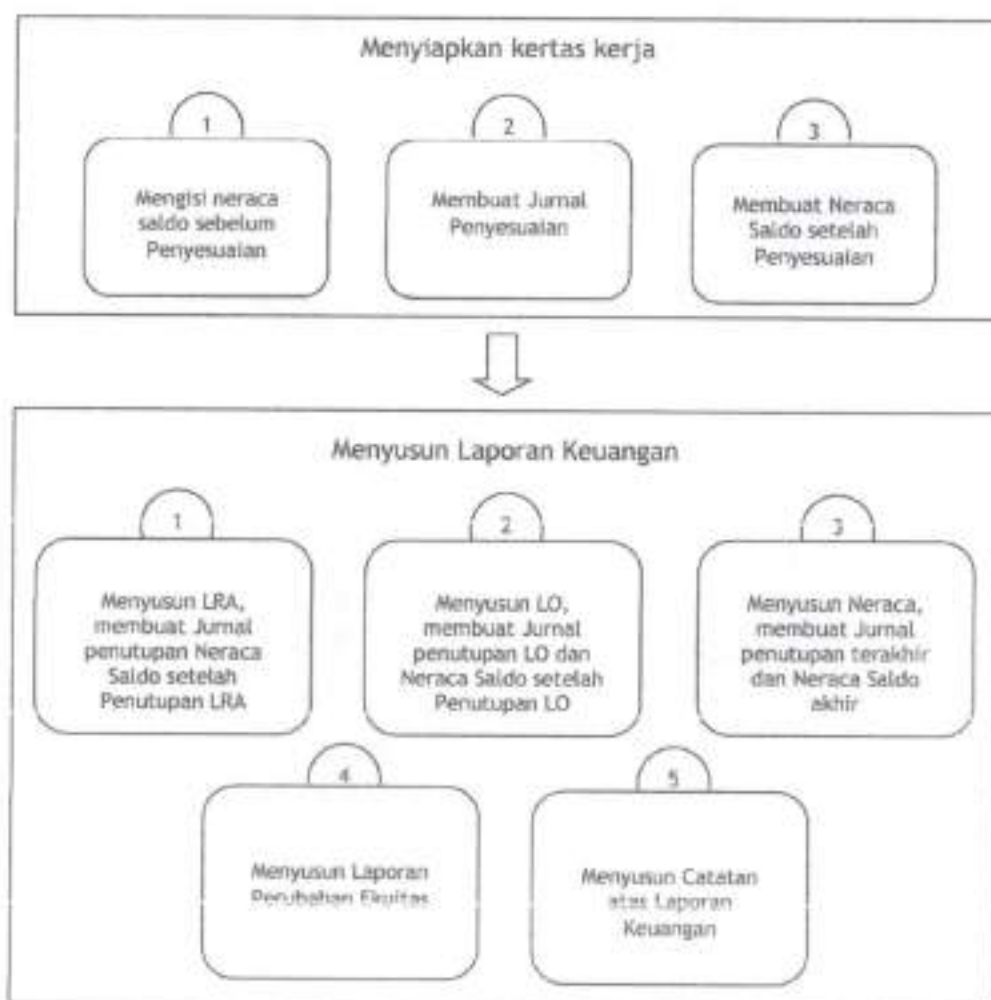
Pengakuan Persediaan yang ada	1	Cadangan Persediaan	xxx
		Persediaan	xxx

BAB V PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Laporan Keuangan PPKD yang dimaksud adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD :



Langkah 1 (Kertas Kerja)

- a. Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Contoh dokumen kertas kerja (worksheet) adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

- b. Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	10.000.000.000									
1.1.3.04.01	Piutang DAU										
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000.000									
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000.000									
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor		2.000.000.000								
2.2.1.03.01	Utang kepada Pemerintah Pusat		3.000.000.000								
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang										
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		2.000.000.000								
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.000.000.000									
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		500.000.000								
4.2.2.01.01	Pendapatan - DAU		5.000.000.000								
4.2.3.01.02	Pendapatan - DAK		3.000.000.000								
5.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka Pendek kepada Pemerintah	200.000.000									
5.1.3.01.02	Belanja- Subsidi kepada Lembaga	200.000.000									
5.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah Desa	100.000.000									
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah dari Pemerintah		3.000.000.000								
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank		2.000.000.000								
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000									
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD	2.000.000.000									
		20.500.000.000	20.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

- c. Fungsi Akuntansi di SKPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- ✓ Koreksi kesalahan
- ✓ Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- ✓ Pemindahbukuan
- ✓ Pencatatan piutang dan persediaan pada akhir tahun

Contoh jurnal penyesuaian adalah :

Pengakuan Piutang yang belum tertagih	1	Piutang	xxx
		Cadangan Piutang	xxx

Dalam contoh berikut, terdapat satu jurnal penyesuaian untuk pengakuan piutang DAU sebesar Rp 500 juta.

1.1.3.04.01	Piutang DAU	500.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	500.000.000

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian	
		D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	10.000.000.000			
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000.000	
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000.000			
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000.000			
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		2.000.000.000		
2.2.1.03.01	Utang kepada Pemerintah Pusat		3.000.000.000		
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang				500.000.000
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		2.000.000.000		
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.000.000.000			
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		500.000.000		
4.2.2.01.01	Pendapatan - DAU		5.000.000.000		
4.2.3.01.02	Pendapatan - DAK		3.000.000.000		
5.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka Pendek kepada Pemerintah	200.000.000			
5.1.3.01.02	Belanja - Subsidi kepada Lembaga	200.000.000			
5.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah Desa	100.000.000			
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah dari Pemerintah		3.000.000.000		
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank		2.000.000.000		
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000			
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD	2.000.000.000			
		20.500.000.000	20.500.000.000	500.000.000	500.000.000

- d. Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	
		D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	10.000.000.000				10.000.000.000	-
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000.000		500.000.000	-
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000.000				2.000.000.000	-
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000.000				500.000.000	-
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		2.000.000.000			-	2.000.000.000
2.2.1.03.01	Utang kepada Pemerintah Pusat		3.000.000.000			-	3.000.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang				500.000.000	-	500.000.000
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		2.000.000.000			-	2.000.000.000
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang	5.000.000.000				5.000.000.000	-
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		500.000.000			-	500.000.000
4.2.2.01.01	Pendapatan - DAU		5.000.000.000			-	5.000.000.000
4.2.3.01.02	Pendapatan - DAK		3.000.000.000			-	3.000.000.000
5.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka Pendek kepada	200.000.000				200.000.000	-
5.1.3.01.02	Belanja- Subsidi kepada Lembaga	200.000.000				200.000.000	-
5.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah Desa	100.000.000				100.000.000	-
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah dari Pemerintah		3.000.000.000			-	3.000.000.000
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank		2.000.000.000			-	2.000.000.000
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000				500.000.000	-
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD	2.000.000.000				2.000.000.000	-
						-	-
		20.500.000.000	20.500.000.000	500.000.000	500.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000

- e. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran" yang terdapat pada Kertas Kerja.
- f. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca" yang terdapat pada Kertas Kerja.
- g. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Fungsi Akuntansi di SKPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPKD belum membuat Jurnal Penutup.

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	10.000.000				10.000.000	-			10.000.000	-
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000		500.000,00	-			500.000,00	-
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000				2.000.000	-			2.000.000	-
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000,00				500.000,00	-			500.000,00	-
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor		2.000.000			- 2.000.000				- 2.000.000	
2.2.1.03.01	Utang kepada Pemerintah Pusat		3.000.000			- 3.000.000				- 3.000.000	
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang				500.000	- 500.000,00				- 500.000,00	
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi		2.000.000			- 2.000.000				- 2.000.000	
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang	5.000.000				5.000.000	-			5.000.000	-
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana		500.000,00			- 500.000,00				- 500.000,00	
											10.000.000
4.2.2.01.01	Pendapatan - DAU		5.000.000			- 5.000.000		5.000.000			
4.2.3.01.02	Pendapatan - DAK		3.000.000			- 3.000.000		3.000.000			
5.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka	200.000,00				200.000,00	- 200.000,0				
5.1.3.01.02	Belanja- Subsidi kepada Lembaga	200.000,00				200.000,00	- 200.000,0				
		0				0	00				
5.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah	100.000,00				100.000,00	- 100.000,0				
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah dari		3.000.000			- 3.000.000		3.000.000			
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank		2.000.000			- 2.000.000		2.000.000			
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000,00				500.000,00	- 500.000,0				
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD	2.000.000				2.000.000	- 2.000.000				
						-	-				
		20.500.000	20.500.000	500.000	500.000	21.000.000	21.000.000	3.000.000	13.000.000	18.000.000	18.000.000

Langkah 2 (Jurnal Penutup)

Pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pendapatan	xxx	
Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Apropriasi Belanja	xxx	
Estimasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx
Estimasi Pendapatan		xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan		xxx
SILPA		xxx

Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Contoh Jurnal Penutup untuk Neraca Saldo di atas dan Neraca Saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut :

4.1.1.01.01	Pendapatan DAU	5.000.000.000	
4.1.1.01.02	Pendapatan DAK	3.000.000.000	
3.1.1.01.01	SILPA		8.000.000.000
3.1.1.01.01	SILPA		
5.1.2.01.01	Belanja Bunga		
5.1.4.01.02	Belanja Subsidi		
5.1.4.03.01	Belanja Hibah		
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah	3.000.000.000	
6.1.4.03.01	Penerusan Pinjaman Bank	2.000.000.000	
3.1.1.01.01	SILPA		5.000.000.000
3.1.1.01.01	SILPA	2.500.000.000	
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan		500.000
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda		2.000.000.000

Langkah 3 (Menyusun Laporan Keuangan)

1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran

membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan. Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut :

a. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan-LRA	xxx	
Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx
Surplus/defisit-LRA		xxx

b. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit - LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/defisit LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

Kemudian setelah membuat jurnal penutup, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

2) Menyusun Laporan Operasional

jurnal penutup Laporan Operasional dan Neraca Saldo setelah Penutupan Laporan Operasional Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO	xxx	
Surplus/Defisit...-LO	xxx	
Beban		xxx

Kemudian setelah pembuatan jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

3) Menyusun Neraca

jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir

Surplus/Defisit...-LO	xxx
Ekuitas	xxx

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD Pemerintah Kabupaten.

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELIS REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

- a) Informasi umum tentang entitas akuntansi.
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi- transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya.
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut adalah contoh dari Laporan Keuangan yang dihasilkan Akuntansi PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN
BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak					
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)					
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum					
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus					
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus					
1.2.2.2	Dana Penyesuaian					
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hibah					
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat					
1.3.3	Pendapatan Lainnya					
	Jumlah					
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.2	Belanja Barang					
2.1.3	Belanja Bunga					
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah					
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan					
2.2	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.2.1	Belanja Tidak Terduga					
	Jumlah					
2.4	TRANSFER					
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA					

2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak					
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi					
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
	Surplus/Defisit					
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Daerah					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
	Jumlah					
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Jumlah					
	Pembiayaan Neto					
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)					

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN PENDAPATAN TRANSFER			
1.2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana			
1.2.1	Perimbangan			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum			
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat			
1.3.3	Pendapatan lainnya			
	Jumlah			
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.2	Belanja Barang			
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Subsidi			
2.1.5	Belanja Hibah			
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah			
2.4	TRANSFER			
	Surplus/ (Defisit)			

3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
3.2	PENGELUARAN DAERAH			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NERACA PPKD

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Kas Daerah				
Jumlah				
ASET UNTUK DIKONSOLIDASI				
RK SKPD RK SKPD				
Jumlah				
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Permanen				
Investasi Non Permanen				
Jumlah				
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud				
Aset Lain-Lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Utang Muka dari Kas Daerah				
Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang				
Cadangan Persediaan				
Jumlah				
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PPKD

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah PPKD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan PPKD
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Aset
	5.1.4	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada PPKD.
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD	
Bab VII	Penutup	

BAB VI

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account.

Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi. Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Langkah 1 (Kertas Kerja)

- a. Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

- b. Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Neraca Setelah Penyesuaian dari Neraca Saldo Satuan Kerja menjadi Neraca Saldo Pemda dan diletakkan di kolom "Neraca Saldo Pemda" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut (Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, PPKD dan Konsolidator):

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo DinKes		Neraca Saldo PPKD		Neraca Saldo Konsolidator		Neraca Saldo Pemda	
		Setelah Penyesuaian Dirikes		Setelah Penyesuaian		Setelah Penyesuaian		Konsolidasi	
		D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah			10.000.000.000		1.342.500.000	8.657.500.000		
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000					1.500.000		
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	60.000.000					60.000.000		
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000.000			500.000.000		
1.1.9.01.01	RK Dinas Pendidikan					1.342.500.000			
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	30.000.000					30.000.000		
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda			2.000.000.000			2.000.000.000		
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000					100.000.000		
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000					20.000.000		
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000					7.000.000		
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000					750.000.000		
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000					650.000.000		
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		75.000.000						75.000.000
1.4.1.01.01	Dana Cadangan			500.000.000			500.000.000		
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN		25.000.000						25.000.000
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan				2.000.000.000				2.000.000.000
2.2.1.03.01	Utang kepada Pemerintah Pusat				3.000.000.000				3.000.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang		60.000.000		500.000.000				560.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan		30.000.000						30.000.000
3.2.1.01.01	Dilvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang				2.000.000.000				2.000.000.000
3.2.2.01.01	Dilvestasikan dalam Aktiva Tetap		1.452.000.000						1.452.000.000
3.4.1.01.01	RK PPKD		1.342.500.000						1.342.500.000
	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran								
3.2.4.01.01	Utang			5.000.000.000			5.000.000.000		
3.3.1.01.01	Dilvestasikan dalam Dana Cadangan				500.000.000				500.000.000
	SILPA								
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi		50.000.000						50.000.000
4.2.2.01.01	Pendapatan - DUK				5.000.000.000				5.000.000.000
4.2.3.01.02	Pendapatan - DUK				3.000.000.000				3.000.000.000
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	950.000.000					950.000.000		
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.000.000					95.000.000		
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	30.000.000					30.000.000		
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	150.000.000					150.000.000		
5.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka Pendek kepada			200.000.000			200.000.000		
5.1.3.01.02	Belanja - Subsidi kepada Lembaga			200.000.000			200.000.000		
5.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah Desa			100.000.000			100.000.000		
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000					10.000.000		
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000					1.000.000		
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000					75.000.000		
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000					50.000.000		
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000					20.000.000		
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000					35.000.000		
6.1.4.01.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah				1.000.000.000				1.000.000.000
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank				2.000.000.000				2.000.000.000
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan			500.000.000			500.000.000		
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD			2.000.000.000			2.000.000.000		

- c. Fungsi Akuntansi di SKPKD membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat "reciprocals". Akun Reciprocal adalah akun-akun Rekening Koran (RK).

Contoh jurnal eliminasi adalah :

Eliminasi RK	1	RK PPKD	xxx
		RK Dinas	xxx
		RK Kantor	xxx
		RK Badan	xxx
			xxx

Dalam contoh ini, jurnal eliminasi adalah sebagai berikut:

3.4.1.01.01	RK PPKD	1.342.500.000
1.1.9.01.01	RK Dinas Kesehatan	1.342.500.000

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo Pemda		Penyesuaian	
		Konsolidasi			
		D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	8.657.500.000			
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000	-		
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	60.000.000	-		
1.1.3.04.01	Piutang DAU	500.000.000	-		
1.1.9.01.01	RK Dinas Pendidikan	1.342.500.000	-		1.342.500.000
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	30.000.000	-		
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000.000	-		
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000	-		
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000	-		
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000	-		
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000	-		
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000	-		
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	75.000.000		
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000.000	-		
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN	-	25.000.000		
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	2.000.000.000		
2.2.1.03.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	3.000.000.000		
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	-	560.000.000		
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan	-	30.000.000		
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	2.000.000.000		
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap	-	1.452.000.000		
3.4.1.01.01	RK PPKD	-	1.342.500.000	1.342.500.000	
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.000.000.000	-		
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	500.000.000		
	SILPA	-	-		
1.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi	-	50.000.000		
1.2.2.01.01	Pendapatan - DAU	-	5.000.000.000		
1.2.3.01.02	Pendapatan - DAK	-	3.000.000.000		
1.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	950.000.000	-		
1.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.000.000	-		
1.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	30.000.000	-		
1.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	150.000.000	-		
1.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka Pendek kepada Pemerintah	200.000.000	-		
1.1.3.01.02	Belanja- Subsidi kepada Lembaga	200.000.000	-		
1.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah Desa	100.000.000	-		
1.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000	-		
1.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD	2.000.000.000	-		

5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000	-		
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000	-		
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000	-		
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000	-		
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000	-		
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000	-		
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah dari	-	3.000.000.000		
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank	-	2.000.000.000		
		24.034.500.000	24.034.500.000	1.342.500.000	1.342.500.000

- d. Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Pemda Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo Pemda Konsolidasi		Penyesuaian		Neraca Saldo Pemda Setelah Penyesuaian	
		D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	8.657.500.000				8.657.500.000	-
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000	-			1.500.000	-
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	60.000.000	-			60.000.000	-
1.1.3.04.01	Piutang DAU	500.000.000	-			500.000.000	-
1.1.9.01.01	RK Dinas Pendidikan	1.342.500.000	-		1.342.500.000	1.342.500.000	-
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	30.000.000	-			30.000.000	-
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000.000	-			2.000.000.000	-
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000	-			100.000.000	-
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000	-			20.000.000	-
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000	-			7.000.000	-
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000	-			750.000.000	-
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000	-			650.000.000	-
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	75.000.000			-	75.000.000
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000.000	-			500.000.000	-
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN	-	25.000.000			-	25.000.000
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	2.000.000.000			-	2.000.000.000
2.2.1.03.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	3.000.000.000			-	3.000.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	-	560.000.000			-	560.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan	-	30.000.000			-	30.000.000
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	2.000.000.000			-	2.000.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap	-	1.452.000.000			-	1.452.000.000
3.4.1.01.01	RK PPKD	-	1.342.500.000	1.342.500.000		-	1.342.500.000
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	5.000.000.000	-			5.000.000.000	-
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	500.000.000			-	500.000.000
	SILPA						

4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi		-	50.000.000				-	50.000.000
4.2.2.01.01	Pendapatan - DAU		-	5.000.000.000				-	5.000.000.000
4.2.3.01.02	Pendapatan - DAK		-	3.000.000.000				-	3.000.000.000
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	950.000.000		-				950.000.000	-
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.000.000		-				95.000.000	-
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	30.000.000		-				30.000.000	-
5.1.1.01.05	Belanja Tunjngn Fungsional Umum	150.000.000		-				150.000.000	-
5.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka Pendek kepada Pemerintah	200.000.000		-				200.000.000	-
5.1.3.01.02	Belanja- Subsidi kepada Lembaga	200.000.000		-				200.000.000	-
5.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah Desa	100.000.000		-				100.000.000	-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000		-				10.000.000	-
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000		-				1.000.000	-
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000		-				75.000.000	-
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000		-				50.000.000	-
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000		-				20.000.000	-
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000		-				35.000.000	-
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah dari Pemerintah		-	3.000.000.000				-	3.000.000.000
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank		-	2.000.000.000				-	2.000.000.000
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000		-				500.000.000	-
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD	2.000.000.000		-				2.000.000.000	-
			-					-	
		24.034.500.000	24.034.500.000	1.342.500.000	1.342.500.000	24.034.500.000	24.034.500.000		

- e. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran" yang terdapat pada Kertas Kerja.
- f. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca" yang terdapat pada Kertas Kerja.
- g. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Fungsi Akuntansi di SKPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPKD belum membuat Jurnal Penutup.

Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kode	Uraian	Neraca Saldo Pemda		Penyesuaian	Neraca Saldo Pemda		Laporan		Neraca		
Rekening		Konsolidasi			Setelah Penyesuaian		Realisasi Anggaran				
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	8.657.500.000	-			8.657.500.000	-			8.657.500.000	-
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara	1.500.000	-			1.500.000	-			1.500.000	-
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	60.000.000	-			60.000.000	-			60.000.000	-
1.1.3.04.01	Piutang DAU	500.000.000	-			500.000.000	-			500.000.000	-
1.1.9.01.01	RK Dinas Pendidikan	1.342.500.000	-		1.342.500.000	1.342.500.000	-			1.342.500.000	-
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	30.000.000	-			30.000.000	-			30.000.000	-
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal	2.000.000.000	-			2.000.000.000	-			2.000.000.000	-
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000	-			100.000.000	-			100.000.000	-
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000	-			20.000.000	-			20.000.000	-
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000	-			7.000.000	-			7.000.000	-
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000	-			750.000.000	-			750.000.000	-
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000	-			650.000.000	-			650.000.000	-
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	75.000.000			-	75.000.000			-	75.000.000
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000.000	-			500.000.000	-			500.000.000	-
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN	-	25.000.000			-	25.000.000			-	25.000.000
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	2.000.000.000			-	2.000.000.000			-	2.000.000.000
2.2.1.03.01	Utang kepada	-	3.000.000.000			-	3.000.000.000			-	3.000.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	-	560.000.000			-	560.000.000			-	560.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan	-	30.000.000			-	30.000.000			-	30.000.000
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	2.000.000.000			-	2.000.000.000			-	2.000.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam	-	1.452.000.000			-	1.452.000.000			-	1.452.000.000
3.4.1.01.01	RK PPKD	-	1.342.500.000	1.342.500.000		-	1.342.500.000			-	1.342.500.000
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan untuk	5.000.000.000	-			5.000.000.000	-			5.000.000.000	-
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	500.000.000			-	500.000.000			-	500.000.000

	SILPA											8.634.000.000
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi		-	50.000.000				-	50.000.000		-	50.000.000
4.2.2.01.01	Pendapatan - DAU		-	5.000.000.000				-	5.000.000.000		-	5.000.000.000
4.2.3.01.02	Pendapatan - DAK		-	3.000.000.000				-	3.000.000.000		-	3.000.000.000
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	950.000.000		-			950.000.000		-	950.000.000		-
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.000.000		-			95.000.000		-	95.000.000		-
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	30.000.000		-			30.000.000		-	30.000.000		-
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	150.000.000		-			150.000.000		-	150.000.000		-
5.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka Pendek kepada Pemerintah	200.000.000		-			200.000.000		-	200.000.000		-
5.1.3.01.02	Belanja- Subsidi kepada Lembaga	200.000.000		-			200.000.000		-	200.000.000		-
5.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah Desa	100.000.000		-			100.000.000		-	100.000.000		-
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000		-			10.000.000		-	10.000.000		-
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas	1.000.000		-			1.000.000		-	1.000.000		-
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan	75.000.000		-			75.000.000		-	75.000.000		-
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000		-			50.000.000		-	50.000.000		-
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000		-			20.000.000		-	20.000.000		-
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35.000.000		-			35.000.000		-	35.000.000		-
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah dari Pemerintah		-	3.000.000.000				-	3.000.000.000		-	3.000.000.000
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank		-	2.000.000.000				-	2.000.000.000		-	2.000.000.000
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000		-			500.000.000		-	500.000.000		-
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD	2.000.000.000		-			2.000.000.000		-	2.000.000.000		-
		24.034.500.000	24.034.500.000	1.342.500.000	1.342.500.000	24.034.500.000	24.034.500.000	4.416.000.000	13.050.000.000	19.618.500.000	19.618.500.000	

Langkah 2 (Jurnal Penutup)

Pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pendapatan	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx
Apropriasi Belanja	xxx
Estimasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Estimasi Pendapatan	xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx
SILPA	xxx

Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar.

Contoh Jurnal Penutup untuk Neraca Saldo diatas dan Neraca Saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut:

4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi	50.000.000	
3.1.1.01.01	SILPA		50.000.000
3.1.1.01.01	SILPA	1.416.000.000	
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok		950.000.000
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga		95.000.000
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional		30.000.000
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum		150.000.000
5.2.2.01.01	Belanja ATK		10.000.000
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas		1.000.000
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan		75.000.000
5.2.2.03.01	Belanja telepon		50.000.000
5.2.2.03.02	Belanja air		20.000.000
5.2.2.03.03	Belanja Listrik		35.000.000
4.1.1.01.01	Pendapatan DAU	5.000.000.000	
4.1.1.01.02	Pendapatan DAK	3.000.000.000	
3.1.1.01.01	SILPA		8.000.000.000
3.1.1.01.01	SILPA	500.000.000	
5.1.2.01.01	Belanja Bunga		200.000.000
5.1.4.01.02	Belanja Subsidi		200.000.000
5.1.4.03.01	Belanja Hibah		100.000.000
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah	3.000.000.000	
6.1.4.03.01	Penerusan Pinjaman Bank	2.000.000.000	
3.1.1.01.01	SILPA		5.000.000.000
3.1.1.01.01	SILPA	2.500.000.000	
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan		500.000
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda		2.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Neraca	
		D	K
1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	8.657.500.000	-
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000	-
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	60.000.000	-
1.1.3.04.01	Piutang DAU	500.000.000	-
1.1.9.01.01	RK Dinas Pendidikan	1.342.500.000	-
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	30.000.000	-
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemda	2.000.000.000	-
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	100.000.000	-
1.3.2.09.04	Mesin Fotocopy	20.000.000	-
1.3.2.09.09	Papan Tulis Elektronik	7.000.000	-
1.3.3.01.01	Gedung Kantor	750.000.000	-
1.3.3.02.01	Gedung Rumah Jabatan	650.000.000	-
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	75.000.000
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	500.000.000	-
2.1.3.03.01	Utang Pemungutan PPN	-	25.000.000
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	2.000.000.000
2.2.1.03.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	3.000.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	-	560.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan	-	30.000.000
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	2.000.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap	-	1.452.000.000
3.4.1.01.01	RK PPKD	-	1.342.500.000
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang	5.000.000.000	-
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	500.000.000
	SILPA		8.634.000.000
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi		
4.2.2.01.01	Pendapatan - DAU		
4.2.3.01.02	Pendapatan - DAK		
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok		
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga		
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional		
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum		
5.1.2.01.01	Belanja - Bunga Utang Jangka Pendek kepada		
5.1.3.01.02	Belanja- Subsidi kepada Lembaga		
5.1.4.03.01	Belanja - Hibah kepada Pemerintah Desa		
5.2.2.01.01	Belanja ATK		
5.2.2.01.08	Belanja BBM/Gas		
5.2.2.02.04	Belanja Obat-obatan		
5.2.2.03.01	Belanja telepon		
5.2.2.03.02	Belanja air		
5.2.2.03.03	Belanja Listrik		
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman Daerah dari Pemerintah		
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman dari Bank		
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda - BUMD		
		19.618.500.000	19.618.500.000

Berikut adalah contoh dari Laporan Keuangan yang dihasilkan Akuntansi Pemda

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah					
1.1.2	Retribusi Daerah					
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak					
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)					
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum					
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus					
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus					
1.2.2.2	Dana Penyesuaian					
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hibah					
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat					
1.3.3	Lainnya					
	Jumlah					
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang					
2.1.3	Belanja Bunga					
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah					
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan					

2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Tanah					
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin					
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan					
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya					
2.2.6	Belanja Aset Lainnya					
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga					
	Jumlah					
2.4	TRANSFER					
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA					
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak					
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi					
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
	Surplus/Defisit					
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Daerah					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
	Jumlah					
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Jumlah					
	Pembiayaan Neto					
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)					

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
		Anggaran setelah perubahan	realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak Daerah				
1.1.2	Retribusi Daerah				
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah				
1.2	Dana perimbangan				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak				
1.2.2	Dana Alokasi Umum				
1.2.3	Dana Alokasi Khusus				
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
	Jumlah Pendapatan				

2	BELANJA DAERAH				
2.1.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah				
2.1.5	Belanja bantuan sosial				
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa				
	Jumlah Belanja				
	Surplus/ (Defisit)				
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan dana cadangan				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
3.1.6	Penerimaan piutang daerah				
	Jumlah penerimaan pembiayaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah				
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
	Jumlah pengeluaran pembiayaan				
	Pembiayaan netto				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan				

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NERACA

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

U R A I A N	Tahun n (Rp)	Tahun n-2 (Rp)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Dana Bagi Hasil		
Piutang Dana Alokasi Umum		
Piutang Dana Alokasi Khusus		
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Piutang Lain-lain		
Persediaan		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non permanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi Dana Bergulir		
Investasi Nonpermanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan		
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		
Investasi Permanen Lainnya		
ASET TETAP		
Tanah		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Alat-alat Berat		
Alat-alat Angkutan		
Alat Benqkel		
Alat Pertanian dan Peternakan		
Afat-aiat Kantor dan Rumah Tangga		

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		
Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
Ekuitas Dana Cadangan		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Aset
	5.1.4	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

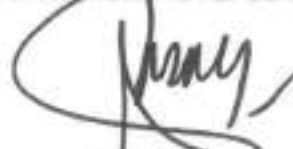
MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP 19691004 200112 1 003

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Aset
	5.1.4	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN II		
3	BKO		
4	KEPIMPINAN HUKUM		

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH

Kode Akun				Uraian Akun
1				ASET
1	1			ASET LANCAR
1	1	1		Kas dan Setara Kas
1	1	1	01	Kas di Kas Daerah
1	1	1	01	01 Kas di Kas Daerah
1	1	1	02	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	02	01 Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	03	Kas di Bendahara Penyelesaian
1	1	1	03	01 Kas di Bendahara Penyelesaian
1	1	1	04	Kas di BLUD
1	1	1	04	01 Kas di BLUD
1	1	1	05	Kas Lainnya
1	1	1	05	01 Kas Lainnya
1	1	1	06	Setara Kas
1	1	1	06	01 Setara Kas ...
1	1	1	06	02 Dst
1	1	2		Investasi Jangka Pendek
1	1	2	01	Investasi dalam Saham
1	1	2	01	01 Investasi dalam Saham
1	1	2	01	02 Dst
1	1	2	02	Investasi dalam Deposito
1	1	2	02	01 Deposito Jangka Pendek
1	1	2	03	Investasi dalam SUN
1	1	2	03	01 Investasi dalam SUN
1	1	2	04	Investasi dalam SBI
1	1	2	04	01 Investasi dalam SBI
1	1	2	05	Investasi dalam SPN
1	1	2	05	01 Investasi dalam SPN
1	1	2	06	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	06	01 Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	07	Investasi Jangka Pendek Lainnya
1	1	2	07	01 Investasi Jangka Pendek Lainnya
1	1	3		Piutang Pendapatan
1	1	3	01	Piutang Pajak Daerah
1	1	3	01	01 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	02 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	03 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	04 Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	3	01	05 Piutang Pajak Rokok
1	1	3	01	06 Piutang Pajak Hotel
1	1	3	01	07 Piutang Pajak Restoran
1	1	3	01	08 Piutang Pajak Hiburan
1	1	3	01	09 Piutang Pajak Reklame
1	1	3	01	10 Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	3	01	11 Piutang Pajak Parkir
1	1	3	01	12 Piutang Pajak Air Tanah
1	1	3	01	13 Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	3	01	14 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	3	01	15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1	1	3	01	16 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1	1	3	02	Piutang Retribusi
1	1	3	02 01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	3	02 02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	3	02 03	Piutang Retribusi Penyelesaian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
1	1	3	02 04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
1	1	3	02 05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	3	02 06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	3	02 07	Piutang Retribusi Penaurian Kendaraan Bermotor
1	1	3	02 08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	3	02 09	Piutang Retribusi Penyelesaian Biaya Cetak Peta
1	1	3	02 10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	3	02 11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	3	02 12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	3	02 13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	3	02 14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	3	02 15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	3	02 16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	3	02 17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	3	02 18	Piutang Retribusi Terminal
1	1	3	02 19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	3	02 20	Piutang Retribusi Tempat Penitipan/ Pesanggrahan/ Villa
1	1	3	02 21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	3	02 22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1	1	3	02 23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
1	1	3	02 24	Piutang Retribusi Penyebrangan Air
1	1	3	02 25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	3	02 26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	3	02 27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	3	02 28	Piutang Retribusi Izin Gangguan
1	1	3	02 29	Piutang Retribusi Izin Travak
1	1	3	02 30	Piutang Retribusi Izin Perikanan
1	1	3	02 31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	3	02 32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	3	03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	3	03 01	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD
1	1	3	03 02	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
1	1	3	03 03	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
1	1	3	04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	3	04 01	Piutang Jasa Giro
1	1	3	04 02	Piutang Bunga deposito
1	1	3	04 03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	3	04 04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
1	1	3	04 05	Piutang Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	3	04 06	Piutang Denda Pajak
1	1	3	04 07	Piutang Denda Retribusi
1	1	3	04 08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	3	04 09	Piutang dari Pengembalian
1	1	3	04 10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1	1	3	04 11	Piutang dari Asuransi/Cicilan Penjualan
1	1	3	04 12	Piutang Zakat *
1	1	3	04 13	Piutang hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1	1	3	04 14	Piutang BLUD
1	1	3	04 15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1	1	3	04 16	Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir
1	1	3	05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1	1	3	05 01	Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	3	05 02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1	1	3	06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
1	1	3	06 01	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur
1	1	3	07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	3	07 01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
1	1	3	07 02	Piutang Transfer Lainnya
1	1	3	08	Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	3	08 01	Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	4		Piutang Lainnya
1	1	4	01	Bagian Lancar Tagihan Janjika Panjang
1	1	4	01 01	Bagian Lancar Tagihan Janjika Panjang
1	1	4	02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Janjika Panjang kepada Entitas Lainnya
1	1	4	02 01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara
1	1	4	02 02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	1	4	02 03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah
1	1	4	02 04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

1	1	4	03		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran
1	1	4	03	01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran Rumah Dinas Daerah
1	1	4	03	02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	4	03	03	Dst.....
1	1	4	04		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	4	04	01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	4	04	02	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
1	1	4	05		Uang Muka
1	1	4	05	01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	4	05	02	Dst.....
1	1	5			Penvisihan Piutang
1	1	5	01		Penvisihan Piutang Pendapatan
1	1	5	01	01	Penvisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	5	01	02	Penvisihan Piutang Retribusi
1	1	5	01	03	Penvisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	5	01	04	Penvisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	5	01	05	Penvisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1	1	5	01	06	Penvisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	5	01	07	Penvisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	5	01	08	Dst.....
1	1	5	02		Penvisihan Piutang Lainnya
1	1	5	02	01	Penvisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	5	02	02	Penvisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	1	5	02	03	Penvisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Ansuran
1	1	5	02	04	Penvisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian
1	1	5	02	05	Penvisihan Uang Muka
1	1	5	02	06	Dst.....
1	1	6			Beban Dibayar Dimuka
1	1	6	01		Beban Pegawai Dibayar Dimuka
1	1	6	01	01	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka
1	1	6	01	02	Beban Tambahan Peningkatan PNS Dibayar Dimuka
1	1	6	02		Beban Barang Dibayar Dimuka
1	1	6	02	01	Beban Barang Dibayar Dimuka
1	1	6	03		Beban Jasa Dibayar Dimuka
1	1	6	03	01	Beban Jasa Dibayar Dimuka
1	1	6	03	02	Beban Sewa Dibayar Dimuka
1	1	6	04		Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1	1	6	04	01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1	1	6	05		Beban Lainnya
1	1	6	05	01	Beban Lainnya
1	1	7			Persediaan
1	1	7	01		Persediaan Bahan Pakai Habis
1	1	7	01	01	Persediaan Alat Tulis Kantor
1	1	7	01	02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	7	01	03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1	1	7	01	04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya
1	1	7	01	05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1	1	7	01	06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
1	1	7	01	07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran
1	1	7	01	08	Persediaan isi tabung gas
1	1	7	01	09	Dst.....
1	1	7	02		Persediaan Bahan/Material
1	1	7	02	01	Persediaan Bahan baku bangunan
1	1	7	02	02	Persediaan Bahan/bibit tanaman
1	1	7	02	03	Persediaan Bibit ternak
1	1	7	02	04	Persediaan Bahan obat-obatan
1	1	7	02	05	Persediaan Bahan kimia
1	1	7	02	06	Persediaan Bahan Material Pohon
1	1	7	02	07	Dst.....
1	1	7	03		Persediaan Barang Lainnya
1	1	7	03	01	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga
1	1	7	03	02	Dst.....
1	1	8			Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	8	01		RK SKPD
1	1	8	01	01	RK SKPD.....

1	2			INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	1		Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	1	01	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	2	1	01 01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	1	01 02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	1	01 03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1	2	1	01 04	Dst.....
1	2	1	02	Investasi dalam Obligasi
1	2	1	02 01	Investasi dalam Obligasi
1	2	1	02 02	Dst.....
1	2	1	03	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	03 01	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	03 02	Dst.....
1	2	1	04	Dana Bergulir
1	2	1	04 01	Dana Bergulir
1	2	1	04 02	Dst.....
1	2	1	05	Deposito Jangka Panjang
1	2	1	05 01	Deposito Jangka Panjang
1	2	1	05 02	Dst.....
1	2	1	06	Investasi Non Permanen Lainnya
1	2	1	06 01	Investasi Non Permanen Lainnya
1	2	1	06 02	Dst.....
1	2	2		Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	2	01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1	2	2	01 01	Penyertaan Modal Kepada BUMN
1	2	2	01 02	Penyertaan Modal Kepada BUMD
1	2	2	01 03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1	2	2	01 04	Dst.....
1	2	2	02	Investasi Permanen Lainnya
1	2	2	02 01	Investasi Permanen Lainnya
1	2	2	02 02	Dst.....
1	3			ASET TETAP
1	3	1		Tanah
1	3	1	01	Tanah Perkampungan
1	3	1	01 01	Tanah Kampung
1	3	1	01 02	Tanah Emplasmen
1	3	1	01 03	Tanah Kuburan
1	3	1	01 04	Dst.....
1	3	1	02	Tanah Pertanian
1	3	1	02 01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1	3	1	02 02	Tanah Tegalan
1	3	1	02 03	Tanah Ladang
1	3	1	02 04	Dst.....
1	3	1	03	Tanah Perkebunan
1	3	1	03 01	Tanah Perkebunan
1	3	1	03 02	Dst.....
1	3	1	04	Kebun Campuran
1	3	1	04 01	Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengaliran
1	3	1	04 02	Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1	3	1	04 03	Dst.....
1	3	1	05	Hutan
1	3	1	05 01	Hutan Lebat
1	3	1	05 02	Hutan Belukar
1	3	1	05 03	Hutan Tanaman Jenis
1	3	1	05 04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1	3	1	05 05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1	3	1	05 06	Dst.....
1	3	1	06	Kolam Ikan
1	3	1	06 01	Tambak
1	3	1	06 02	Air Tawar
1	3	1	06 03	Dst.....
1	3	1	07	Danau/Rawa
1	3	1	07 01	Danau
1	3	1	07 02	Rawa
1	3	1	08	Tanah Tandus/Rusak
1	3	1	08 01	Tanah Tandus
1	3	1	08 02	Tanah Rusak

1	3	1	09		Alane-alane dan Padane Rumput
1	3	1	09	01	Alane-alane
1	3	1	09	02	Padane Rumput
1	3	1	10		Tanah Penebuan Lain
1	3	1	10	01	Tanah Penebuan Lain.....
1	3	1	10	02	Dst.....
1	3	1	11		Tanah Untuk Bangunan Gedung
1	3	1	11	01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	1	11	02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	1	11	03	Tanah Untuk Bangunan Industri
1	3	1	11	04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1	3	1	11	05	Tanah Kosong
1	3	1	11	06	Tanah Peternakan
1	3	1	11	07	Tanah Bangunan Pengairan
1	3	1	11	08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1	3	1	11	09	Tanah Lempiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1	3	1	12		Tanah Pertambangan
1	3	1	12	01	Pertambangan
1	3	1	13		Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1	3	1	13	01	Tanah Lapangan Olah Raga
1	3	1	13	02	Tanah Lapangan Parkir
1	3	1	13	03	Tanah Lapangan Penimbun Barang
1	3	1	13	04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	1	13	05	Tanah Lapangan Penjualan/Pengolahan
1	3	1	13	06	Tanah Lapangan Terbang
1	3	1	13	07	Tanah Untuk Bangunan Jalan
1	3	1	13	08	Tanah untuk bangunan Air
1	3	1	13	09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1	3	1	13	10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1	3	1	13	11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1	3	1	13	12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
1	3	1	13	13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	2			Peralatan dan Mesin
1	3	2	01		Alat-Alat Besar Darat
1	3	2	01	01	Tractor
1	3	2	01	02	Grader
1	3	2	01	03	Excavator
1	3	2	01	04	Pile Driver
1	3	2	01	05	Hauler
1	3	2	01	06	Asphalt Equipment
1	3	2	01	07	Compacting Equipment
1	3	2	01	08	Aggregate & Concrete Equipment
1	3	2	01	09	Loader
1	3	2	01	10	Alat Pengangkat
1	3	2	01	11	Mesin Proses
1	3	2	02		Alat-Alat Besar Apung
1	3	2	02	01	Dredger
1	3	2	02	02	Floating Excavator
1	3	2	02	03	Amphibi Dredger
1	3	2	02	04	Kapal Tarik
1	3	2	02	05	Mesin Proses Apung
1	3	2	03		Alat-alat Bantu
1	3	2	03	01	Alat Penarik
1	3	2	03	02	Feeder
1	3	2	03	03	Compressor
1	3	2	03	04	Electric Generating Set
1	3	2	03	05	Pompa
1	3	2	03	06	Mesin Bor
1	3	2	03	07	Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	2	03	08	Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	2	03	09	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1	3	2	04		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	2	04	01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	2	04	02	Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	2	04	03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	2	04	04	Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	2	04	05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	2	04	06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	2	05		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	2	05	01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	2	05	02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1	3	2	05	03	Kendaraan Tak Bermotor Khusus

1	3	2	06		Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	2	06	01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1	3	2	06	02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1	3	2	06	03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1	3	2	07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	2	07	01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1	3	2	07	02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1	3	2	07	03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	2	08		Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	2	08	01	Pesawat Terbang
1	3	2	09	02	Dst.....
1	3	2	09		Alat Bengkel Bermesin
1	3	2	09	01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1	3	2	09	02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1	3	2	09	03	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	09	04	Perkakas Bengkel Service
1	3	2	09	05	Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	2	09	06	Perkakas Bengkel Kayu
1	3	2	09	07	Perkakas Bengkel Khusus
1	3	2	09	08	Peralatan Las
1	3	2	09	09	Perkakas Pabrik Es
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	2	10	01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	2	10	02	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	10	03	Perkakas Bengkel Service
1	3	2	10	04	Perkakas Pengangkat
1	3	2	10	05	Perkakas Standar (Standart Tool)
1	3	2	10	06	Perkakas Khusus (Special Tool)
1	3	2	10	07	Perkakas Bengkel Kerja
1	3	2	10	08	Peralatan Tukang-tukang Besi
1	3	2	10	09	Peralatan Tukang Kayu
1	3	2	10	10	Peralatan Tukang Kulit
1	3	2	10	11	Peralatan Ukur, Gie & Feting
1	3	2	11		Alat Ukur
1	3	2	11	01	Alat Ukur universal
1	3	2	11	02	Alat Ukur/Test Intelektensia
1	3	2	11	03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	2	11	04	Alat Ukur /Test Klinis Lain
1	3	2	11	05	Alat Calibrasi
1	3	2	11	06	Oscilloscope
1	3	2	11	07	Universal Tester
1	3	2	11	08	Alat ukur/Pembandingan
1	3	2	11	09	Alat Ukur Lainnya
1	3	2	11	10	Alat Timbangan/Biora
1	3	2	11	11	Anak Timbangan/Biasa
1	3	2	11	12	Takaran Kering
1	3	2	11	13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1	3	2	11	14	Takaran Latex/Getai Susu
1	3	2	11	15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas
1	3	2	12		Alat Penyelesaian
1	3	2	12	01	Alat Penyelesaian Tanah dan Tanaman
1	3	2	12	02	Alat Panen/Penyelesaian
1	3	2	12	03	Alat-Alat Peternakan
1	3	2	12	04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	2	12	05	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	12	06	Alat Processing
1	3	2	12	07	Alat Pasca Panen
1	3	2	12	08	Alat Produksi Peternakan
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan
1	3	2	13	01	Alat Pemeliharaan Tanaman
1	3	2	13	02	Alat Panen
1	3	2	13	03	Alat Penyimpanan
1	3	2	13	04	Alat Laboratorium
1	3	2	13	05	Alat Penangkai Ikan
1	3	2	14		Alat Kantor
1	3	2	14	01	Mesin Tik
1	3	2	14	02	Mesin Hitung/ Jumlah
1	3	2	14	03	Alat Reproduksi (Penganda)
1	3	2	14	04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1	3	2	14	05	Alat Kantor Lainnya

1	3	2	15	Alat Rumah Tangga
1	3	2	15	01 Meubelair
1	3	2	15	02 Alat Pengukur Waktu
1	3	2	15	03 Alat Pembersih
1	3	2	15	04 Alat Pendingin
1	3	2	15	05 Alat Dapur
1	3	2	15	06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	2	15	07 Alat Pemadam Kebakaran
1	3	2	16	Komputer
1	3	2	16	01 Komputer Unit/Jaringan
1	3	2	16	02 Personal Komputer
1	3	2	16	03 Peralatan Komputer Mainframe
1	3	2	16	04 Peralatan Mini Komputer
1	3	2	16	05 Peralatan Personal Komputer
1	3	2	16	06 Peralatan Jaringan
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	2	17	01 Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	02 Meja Rapat Pejabat
1	3	2	17	03 Kursi Kerja Pejabat
1	3	2	17	04 Kursi Rapat Pejabat
1	3	2	17	05 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	06 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	2	17	07 Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	2	18	Alat Studio
1	3	2	18	01 Peralatan Studio Visual
1	3	2	18	02 Peralatan Studio Video dan Film
1	3	2	18	03 Peralatan Studio Video dan Film A
1	3	2	18	04 Peralatan Cetak
1	3	2	18	05 Peralatan Comouting
1	3	2	18	06 Peralatan Pemetaan Ukur
1	3	2	19	Alat Komunikasi
1	3	2	19	01 Alat Komunikasi Telephone
1	3	2	19	02 Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	2	19	03 Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	2	19	04 Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	2	19	05 Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	2	19	06 Alat Komunikasi Sosial
1	3	2	19	07 Alat-alat Sandi
1	3	2	20	Peralatan Pemancar
1	3	2	20	01 Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	2	20	02 Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	2	20	03 Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	2	20	04 Peralatan Pemancar UHF
1	3	2	20	05 Peralatan Pemancar SHF
1	3	2	20	06 Peralatan Antena MF/MW
1	3	2	20	07 Peralatan Antena HF/SW
1	3	2	20	08 Peralatan Antena VHF/FM
1	3	2	20	09 Peralatan Antena UHF
1	3	2	20	10 Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	2	20	11 Peralatan Translator VHF/VHF
1	3	2	20	12 Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	2	20	13 Peralatan Translator VHF/UHF
1	3	2	20	14 Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	2	20	15 Peralatan Microwave FPU
1	3	2	20	16 Peralatan Microwave Terrestrial
1	3	2	20	17 Peralatan Microwave TVRO
1	3	2	20	18 Peralatan Dummy Load
1	3	2	20	19 Switcher Antena
1	3	2	20	20 Switcher/Multiple Antena
1	3	2	20	21 Feeder
1	3	2	20	22 Humidity Control
1	3	2	20	23 Program Input Equipment
1	3	2	20	24 Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	2	21	Alat Kedokteran
1	3	2	21	01 Alat Kedokteran Umum
1	3	2	21	02 Alat Kedokteran Gigi
1	3	2	21	03 Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	2	21	04 Alat Kedokteran Mata
1	3	2	21	05 Alat Kedokteran T.H.T
1	3	2	21	06 Alat Rontgen
1	3	2	21	07 Alat Farmasi

1	3	2	21	14	Penderita Cacat Tubuh
1	3	2	21	15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1	3	2	21	16	Alat Kedokteran Jantung
1	3	2	21	17	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	2	21	18	Alat Kedokteran Radiologi
1	3	2	21	19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	2	21	20	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	2	21	21	Alat Kedokteran Jiwa
1	3	2	21	22	Alat Kedokteran Hewan
1	3	2	21	23	Dst.....
1	3	2	22		Alat Kesehatan
1	3	2	22	01	Alat Kesehatan Perawatan
1	3	2	22	02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	2	22	03	Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	2	22	04	Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	2	22	05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1	3	2	22	06	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	2	22	07	Dst.....
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium
1	3	2	23	01	Alat Laboratorium Kimia Air
1	3	2	23	02	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	03	Alat Laboratorium Hidro Kimia
1	3	2	23	04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1	3	2	23	05	Alat Laboratorium Buan/Geologi
1	3	2	23	06	Alat Laboratorium Bahan Binaan Konstruksi
1	3	2	23	07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1	3	2	23	08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan
1	3	2	23	09	Alat Laboratorium Cokok Tanam
1	3	2	23	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1	3	2	23	11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1	3	2	23	12	Alat Laboratorium Umum
1	3	2	23	13	Alat Laboratorium Umum A
1	3	2	23	14	Alat Laboratorium Kedokteran
1	3	2	23	15	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	16	Alat Laboratorium Kimia
1	3	2	23	17	Alat Laboratorium Microbiologi A
1	3	2	23	18	Alat Laboratorium Patologi
1	3	2	23	19	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	2	23	20	Alat Laboratorium Hematologi
1	3	2	23	21	Alat Laboratorium Film
1	3	2	23	22	Alat Laboratorium Makanan
1	3	2	23	23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	2	23	24	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	2	23	25	Alat Laboratorium Fisika
1	3	2	23	26	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	23	27	Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	2	23	28	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	2	23	29	Alat Laboratorium Pasir
1	3	2	23	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	3	2	23	31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1	3	2	23	32	Alat Laboratorium Metalografi
1	3	2	23	33	Alat Laboratorium Proses Pencelasan
1	3	2	23	34	Alat Laboratorium Uji Proses Pencelasan
1	3	2	23	35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	2	23	36	Alat Laboratorium Metalografi
1	3	2	23	37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1	3	2	23	38	Alat Laboratorium Proses Penolahan Panas
1	3	2	23	39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1	3	2	23	40	Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	3	2	23	41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	2	23	42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1	3	2	23	43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1	3	2	23	44	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	2	23	45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	2	23	46	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	23	47	Alat Laboratorium Pertanian A
1	3	2	23	48	Alat Laboratorium Pertanian B
1	3	2	23	49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	2	23	50	Alat Laboratorium Energi Surya

1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	2	24	01	Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1	3	2	24	02	Bidang Studi : Matematika
1	3	2	24	03	Bidang Studi : IPA Dasar
1	3	2	24	04	Bidang Studi : IPA Lanjutan
1	3	2	24	05	Bidang Studi : IPA Menengah
1	3	2	24	06	Bidang Studi : IPA Atas
1	3	2	24	07	Bidang Studi : IPS
1	3	2	24	08	Bidang Studi : Agama Islam
1	3	2	24	09	Bidang Studi : Ketrampilan
1	3	2	24	10	Bidang Studi : Kesenian
1	3	2	24	11	Bidang Studi : Olahraga
1	3	2	24	12	Bidang Studi : PMP
1	3	2	24	13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	2	25	01	Analytical instrument
1	3	2	25	02	Instrument Probe/Sensor
1	3	2	25	03	General Laboratory Tool
1	3	2	25	04	Instrument Probe/Sensor A
1	3	2	25	05	Glassware Plastic/Utensils
1	3	2	25	06	Laboratory Safety Equipment
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	2	26	01	Radiation Detector
1	3	2	26	02	Modular Counting and Scientific
1	3	2	26	03	Assembly/Accounting System
1	3	2	26	04	Recorder Display
1	3	2	26	05	System/Power Supply
1	3	2	26	06	Measuring / Testing Device
1	3	2	26	07	Opto Electronics
1	3	2	26	08	Accelerator
1	3	2	26	09	Reactor Experimental System
1	3	2	26	10	Dst.....
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	01	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	2	27	02	Alat Kesehatan Kerja
1	3	2	27	03	Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	04	Meteorological Equipment
1	3	2	27	05	Sumber Radiasi
1	3	2	28		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	2	28	01	Radiation Application Equipment
1	3	2	28	02	Non Destructive Test (NDT) Device
1	3	2	28	03	Peralatan Umum Kedokteran / Klinik Nuklir
1	3	2	28	04	Peralatan Hidrologi
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	2	29	01	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
1	3	2	29	02	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	2	29	03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	2	29	04	Laboratorium Lingkungan
1	3	2	29	05	Alat Laboratorium Penunjang
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	30	01	Towing Carriage
1	3	2	30	02	Wave Generator and Absorber
1	3	2	30	03	Data Acquisition and Analyzing System
1	3	2	30	04	Cavitation Tunnel
1	3	2	30	05	Overhead Cranes
1	3	2	30	06	Peralatan umum
1	3	2	30	07	Pemesinan : Model Ship Workshop
1	3	2	30	08	Pemesinan : Propeller Model Workshop
1	3	2	30	09	Pemesinan : Mechanical Workshop
1	3	2	30	10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1	3	2	30	11	Pemesinan Painting Shop
1	3	2	30	12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1	3	2	30	13	Pemesinan : Electrical Workshop
1	3	2	30	14	MOB
1	3	2	30	15	Photo and Film Equipment

1	3	2	31	Senjata Api
1	3	2	31 01	Senjata Gerakam
1	3	2	31 02	Senjata Pengebom
1	3	2	31 03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1	3	2	31 04	Senapan Mesin
1	3	2	31 05	Mortir
1	3	2	31 06	Anti Lapis Baja
1	3	2	31 07	Artilleri Medan (Armed)
1	3	2	31 08	Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)
1	3	2	31 09	Peluru Kendali/Rudal
1	3	2	31 10	Kavaleri
1	3	2	31 11	Senjata Lain-lain
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api
1	3	2	32 01	Alat Keamanan
1	3	2	32 02	Non Senjata Api
1	3	2	33	Amunisi
1	3	2	33 01	Amunisi Umum
1	3	2	33 02	Amunisi Darat
1	3	2	34	Senjata Sinar
1	3	2	34 01	Laser
1	3	2	34 02	Dst.....
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	2	35 01	Alat Bantu Keamanan
1	3	2	35 02	Alat Perlindungan
1	3	2	35 03	Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
1	3	2	35 04	Dst.....
1	3	3		Gedung dan Bangunan
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	3	01 01	Bangunan Gedung Kantor
1	3	3	01 02	Bangunan Gudang
1	3	3	01 03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1	3	3	01 04	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	3	01 05	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	3	01 06	Bangunan Kesehatan
1	3	3	01 07	Bangunan Oceanarium/Opervatorium
1	3	3	01 08	Bangunan Gedung Tempat ibadah
1	3	3	01 09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	3	01 10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	3	01 11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1	3	3	01 12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	3	01 13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1	3	3	01 14	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	3	01 15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1	3	3	01 16	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	3	01 17	Bangunan Stasiun Bus
1	3	3	01 18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1	3	3	01 19	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	3	01 20	Bangunan Gedung Museum
1	3	3	01 21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1	3	3	01 22	Bangunan Penerbitan Kelahiran
1	3	3	01 23	Bangunan Lembaga Pemasarakatan
1	3	3	01 24	Bangunan Rumah Tahanan
1	3	3	01 25	Bangunan Gedung Kramatorium
1	3	3	01 26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	3	01 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	3	02 01	Rumah Negara Golongan I
1	3	3	02 02	Rumah Negara Golongan II
1	3	3	02 03	Rumah Negara Golongan III
1	3	3	02 04	Mess/Wisma/Dunaklow/Tempat Peristirahatan
1	3	3	02 05	Asrama
1	3	3	02 06	Hotel
1	3	3	02 07	Motel
1	3	3	02 08	Flat/Rumah Susun
1	3	3	03	Bangunan Menara
1	3	3	03 01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1	3	3	03 02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
1	3	3	03 03	Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah
1	3	3	04 01	Istana Peringatan
1	3	3	04 02	Rumah Adat
1	3	3	04 03	Rumah Peninggalan Sejarah
1	3	3	04 04	Makam Sejarah
1	3	3	04 05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah

1	1	1	05		Tugu Peringatan
1	3	3	05	01	Tugu Kemerdekaan
1	3	3	05	02	Tugu Pembangunan
1	3	3	05	03	Tugu Peringatan Lainnya
1	3	3	06		Candi
1	3	3	06	01	Candi Hindhu
1	3	3	06	02	Candi Budha
1	3	3	06	03	Candi Lainnya
1	3	3	07		Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	3	07	01	Bangunan Bersejarah Lainnya
1	3	3	08		Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	3	08	01	Tugu/Tanda Batas
1	3	3	09		Rambu-Rambu
1	3	3	09	01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1	3	3	09	02	Rambu Tidak Bersuar
1	3	3	10		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	3	10	01	Runway/Threshold Light
1	3	3	10	02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1	3	3	10	03	Approach Light
1	3	3	10	04	Runway Identification Light (RLLs)
1	3	3	10	05	Signal
1	3	3	10	06	Flood Light
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	3	4	01		Jalan
1	3	4	01	01	Jalan Negara/Nasional
1	3	4	01	02	Jalan Provinsi
1	3	4	01	03	Jalan Kabupaten/Kota
1	3	4	01	04	Jalan Desa
1	3	4	01	05	Jalan Khusus
1	3	4	01	06	Jalan Tol
1	3	4	01	07	Jalan Kereta
1	3	4	01	08	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	02		Jembatan
1	3	4	02	01	Jembatan Negara/Nasional
1	3	4	02	02	Jembatan Provinsi
1	3	4	02	03	Jembatan Kabupaten/Kota
1	3	4	02	04	Jembatan Desa
1	3	4	02	05	Jembatan Khusus
1	3	4	02	06	Jembatan Pada Jalan Tol
1	3	4	02	07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1	3	4	02	08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	02	09	Jembatan Penyeberangan
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi
1	3	4	03	01	Bangunan Waduk
1	3	4	03	02	Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	4	03	03	Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	4	03	04	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	4	03	05	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	4	03	06	Bangunan Petenkap Irigasi
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut
1	3	4	04	01	Bangunan Waduk
1	3	4	04	02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	4	04	03	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	4	04	04	Bangunan Pembuang Pasang Surut
1	3	4	04	05	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	4	04	06	Bangunan Petenkap Pasang Surut
1	3	4	04	07	Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa
1	3	4	05	01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1	3	4	05	02	Bangunan Pengambilan Pasang Rawa
1	3	4	05	03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1	3	4	05	04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1	3	4	05	05	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	4	05	06	Bangunan Petenkap Pasang Rawa
1	3	4	05	07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	4	05	08	Dst.....

1	3	4	06		Bangunan Penataan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	4	06	01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1	3	4	06	02	Bangunan Pengambilan Penanganan Sungai
1	3	4	06	03	Bangunan Pembuang Penanganan
1	3	4	06	04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	4	06	05	Bangunan Penataan Penanganan Sungai
1	3	4	06	06	Bangunan Pelengkap Penanganan Sungai
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	4	07	01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	05	Bangunan Penanganan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	4	08	01	Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1	3	4	08	03	Bangunan Pembawa Air Bersih
1	3	4	08	04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor
1	3	4	09	01	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	4	09	02	Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	4	09	03	Bangunan Pembuangan Air Kotor
1	3	4	09	04	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	4	09	05	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	4	10		Bangunan Air
1	3	4	10	01	Bangunan Air Laut
1	3	4	10	02	Bangunan Air Tawar
1	3	4	11		Instalasi Air Minum Bersih
1	3	4	11	01	Air Muka Tanah
1	3	4	11	02	Air Sumber /Mata Air
1	3	4	11	03	Air Tanah Dalam
1	3	4	11	04	Air Tanah Dangkal
1	3	4	11	05	Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	01	Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	02	Instalasi Air Buangan Industri
1	3	4	12	03	Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	4	13		Instalasi Penolahan Sampah Organik dan Non Organik
1	3	4	13	01	Instalasi Penolahan Sampah Organik
1	3	4	13	02	Instalasi Penolahan Sampah Non Organik
1	3	4	14		Instalasi Penolahan Bahan Bangunan
1	3	4	14	01	Instalasi Penolahan Bahan Bangunan
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	4	15	01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	4	15	02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	4	15	03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTH)
1	3	4	15	04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA)
1	3	4	15	05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	4	15	06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	4	15	07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	4	15	08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	4	15	09	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	4	15	10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	4	15	11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSM)
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik
1	3	4	16	01	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	4	16	02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	4	16	03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan
1	3	4	17	01	Instalasi Pertahanan Di Darat
1	3	4	17	02	Dst.....

1	3	4	18	Instalasi Gas
1	3	4	18 01	Instalasi Gardu Gas
1	3	4	18 02	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	4	19	Instalasi Pengaman
1	3	4	19 01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	4	20	Jaringan Air Minum
1	3	4	20 01	Jaringan Pembawa
1	3	4	20 02	Jaringan Induk Distribusi
1	3	4	20 03	Jaringan Cabang Distribusi
1	3	4	20 04	Jaringan Sambungan ke rumah
1	3	4	21	Jaringan Listrik
1	3	4	21 01	Jaringan Transmisi
1	3	4	21 02	Jaringan Distribusi
1	3	4	22	Jaringan Telepon
1	3	4	22 01	Jaringan Telepon Di atas Tanah
1	3	4	22 02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1	3	4	22 03	Jaringan Telepon Didalam Air
1	3	4	23	Jaringan Gas
1	3	4	23 01	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	4	23 02	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	4	23 03	Jaringan Pipa Dinas
1	3	4	23 04	Jaringan BBM
1	3	4	23 05	Dst.....
1	3	5		Aset Tetap Lainnya
1	3	5	01	Buku
1	3	5	01 01	Umum
1	3	5	01 02	Filsafat
1	3	5	01 03	Agama
1	3	5	01 04	Ilmu Sosial
1	3	5	01 05	Ilmu Bahasa
1	3	5	01 06	Matematika & Pengetahuan alam
1	3	5	01 07	Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	5	01 08	Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1	3	5	01 09	Geografi, Biografi, Sejarah
1	3	5	01 10	Dst.....
1	3	5	02	Terbitan
1	3	5	02 01	Terbitan Berkala
1	3	5	02 02	Buku Laporan
1	3	5	02 03	Dst.....
1	3	5	03	Barang-Barang Permustakaan
1	3	5	03 01	Peta
1	3	5	03 02	Naskah (Manuskrip)
1	3	5	03 03	Musik
1	3	5	03 04	Karya Grafika (Graphic Material)
1	3	5	03 05	Three Dimensional Artifacts and Realita
1	3	5	03 06	Bentuk Micro (Microform)
1	3	5	03 07	Rekaman Suara (Sound Recording)
1	3	5	03 08	Berkas Komputer (Computer Files)
1	3	5	03 09	Film Bergerak dan Rekaman Video
1	3	5	03 10	Tarsalt
1	3	5	03 11	Dst.....
1	3	5	04	Barang Bersifat Kebudayaan
1	3	5	04 01	Pahatan
1	3	5	04 02	Lukisan
1	3	5	04 03	Alat Kesenian
1	3	5	04 04	Alat Olah Raga
1	3	5	04 05	Tanda Penghargaan
1	3	5	04 06	Maket dan Foto Dokumen
1	3	5	04 07	Benda-benda Bersejarah
1	3	5	04 08	Barang Kerasinan
1	3	5	05	Alat Olah Raga Lainnya
1	3	5	05 01	Senam
1	3	5	05 02	Alat Olah Raga Air
1	3	5	05 03	Alat Olah Raga Udara
1	3	5	06	Hewan
1	3	5	06 01	Binatang Ternak
1	3	5	06 02	Binatang Ungas
1	3	5	06 03	Binatang Melata
1	3	5	06 04	Binatang Ikan
1	3	5	06 05	Hewan Kebun Binatang
1	3	5	06 06	Hewan Penanaman

1	3	5	07		Tanaman
1	3	5	07	01	Tanaman Perkebunan
1	3	5	07	02	Tanaman Hortikultura
1	3	5	07	03	Tanaman Kehutanan
1	3	5	07	04	Tanaman Hias
1	3	5	07	05	Tanaman Obat dan Kosmetika
1	3	5	08		Aset Tetap Renovasi
1	3	5	08	01	Aset Tetap Renovasi
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	7			Akumulasi Penyusutan
1	3	7	01		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	7	01	01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1	3	7	01	02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
1	3	7	01	03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
1	3	7	01	04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	7	01	05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	7	01	06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	7	01	07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	7	01	08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	7	01	09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1	3	7	01	10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	7	01	11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1	3	7	01	12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
1	3	7	01	13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Pervimban Pertanian
1	3	7	01	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
1	3	7	01	15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1	3	7	01	16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
1	3	7	01	17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	7	01	18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
1	3	7	01	19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
1	3	7	01	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1	3	7	01	21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1	3	7	01	22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1	3	7	01	23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1	3	7	01	24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	7	01	25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	7	01	26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	7	01	27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	7	01	28	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testine Laboratory
1	3	7	01	29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	7	01	30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	7	01	31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api
1	3	7	01	32	Akumulasi Penyusutan Peralatan Non Senjata Api
1	3	7	01	33	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	7	02		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	7	02	01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	7	02	02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	7	02	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	7	02	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	05	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
1	3	7	02	06	Akumulasi Penyusutan Candi
1	3	7	02	07	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	08	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	7	02	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1	3	7	02	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	7	03		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Irigasi
1	3	7	03	01	Akumulasi Penyusutan Jalan
1	3	7	03	02	Akumulasi Penyusutan Jembatan
1	3	7	03	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi
1	3	7	03	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1	3	7	03	05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1	3	7	03	06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana
1	3	7	03	07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	7	03	08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	7	03	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
1	3	7	03	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	7	03	11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1	3	7	03	12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor
1	3	7	03	13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	7	03	14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

1	3	7	03	22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon
1	3	7	03	23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas
1	4				DANA CADANGAN
1	4	1			Dana Cadangan
1	4	1	01		Dana Cadangan
1	4	1	01	01	Dana Cadangan
1	5				ASET LAINNYA
1	5	1			Taahian Jangka Panjang
1	5	1	01		Taahian Penjualan Anesuran
1	5	1	01	01	Taahian Anesuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1	5	1	01	02	Taahian Anesuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	2	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	2	02	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	2	02	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
1	5	2			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	2	01		Sewa
1	5	2	01	01	Sewa
1	5	2	02		Kerjasama Pemanfaatan
1	5	2	02	01	Kerjasama Pemanfaatan
1	5	2	03		Bangun guna serah
1	5	2	03	01	Bangun guna serah
1	5	2	03	02	Dst.....
1	5	2	04		Bangun serah guna
1	5	2	04	01	Bangun serah guna
1	5	3			Aset Tidak Berwujud
1	5	3	01		Goodwill
1	5	3	01	01	Goodwill
1	5	3	01	02	Dst.....
1	5	3	02		Lisensi dan frenchise
1	5	3	02	01	Lisensi dan frenchise
1	5	3	02	02	Dst.....
1	5	3	03		Hak Cipta
1	5	3	03	01	Hak Cipta
1	5	3	03	02	Dst.....
1	5	3	04		Paten
1	5	3	04	01	Paten
1	5	3	04	02	Dst.....
1	5	3	05		Aset Tidak Berwujud Lainnya
1	5	3	05	01	Software
1	5	3	05	02	Katikan
1	5	3	05	03	Dst.....
1	5	3	06		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	3	06	01	Akumulasi Amortisasi Goodwill
1	5	3	06	02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
1	5	3	06	03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1	5	3	06	04	Akumulasi Amortisasi Paten
1	5	3	06	05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
1	5	4			Aset Lain-lain
1	5	4	01		Aset Lain-lain
1	5	4	01	01	Aset Lain-lain.....
1	5	4	01	02	Dst.....
2					KEWAJIBAN
2	1				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	1			Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
2	1	1	01		Utang Taspen
2	1	1	01	01	Utang Taspen
2	1	1	02		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	1	02	01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan

2	1	1	03		Utang PPh Pusat
2	1	1	03	01	Utang PPh 21
2	1	1	03	02	Utang PPh 22
2	1	1	03	03	Utang PPh 23
2	1	1	03	04	Utang PPh 25
2	1	1	04		Utang PPN Pusat
2	1	1	04	01	Utang PPN Pusat
2	1	1	05		Utang Taperum
2	1	1	05	01	Utang Taperum
2	1	1	06		Utang iuran Wajib Pegawai
2	1	1	06	01	Utang iuran wajib Pegawai
2	1	1	07		Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2	1	1	07	01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2	1	1	08		Utang Jaminan
2	1	1	08	01	Utang Jaminan
2	1	2			Utang Bunga
2	1	2	01		Utang Bunga kepada Pemerintah
2	1	2	01	01	Utang Bunga kepada Pemerintah
2	1	2	02		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	02	01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	03		Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2	1	2	03	01	Utang Bunga Kepada BUMN
2	1	2	03	02	Utang Bunga Kepada BUMD
2	1	2	04		Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	2	04	01	Utang Bunga kepada Bank
2	1	2	04	02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	2	05		Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2	1	2	05	01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2	1	2	06		Utang Bunga Luar Negeri
2	1	2	06	01	Utang Bunga Luar Negeri
2	1	3			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	3	01		Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	1	3	01	01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	1	3	02		Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	02	01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	03		Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2	1	3	03	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2	1	3	03	02	Dst
2	1	3	04		Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	1	3	04	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	1	3	04	02	Dst
2	1	3	05		Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	3	05	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	3	05	02	Dst
2	1	4			Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	4	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	4	01	01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	4	01	02	Dst
2	1	4	02		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	4	02	01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	4	02	02	Dst
2	1	4	03		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	4	03	01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	4	03	02	Dst
2	1	4	04		Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2	1	4	04	01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2	1	4	04	02	Dst

2	1	5		Utang Belanja
2	1	5	01	Utang Belanja Pegawai
2	1	5	01 01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
2	1	5	02	Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	5	02 01	Utang Belanja Jasa
2	1	5	02 02	Utang Belanja Pemeliharaan
2	1	5	02 03	Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	5	02 04	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2	1	5	02 05	Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2	1	5	03	Utang Belanja Modal
2	1	5	03 01	Utang Belanja Modal Tanah
2	1	5	03 02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	5	03 03	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	5	03 04	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jalinan
2	1	5	03 05	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2	1	5	04	Utang Belanja Subsidi
2	1	5	04 01	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	5	04 02	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	5	04 03	Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
2	1	5	05	Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	5	05 01	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
2	1	5	05 02	Utang Transfer Lainnya
2	1	5	06	Utang Belanja Lain-lain
2	1	5	06 01	Utang Belanja Lain-lain
2	1	5	06 02	Dst
2	1	6		Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2	1	6	01 01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	6	01 02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	6	01 03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	6	01 04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah
2	1	6	02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	6	02 01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
2	1	6	02 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
2	1	6	02 03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	02 04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan
2	1	6	03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan yang Sah
2	1	6	03 01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	6	03 02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya
2	1	6	04	Utang Transfer
2	1	6	04 01	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
2	1	6	04 02	Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2	1	6	04 03	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	04 04	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
2	1	6	04 05	Utang Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
2	1	6	05	Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	05 01	Utang Jangka Pendek Lainnya
2	2			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	1		Utang Dalam Negeri
2	2	1	01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	01 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	02	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	02 01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	03	Utang Dalam Negeri-Obligasi
2	2	1	03 01	Utang Dalam Negeri-Obligasi
2	2	1	04	Utang Pemerintah Pusat
2	2	1	04 01	Utang Pemerintah Pusat
2	2	1	05	Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2	2	1	05 01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2	2	1	06	Utang Dalam Negeri Lainnya
2	2	1	06 01	Utang Dalam Negeri Lainnya

2	2	2			Utang Jangka Panjang Lainnya
2	2	2	01		Utang Jangka Panjang Lainnya
2	2	2	01	01	Utang Jangka Panjang Lainnya
3					EKUITAS
3	1				EKUITAS
3	1	1			EKUITAS
3	1	1	01		EKUITAS
3	1	1	01	01	EKUITAS
3	1	1	02		Surplus/Defisit - LO
3	1	1	02	01	Surplus/Defisit - LO
3	1	2			EKUITAS SAL
3	1	2	01		Estimasi Pendapatan
3	1	2	01	01	Estimasi Pendapatan
3	1	2	02		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	2	02	01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	2	03		Apropriasi Belanja
3	1	2	03	01	Apropriasi Belanja
3	1	2	04		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	2	04	01	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	2	05		Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	06		Surplus/Defisit - LRA
3	1	2	06	01	Surplus/Defisit - LRA
3	1	3			EKUITAS untuk Dikonsolidasikan
3	1	3	01		RK PPKD
3	1	3	01	01	RK PPKD
4					PENDAPATAN - LRA
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4	1	1			Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4	1	1	01	01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	1	01	02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	1	01	03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	1	01	04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	1	01	05	PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	1	01	06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	1	01	07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	1	01	08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	1	01	09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	1	01	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	1	01	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA
4	1	1	02	01	BBNKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	1	02	02	BBNKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	1	02	03	BBNKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	1	02	04	BBNKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	1	02	05	BBNKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	1	02	06	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	1	02	07	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	1	02	08	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	1	02	09	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	1	02	10	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	1	02	11	BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA
4	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA
4	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA
4	1	1	04		Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	1	05		Pajak Rokok - LRA
4	1	1	05	01	Pajak Rokok - LRA

4	1	1	06		Pajak Hotel - LRA
4	1	1	06	01	Hotel - LRA
4	1	1	06	02	Motel - LRA
4	1	1	06	03	Losmen - LRA
4	1	1	06	04	Gubuk Pariwisata - LRA
4	1	1	06	05	Wisma Pariwisata - LRA
4	1	1	06	06	Pesanggrahan - LRA
4	1	1	06	07	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA
4	1	1	06	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LRA
4	1	1	07		Pajak Restoran - LRA
4	1	1	07	01	Restoran - LRA
4	1	1	07	02	Rumah Makan - LRA
4	1	1	07	03	Kafetaria - LRA
4	1	1	07	04	Kantin - LRA
4	1	1	07	05	Warung - LRA
4	1	1	07	06	Bar - LRA
4	1	1	07	07	Jasa Boga/ Katering - LRA
4	1	1	08		Pajak Hiburan - LRA
4	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LRA
4	1	1	08	02	Paseleran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA
4	1	1	08	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LRA
4	1	1	08	04	Pameran - LRA
4	1	1	08	05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LRA
4	1	1	08	06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA
4	1	1	08	07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA
4	1	1	08	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4	1	1	08	09	Parti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness center) - LRA
4	1	1	08	10	Pertandingan Olahraga - LRA
4	1	1	09		Pajak Reklame - LRA
4	1	1	09	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4	1	1	09	02	Reklame Kain - LRA
4	1	1	09	03	Reklame Melekat/Stiker - LRA
4	1	1	09	04	Reklame Selebaran - LRA
4	1	1	09	05	Reklame Berjalan - LRA
4	1	1	09	06	Reklame Udara - LRA
4	1	1	09	07	Reklame Apung - LRA
4	1	1	09	08	Reklame Suara - LRA
4	1	1	09	09	Reklame Film/Slide - LRA
4	1	1	09	10	Reklame Peragaan - LRA
4	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA
4	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LRA
4	1	1	11		Pajak Parkir - LRA
4	1	1	11	01	Pajak Parkir - LRA
4	1	1	12		Pajak Air Tanah - LRA
4	1	1	12	01	Pajak Air Tanah - LRA
4	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	1	14	01	Asbes - LRA
4	1	1	14	02	Batu Tulis - LRA
4	1	1	14	03	Batu setengah permata - LRA
4	1	1	14	04	Batu Kapur - LRA
4	1	1	14	05	Batu Apung - LRA
4	1	1	14	06	Batu Permata - LRA
4	1	1	14	07	Bentonit - LRA
4	1	1	14	08	Dolomit - LRA
4	1	1	14	09	Feldspar - LRA
4	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LRA
4	1	1	14	11	Grafit - LRA
4	1	1	14	12	Granit/Andesit - LRA
4	1	1	14	13	Gips - LRA
4	1	1	14	14	Kalsit - LRA
4	1	1	14	15	Kaolin - LRA
4	1	1	14	16	Leusit - LRA
4	1	1	14	17	Magnesit - LRA
4	1	1	14	18	Mika - LRA
4	1	1	14	19	Marmer - LRA
4	1	1	14	20	Nitrat - LRA

4	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA
4	1	1	14	29	Tanah Diatom - LRA
4	1	1	14	30	Tanah Liat - LRA
4	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LRA
4	1	1	14	32	Tras - LRA
4	1	1	14	33	Yasrif - LRA
4	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
4	1	1	16	01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA
4	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LRA
4	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LRA
4	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LRA
4	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4	1	2	01	06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola
4	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan - LRA
4	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan
4	1	2	2	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LRA
4	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA
4	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil -
4	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LRA
4	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
4	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LRA
4	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LRA
4	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA
4	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LRA
4	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LRA
4	1	2	04	01	Pelayanan Pemakaman/Penguburan - LRA
4	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Penguburan/Penguburan Mayat - LRA
4	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	2	06	01	Pelataran - LRA
4	1	2	06	02	Los - LRA
4	1	2	06	03	Kios - LRA
4	1	2	07		Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	2	07	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA
4	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA
4	1	2	09	04	Dat.....
4	1	2	09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA
4	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LRA
4	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LRA
4	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LRA
4	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktural) - LRA
4	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	11		Retribusi Penolahan Limbah Cair - LRA
4	1	2	11	01	Rumah Tangga - LRA
4	1	2	11	02	Perkantoran - LRA
4	1	2	11	03	Industri - LRA

4	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya - LRA
4	1	2	12	02	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LRA
4	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LRA
4	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	2	14	01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA
4	1	2	15		Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah - LRA
4	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	2	15	02	Laboratorium - LRA
4	1	2	15	03	Ruangan - LRA
4	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA
4	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA
4	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA
4	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelanaan - LRA
4	1	2	17	01	Pelelanaan ikan - LRA
4	1	2	17	02	Pelelanaan Ternak - LRA
4	1	2	17	03	Pelelanaan Hasil Bumi - LRA
4	1	2	17	04	Pelelanaan Hasil Hutan - LRA
4	1	2	17	05	Jasa Pelelanaan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelanaan - LRA
4	1	2	18		Retribusi Terminal - LRA
4	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA
4	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LRA
4	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA
4	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa - LRA
4	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa - LRA
4	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LRA
4	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LRA
4	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA
4	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA
4	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
4	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4	1	2	23	03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4	1	2	24		Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4	1	2	24	01	Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA
4	1	2	24	02	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA
4	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	27	01	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA
4	1	2	29		Retribusi Izin Travek - LRA
4	1	2	29	01	Pemberian Izin Travek kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	29	02	Pemberian Izin Travek kepada Badan - LRA
4	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	30	02	Pemberian izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
4	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan tertentu - LRA
4	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu - LRA
4	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan
4	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempokerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA

4	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
					Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan
4	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN
4	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan
4	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
4	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah - LRA
4	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA
4	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
4	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA
4	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
4	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro - LRA
4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4	1	4	03	02	Jasa Giro Bendahara - LRA
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA
4	1	4	04		Pendapatan Bunga - LRA
4	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito..... - LRA
4	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir..... - LRA
4	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
4	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LRA
4	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA
4	1	4	06		Komis, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari..... - LRA
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari..... - LRA
4	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan..... - LRA
4	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak - LRA
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Bumi - LRA
4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
4	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
4	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
4	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA
4	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
4	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LRA
4	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA

Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
4	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA
4	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	4	10	01	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	02	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	03	Pendapatan Denda Kerasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4	1	4	13		Pendapatan dari Penjualan
4	1	4	13	01	Pendapatan dari Penjualan Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4	1	4	13	02	Pendapatan Dari Penjualan Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4	1	4	13	03	Pendapatan Dari Penjualan Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
4	1	4	13	04	Pendapatan Dari Penjualan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
4	1	4	14		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4	1	4	14	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
4	1	4	14	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA
4	1	4	15		Pendapatan dari Ansuran/Cicilan Penjualan - LRA
4	1	4	15	01	Ansuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA
4	1	4	15	02	Ansuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4	1	4	16		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	16	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4	1	4	16	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerasama Pemanfaatan - LRA
4	1	4	16	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	16	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	17		Pendapatan Zakat* - LRA
4	1	4	17	01	Pendapatan Zakat* - LRA
4	1	4	18		Pendapatan BLUD - LRA
4	1	4	18	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
4	1	4	18	02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA
4	1	4	18	03	Pendapatan Hasil Kerasama BLUD - LRA
4	1	4	19		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	1	4	19	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	2				PENDAPATAN TRANSFER - LRA
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
4	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Peneusahaan Hutan - LRA
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA

4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
4	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LRA
4	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
4	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
4	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
4	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
4	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LRA
4	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA
4	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LRA
4	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA
4	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LRA
4	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
4	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA
4	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Pedesaan - LRA
4	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LRA
4	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA
4	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LRA
4	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA
4	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA
4	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LRA
4	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4	2	2	01		Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur - LRA
4	2	2	02		Dana Keistimewaan - LRA
4	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LRA**
4	2	2	03		Dana Penyesuaian - LRA
4	2	2	03	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
4	2	2	03	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4	2	2	03	03	Dana Insentif Daerah - LRA
4	2	2	03	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA
4	2	2	03	05	Bantuan Operasional Sekolah - LRA***
4	2	3			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	2	3	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	3	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	3	02		Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA
4	2	3	02	01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA
4	2	3	03		Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	3	03	01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	4			Bantuan Keuangan - LRA
4	2	4	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
4	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA
4	2	4	02		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4	2	4	03		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA - LRA
4	3	1			Pendapatan Hibah - LRA
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA
4	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA

4	3	2		Dana Darurat - LRA
4	3	2	01	Dana Darurat - LRA
4	3	2	01 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4	3	3		Pendapatan Lainnya - LRA
4	3	3	01	Pendapatan Lainnya - LRA
4	3	3	01 01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA
5				BELANJA
5	1			BELANJA OPERASI
5	1	1		Belanja Pegawai
5	1	1	01	Belanja Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	01 04	Tunjangan Fungsional
5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum
5	1	1	01 06	Tunjangan Beras
5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji
5	1	1	01 09	Juran Jaminan Kesehatan
5	1	1	01 10	Uang Paket
5	1	1	01 11	Tunjangan Badan Musyawarah
5	1	1	01 12	Tunjangan Komisi
5	1	1	01 13	Tunjangan Badan Anggaran
5	1	1	01 14	Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	01 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01 16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	01 17	Uang Duka Wafat/Tewas
5	1	1	01 18	Uang Jasa Penguburan
5	1	1	01 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	01 20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5	1	1	02	Belanja Tambahan Peningkatan PNS
5	1	1	02 01	Tambahan Peningkatan berdasarkan beban kerja
5	1	1	02 02	Tambahan Peningkatan berdasarkan tempat bertugas
5	1	1	02 03	Tambahan Peningkatan berdasarkan kondisi kerja
5	1	1	02 04	Tambahan Peningkatan berdasarkan kelangkaan profesi
5	1	1	03	Belanja Peningkatan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	03 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5	1	1	04 01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5	1	1	04 02	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5	1	1	04 03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5	1	1	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	05 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	05 02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	05 03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	05 04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
5	1	1	05 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
5	1	1	05 06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5	1	1	05 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5	1	1	05 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5	1	1	05 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5	1	1	05 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
5	1	1	05 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
5	1	1	05 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
5	1	1	05 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA
5	1	1	05 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
5	1	1	05 15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5	1	1	05 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
5	1	1	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA
5	1	1	06 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
5	1	1	06 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
5	1	1	06 04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LRA
5	1	1	06 05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
5	1	1	06 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA
5	1	1	06 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	06 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
5	1	1	06 09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
5	1	1	06 10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
5	1	1	06 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengelolaan Limbah Cair - LRA
5	1	1	06 12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA

Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA
5	1	1	06	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pensendalan Menara Telekomunikasi - LRA
5	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
5	1	1	06	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
5	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Petelangan - LRA
5	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA
5	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA
5	1	1	06	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
5	1	1	06	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA
5	1	1	06	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Keelabuhan - LRA
5	1	1	06	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
5	1	1	06	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air - LRA
5	1	1	06	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
5	1	1	06	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
5	1	1	06	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
5	1	1	06	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA
5	1	1	06	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
5	1	1	06	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA
5	1	1	06	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pensendalan Lalu Lintas - LRA
5	1	1	06	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pensendalan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
5	1	1	07		Uang Lembur
5	1	1	07	01	Uang Lembur PNS
5	1	1	07	02	Uang Lembur Non PNS
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis
5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor
5	1	2	01	02	Belanja dokumen/administrasi tender
5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5	1	2	01	04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	1	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas
5	1	2	02		Belanja Bahan/Material
5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan
5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman
5	1	2	02	03	Belanja bibit ternak
5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan
5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia
5	1	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor
5	1	2	03	01	Belanja telepon
5	1	2	03	02	Belanja air
5	1	2	03	03	Belanja listrik
5	1	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5	1	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah
5	1	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/Internet
5	1	2	03	07	Belanja paket/pengiriman
5	1	2	03	08	Belanja Sertifikasi
5	1	2	03	09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	1	2	03	10	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Peneranaan Jalan Umum
5	1	2	03	11	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	2	04		Belanja Premi Asuransi
5	1	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5	1	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	01	Belanja Jasa Service
5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5	1	2	05	04	Belanja Jasa KIR
5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan
5	1	2	06	01	Belanja cetak
5	1	2	06	02	Belanja Penggandaan
5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5	1	2	07	01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5	1	2	07	04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5	1	2	08	02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5	1	2	08	03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5	1	2	09		Belanja Sewa Alat Berat
5	1	2	09	01	Belanja sewa Eskavator
5	1	2	09	02	Belanja sewa Buldoser
5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	1	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer
5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	1	2	10	04	Belanja sewa generator
5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman
5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat
5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu
5	1	2	11	04	Belanja makanan dan minuman pelatihan
5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	12	01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan
5	1	2	14		Belanja Pakaian khusus dari hari-hari tertentu
5	1	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI
5	1	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah
5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional
5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga
5	1	2	15		Belanja Peralatan Dinas
5	1	2	15	01	Belanja peralatan dinas dalam daerah
5	1	2	15	02	Belanja peralatan dinas luar daerah
5	1	2	15	03	Belanja peralatan dinas luar negeri
5	1	2	16		Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5	1	2	16	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5	1	2	16	02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5	1	2	17		Belanja Pemulangan Pegawai
5	1	2	17	01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5	1	2	17	02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan
5	1	2	18	01	Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi
5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	21		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	21	01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5	1	2	21	02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	22	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	1	2	22	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	1	2	22	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	1	2	22	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3

5	1	2	23	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5	1	2	23 01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5	1	2	23 02	Belanja sosialisasi
5	1	2	23 03	Belanja bimbingan teknis
5	1	2	24	Belanja Honorarium Non Pegawai
5	1	2	24 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5	1	2	24 02	Moderator
5	1	2	25	Honorarium PNS
5	1	2	25 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	1	2	25 02	Honorarium Tim Penadaan Barang dan Jasa
5	1	2	25 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	26	Honorarium non PNS
5	1	2	26 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	26 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap
5	1	2	27	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	2	27 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5	1	2	27 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5	1	3		Belanja Bunga
5	1	3	01	Bunga Utang Pinjaman
5	1	3	01 01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	3	01 02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	3	01 03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	3	01 04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	3	01 05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5	1	3	02	Bunga Utang Obligasi
5	1	3	02 01	Bunga Utang Obligasi
5	1	4		Belanja Subsidi
5	1	4	01	Belanja Subsidi
5	1	4	01 01	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	01 02	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	01 03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5	1	5		Belanja Hibah
5	1	5	01	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	01 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	5	02 01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5	1	5	02 02	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5	1	5	02 03	Hibah kepada Pemerintah Kota
5	1	5	03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	03 01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	04 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	05 01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***
5	1	5	06 01	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
5	1	6		Belanja Bantuan Sosial
5	1	6	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	01 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	01 02	Dst
5	1	6	02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5	1	6	02 01	Belanja Bantuan Sosial kepada
5	1	6	02 02	Dst
5	2			BELANJA MODAL
5	2	1		Belanja Modal Tanah
5	2	1	01	Belanja modal Penadaan Tanah Perkampungan
5	2	1	01 01	Belanja modal Penadaan Tanah Kampung
5	2	1	01 02	Belanja modal Penadaan Tanah Emplasmen
5	2	1	01 03	Belanja modal Penadaan Tanah Kuburan
5	2	1	01 04	Dst

5	2	1	02	Belanja modal	Pengadaan Tanah Pertanian
5	2	1	02.01	Belanja modal	Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5	2	1	02.02	Belanja modal	Pengadaan Tanah Tegalan
5	2	1	02.03	Belanja modal	Pengadaan Tanah Ladang
5	2	1	03	Belanja modal	Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	03.01	Belanja modal	Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	04	Belanja modal	Pengadaan Kebun Campuran
5	2	1	04.01	Belanja modal	Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5	2	1	04.02	Belanja modal	Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5	2	1	05	Belanja modal	Pengadaan Hutan
5	2	1	05.01	Belanja modal	Pengadaan Hutan Lebat
5	2	1	05.02	Belanja modal	Pengadaan Hutan Belukar
5	2	1	05.03	Belanja modal	Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5	2	1	05.04	Belanja modal	Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5	2	1	05.05	Belanja modal	Pengadaan Hutan Untuk Peneusahaan Khusus
5	2	1	06	Belanja modal	Pengadaan Kolam Ikan
5	2	1	06.01	Belanja modal	Pengadaan Tambak
5	2	1	06.02	Belanja modal	Pengadaan Air Tawar
5	2	1	07	Belanja modal	Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5	2	1	07.01	Belanja modal	Pengadaan tanah Rawa
5	2	1	07.02	Belanja modal	Pengadaan tanah Danau
5	2	1	08	Belanja modal	Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5	2	1	08.01	Belanja modal	Pengadaan Tanah Tandus
5	2	1	08.02	Belanja modal	Pengadaan Tanah Rusak
5	2	1	09	Belanja modal	Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumpuk
5	2	1	09.01	Belanja modal	Pengadaan tanah Alang-alang
5	2	1	09.02	Belanja modal	Pengadaan Tanah Padang Rumpuk
5	2	1	10	Belanja modal	Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5	2	1	10.01	Belanja modal	Pengadaan Tanah Pengguna Lain...
5	2	1	11	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5	2	1	11.01	Belanja modal	Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	2	1	11.02	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	1	11.03	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5	2	1	11.04	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5	2	1	11.05	Belanja modal	Pengadaan Tanah Kosong
5	2	1	11.06	Belanja modal	Pengadaan Tanah Peternakan
5	2	1	11.07	Belanja modal	Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5	2	1	11.08	Belanja modal	Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5	2	1	11.09	Belanja modal	Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5	2	1	12	Belanja modal	Pengadaan Tanah Pertambangan
5	2	1	12.01	Belanja modal	Pengadaan Pertambangan
5	2	1	13	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5	2	1	13.01	Belanja modal	Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5	2	1	13.02	Belanja modal	Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5	2	1	13.03	Belanja modal	Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5	2	1	13.04	Belanja modal	Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	1	13.05	Belanja modal	Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	1	13.06	Belanja modal	Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5	2	1	13.07	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5	2	1	13.08	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5	2	1	13.09	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5	2	1	13.10	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5	2	1	13.11	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Berseluruh
5	2	1	13.12	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5	2	1	13.13	Belanja modal	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	2		Belanja Modal	Peralatan dan Mesin
5	2	2	01	Belanja modal	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5	2	2	01.01	Belanja modal	Pengadaan Tractor
5	2	2	01.02	Belanja modal	Pengadaan Grader
5	2	2	01.03	Belanja modal	Pengadaan Excavator
5	2	2	01.04	Belanja modal	Pengadaan Pile Driver
5	2	2	01.05	Belanja modal	Pengadaan Hauler
5	2	2	01.06	Belanja modal	Pengadaan Asphalt Equipment
5	2	2	01.07	Belanja modal	Pengadaan Compacting Equipment
5	2	2	01.08	Belanja modal	Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5	2	2	01.09	Belanja modal	Pengadaan Loader

5	2	2	01	10	Belanja modal	Pengadaan Alat Pengangkat
5	2	2	01	11	Belanja modal	Pengadaan Mesin Proses
5	2	2	02		Belanja modal	Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5	2	2	02	01	Belanja modal	Pengadaan Dredger
5	2	2	02	02	Belanja modal	Pengadaan Floating Excavator
5	2	2	02	03	Belanja modal	Pengadaan Amphibi Dredger
5	2	2	02	04	Belanja modal	Pengadaan Kapal Tarik
5	2	2	02	05	Belanja modal	Pengadaan Mesin Proses Apung
5	2	2	03		Belanja modal	Pengadaan Alat-alat Bantu
5	2	2	03	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Penarik
5	2	2	03	02	Belanja modal	Pengadaan Feeder
5	2	2	03	03	Belanja modal	Pengadaan Compressor
5	2	2	03	04	Belanja modal	Pengadaan Electric Generating Set
5	2	2	03	05	Belanja modal	Pengadaan Pompa
5	2	2	03	06	Belanja modal	Pengadaan Mesin Bor
5	2	2	03	07	Belanja modal	Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	2	03	08	Belanja modal	Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	2	03	09	Belanja modal	Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5	2	2	04		Belanja modal	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	04	01	Belanja modal	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	2	04	02	Belanja modal	Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	2	04	03	Belanja modal	Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	04	04	Belanja modal	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	2	04	05	Belanja modal	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	2	04	06	Belanja modal	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	2	05		Belanja modal	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	05	01	Belanja modal	Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	05	02	Belanja modal	Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5	2	2	06		Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5	2	2	06	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5	2	2	06	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5	2	2	06	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5	2	2	07		Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5	2	2	07	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5	2	2	07	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5	2	2	07	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	2	08		Belanja modal	Pengadaan Alat Angkut Udara
5	2	2	08	01	Belanja modal	Pengadaan Pesawat Terbang
5	2	2	09		Belanja modal	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	09	01	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5	2	2	09	02	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5	2	2	09	03	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	09	04	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	2	09	05	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	2	09	06	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5	2	2	09	07	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5	2	2	09	08	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Las
5	2	2	09	09	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5	2	2	10		Belanja modal	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	10	01	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	2	10	02	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	10	03	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	2	10	04	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Pengangkat
5	2	2	10	05	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5	2	2	10	06	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5	2	2	10	07	Belanja modal	Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5	2	2	10	08	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5	2	2	10	09	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5	2	2	10	10	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5	2	2	10	11	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Ukur, Gie & Feting
5	2	2	11		Belanja modal	Pengadaan Alat Ukur
5	2	2	11	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Ukur universal
5	2	2	11	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5	2	2	11	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Keoribadian
5	2	2	11	04	Belanja modal	Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5	2	2	11	05	Belanja modal	Pengadaan Alat Calibrasi
5	2	2	11	06	Belanja modal	Pengadaan Oscilloscope
5	2	2	11	07	Belanja modal	Pengadaan Universal Tester
5	2	2	11	08	Belanja modal	Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5	2	2	11	09	Belanja modal	Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5	2	2	11	10	Belanja modal	Pengadaan Alat Timbangan/Biora
5	2	2	11	11	Belanja modal	Pengadaan Anak Timbangan/Biasa

5	2	2	11	14	Belanja modal	Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5	2	2	11	15	Belanja modal	Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
5	2	2	12		Belanja modal	Pengadaan Alat Pengolahan
5	2	2	12	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Pengolahan Lahan dan Tanaman
5	2	2	12	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5	2	2	12	03	Belanja modal	Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5	2	2	12	04	Belanja modal	Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	2	12	05	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	2	12	06	Belanja modal	Pengadaan Alat Prosesing
5	2	2	12	07	Belanja modal	Pengadaan Alat Pasca Panen
5	2	2	12	08	Belanja modal	Pengadaan Alat Produksi Perikanan
5	2	2	13		Belanja modal	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5	2	2	13	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5	2	2	13	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Panen
5	2	2	13	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Penyimpanan
5	2	2	13	04	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium
5	2	2	13	05	Belanja modal	Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5	2	2	14		Belanja modal	Pengadaan Alat Kantor
5	2	2	14	01	Belanja modal	Pengadaan Mesin Ketik
5	2	2	14	02	Belanja modal	Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5	2	2	14	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Reproduksi (Penganda)
5	2	2	14	04	Belanja modal	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5	2	2	14	05	Belanja modal	Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5	2	2	15		Belanja modal	Pengadaan Alat Rumah Tangga
5	2	2	15	01	Belanja modal	Pengadaan Meubelair
5	2	2	15	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5	2	2	15	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Pembersih
5	2	2	15	04	Belanja modal	Pengadaan Alat Pendingin
5	2	2	15	05	Belanja modal	Pengadaan Alat Dapur
5	2	2	15	06	Belanja modal	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	2	2	15	07	Belanja modal	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5	2	2	16		Belanja modal	Pengadaan Komputer
5	2	2	16	01	Belanja modal	Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5	2	2	16	02	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5	2	2	16	03	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5	2	2	16	04	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5	2	2	16	05	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Jaringan
5	2	2	17		Belanja modal	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	17	01	Belanja modal	Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	02	Belanja modal	Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5	2	2	17	03	Belanja modal	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5	2	2	17	04	Belanja modal	Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5	2	2	17	05	Belanja modal	Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	06	Belanja modal	Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	2	2	17	07	Belanja modal	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	2	18		Belanja modal	Pengadaan Alat Studio
5	2	2	18	01	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Studio Visual
5	2	2	18	02	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5	2	2	18	03	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5	2	2	18	04	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Cetak
5	2	2	18	05	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Computing
5	2	2	18	06	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5	2	2	19		Belanja modal	Pengadaan Alat Komunikasi
5	2	2	19	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5	2	2	19	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	2	19	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	2	19	04	Belanja modal	Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	2	19	05	Belanja modal	Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	2	19	06	Belanja modal	Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5	2	2	19	07	Belanja modal	Pengadaan Alat alat Sani
5	2	2	20		Belanja modal	Pengadaan Peralatan Pemancar
5	2	2	20	01	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	2	20	02	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	2	20	03	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	2	20	04	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5	2	2	20	05	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5	2	2	20	06	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5	2	2	20	07	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5	2	2	20	08	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5	2	2	20	09	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Antena UHF
5	2	2	20	10	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola

5	2	2	23	39	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Proses Teknologi Textil
5	2	2	23	40	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Uji Tekstil
5	2	2	23	41	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Proses Teknologi Keramik
5	2	2	23	42	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Proses Teknologi Kulit Karet
5	2	2	23	43	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Uji Kulit, Karet dan Plastik
5	2	2	23	44	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Uji Keramik
5	2	2	23	45	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Proses Teknologi Selulosa
5	2	2	23	46	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Pertanian
5	2	2	23	47	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Pertanian A
5	2	2	23	48	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Pertanian B
5	2	2	23	49	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Elektronika dan Daya
5	2	2	23	50	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Energi Surya
5	2	2	23	51	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Konversi Batubara dan Biomas
5	2	2	23	52	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Oceanografi
5	2	2	23	53	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Lingkungan Perairan
5	2	2	23	54	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Biologi Peralatan
5	2	2	23	55	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Biologi
5	2	2	23	56	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Geofisika
5	2	2	23	57	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Tambang
5	2	2	23	58	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Proses/Teknik Kimia
5	2	2	23	59	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Proses Industri
5	2	2	23	60	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Kesehatan Keria
5	2	2	23	61	Belanja modal	Pengadaan Laboratorium	Kearsipan
5	2	2	23	62	Belanja modal	Pengadaan Laboratorium	Hematologi & Urinalisis
5	2	2	23	63	Belanja modal	Pengadaan Laboratorium	Hematologi & Urinalisis A
5	2	2	23	64	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Lainnya
5	2	2	24		Belanja modal	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
5	2	2	24	01	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	Bahasa Indonesia
5	2	2	24	02	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	Matematika
5	2	2	24	03	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	IPA Dasar
5	2	2	24	04	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	IPA Lanjutan
5	2	2	24	05	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	IPA Menengah
5	2	2	24	06	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	IPA Atas
5	2	2	24	07	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	IPS
5	2	2	24	08	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	Agama Islam
5	2	2	24	09	Belanja modal	Pengadaan Bidang Studi :	Ketransportasi
5	2	2	25		Belanja modal	Pengadaan Unit Alat Laboratorium	Kimia Nuklir
5	2	2	25	01	Belanja modal	Pengadaan Analytical Instrument	
5	2	2	25	02	Belanja modal	Pengadaan Instrument Probe/Sensor	
5	2	2	25	03	Belanja modal	Pengadaan General Laboratory Tool	
5	2	2	25	04	Belanja modal	Pengadaan Instrument Probe/Sensor A	
5	2	2	25	05	Belanja modal	Pengadaan Glassware Plastic/Utensils	
5	2	2	25	06	Belanja modal	Pengadaan Laboratory Safety Equipment	
5	2	2	26		Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Fisika Nuklir / Elektronika
5	2	2	26	01	Belanja modal	Pengadaan Radiation Detector	
5	2	2	26	02	Belanja modal	Pengadaan Modular Counting and Scientific	
5	2	2	26	03	Belanja modal	Pengadaan Assembly/Accounting System	
5	2	2	26	04	Belanja modal	Pengadaan Recorder Display	
5	2	2	26	05	Belanja modal	Pengadaan System/Power Supply	
5	2	2	26	06	Belanja modal	Pengadaan Measuring / Testing Device	
5	2	2	26	07	Belanja modal	Pengadaan Opto Electronics	
5	2	2	26	08	Belanja modal	Pengadaan Accelerator	
5	2	2	26	09	Belanja modal	Pengadaan Reactor Experimental System	
5	2	2	27		Belanja modal	Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
5	2	2	27	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
5	2	2	27	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Kesehatan Keria	
5	2	2	27	03	Belanja modal	Pengadaan Proteksi Lingkungan	
5	2	2	27	04	Belanja modal	Pengadaan Meteorological Equipment	
5	2	2	27	05	Belanja modal	Pengadaan Sumber Radiasi	
5	2	2	28		Belanja modal	Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing	
5	2	2	28	01	Belanja modal	Pengadaan Radiation Application Equipment	
5	2	2	28	02	Belanja modal	Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device	
5	2	2	28	03	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	
5	2	2	28	04	Belanja modal	Pengadaan Peralatan Hidrologi	
5	2	2	29		Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Lingkungan Hidup
5	2	2	29	01	Belanja modal	Pengadaan Alat laboratorium	Kualitas Air dan tanah
5	2	2	29	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Kualitas udara
5	2	2	29	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Kebisingan dan Getaran
5	2	2	29	04	Belanja modal	Pengadaan Laboratorium	Lingkungan
5	2	2	29	05	Belanja modal	Pengadaan Alat Laboratorium	Penunjang

5	2	2	20	11	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translasi VHF/VHF
5	2	2	20	12	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translasi UHF/UHF
5	2	2	20	13	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translasi VHF/UHF
5	2	2	20	14	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translasi UHF/VHF
5	2	2	20	15	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave FPU
5	2	2	20	16	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave Terrestrial
5	2	2	20	17	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave TVRO
5	2	2	20	18	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
5	2	2	20	19	Belanja modal Pengadaan Switcher Antena
5	2	2	20	20	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
5	2	2	20	21	Belanja modal Pengadaan Feeder
5	2	2	20	22	Belanja modal Pengadaan Humidity Control
5	2	2	20	23	Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment
5	2	2	20	24	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5	2	2	21	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5	2	2	21	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5	2	2	21	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5	2	2	21	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	2	21	04	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5	2	2	21	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5	2	2	21	06	Belanja modal Pengadaan Alat Rotasi
5	2	2	21	07	Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi
5	2	2	21	08	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
5	2	2	21	09	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	2	21	10	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	2	2	21	11	Belanja modal Pengadaan Mortuary
5	2	2	21	12	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5	2	2	21	13	Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set
5	2	2	21	14	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5	2	2	21	15	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (svara)
5	2	2	21	16	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5	2	2	21	17	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5	2	2	21	18	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5	2	2	21	19	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	2	21	20	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	2	2	21	21	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5	2	2	21	22	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5	2	2	22	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5	2	2	22	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5	2	2	22	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	2	22	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	2	22	04	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5	2	2	22	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5	2	2	22	06	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5	2	2	23	01	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5	2	2	23	01	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5	2	2	23	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	2	23	03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5	2	2	23	04	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5	2	2	23	05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan/Geologi
5	2	2	23	06	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	2	23	07	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat D Kimia
5	2	2	23	08	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5	2	2	23	09	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cokok Tanam
5	2	2	23	10	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5	2	2	23	11	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5	2	2	23	12	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5	2	2	23	13	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5	2	2	23	14	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5	2	2	23	15	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	2	23	16	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5	2	2	23	17	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi A
5	2	2	23	18	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5	2	2	23	19	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5	2	2	23	20	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5	2	2	23	21	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
5	2	2	23	22	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5	2	2	23	23	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan
5	2	2	23	24	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5	2	2	23	25	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5	2	2	23	26	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika

5	2	2	30		Belanja modal	Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	30	01	Belanja modal	Pengadaan Towing Carriase
5	2	2	30	02	Belanja modal	Pengadaan Wave Generator and Absorber
5	2	2	30	03	Belanja modal	Pengadaan Data Acquisition and Analyzing System
5	2	2	30	04	Belanja modal	Pengadaan Cavitation Tunnel
5	2	2	30	05	Belanja modal	Pengadaan Overhead Cranes
5	2	2	30	06	Belanja modal	Pengadaan Peralatan umum
5	2	2	30	07	Belanja modal	Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5	2	2	30	08	Belanja modal	Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5	2	2	30	09	Belanja modal	Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5	2	2	30	10	Belanja modal	Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5	2	2	30	11	Belanja modal	Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5	2	2	30	12	Belanja modal	Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5	2	2	30	13	Belanja modal	Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5	2	2	30	14	Belanja modal	Pengadaan MOB
5	2	2	30	15	Belanja modal	Pengadaan Photo and Film Equipment
5	2	2	31		Belanja modal	Pengadaan Senjata Api
5	2	2	31	01	Belanja modal	Pengadaan Senjata Gerakam
5	2	2	31	02	Belanja modal	Senjata Pinggang
5	2	2	31	03	Belanja modal	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5	2	2	31	04	Belanja modal	Senapan Mesin
5	2	2	31	05	Belanja modal	Mortir
5	2	2	31	06	Belanja modal	Anti Lapis Baja
5	2	2	31	07	Belanja modal	Artilleri Medan (Armed)
5	2	2	31	08	Belanja modal	Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)
5	2	2	31	09	Belanja modal	Peluru Kendali/Rudal
5	2	2	31	10	Belanja modal	Kavaleri
5	2	2	31	11	Belanja modal	Senjata Lain-lain
5	2	2	32		Belanja modal	Pengadaan Peralengkapan Non Senjata Api
5	2	2	32	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Keamanan
5	2	2	32	02	Belanja modal	Pengadaan Non Senjata Api
5	2	2	33		Belanja modal	Pengadaan Amunisi
5	2	2	33	01	Belanja modal	Pengadaan Amunisi Umum
5	2	2	33	02	Belanja modal	Pengadaan Amunisi Darat
5	2	2	34		Belanja modal	Pengadaan Senjata Sinar
5	2	2	34	01	Belanja modal	Pengadaan Laser
5	2	2	35		Belanja modal	Pengadaan Alat Keamanan dan Pertahanan
5	2	2	35	01	Belanja modal	Pengadaan Alat Bantu Keamanan
5	2	2	35	02	Belanja modal	Pengadaan Alat Perlindungan
5	2	2	35	03	Belanja modal	Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
5	2	3			Belanja Modal	Gedung dan Bangunan
5	2	3	01		Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	01	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5	2	3	01	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gudang
5	2	3	01	03	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5	2	3	01	04	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5	2	3	01	05	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	3	01	06	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Kesehatan
5	2	3	01	07	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opseratorium
5	2	3	01	08	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	3	01	09	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	3	01	10	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	3	01	11	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5	2	3	01	12	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	01	13	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5	2	3	01	14	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	3	01	15	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5	2	3	01	16	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5	2	3	01	17	Belanja modal	Pengadaan bangunan Stasiun Bus
5	2	3	01	18	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5	2	3	01	19	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	3	01	20	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5	2	3	01	21	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5	2	3	01	22	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Pengujian Kelangkaan
5	2	3	01	23	Belanja modal	Pengadaan Bangunan Lembaga Masyarakat

5	2	3	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	02	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	2	3	02	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5	2	3	02	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5	2	3	02	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	3	02	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
5	2	3	02	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5	2	3	02	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5	2	3	02	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5	2	3	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
5	2	3	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	2	3	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5	2	3	03	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	3	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	2	3	04	01	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5	2	3	04	02	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5	2	3	04	03	Belanja modal Pengadaan Rumah Peninggalan Sejarah
5	2	3	04	04	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
5	2	3	04	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5	2	3	05		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	05	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5	2	3	05	02	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5	2	3	05	03	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya
5	2	3	06		Belanja modal Pengadaan Candi
5	2	3	06	01	Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu
5	2	3	06	02	Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5	2	3	06	03	Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya
5	2	3	07		Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah
5	2	3	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya
5	2	3	08		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	08	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	09		Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	09	01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5	2	3	10		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5	2	3	10	01	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5	2	3	10	02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5	2	3	11		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	3	11	01	Belanja modal Pengadaan Runway/Threshold Light
5	2	3	11	02	Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	2	3	11	03	Belanja modal Pengadaan Approach Light
5	2	3	11	04	Belanja modal Pengadaan Runway Identification Light (RLLs)
5	2	3	11	05	Belanja modal Pengadaan Signal
5	2	3	11	06	Belanja modal Pengadaan Flood Light
5	2	4			Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jalinan
5	2	4	01		Belanja modal Pengadaan Jalan
5	2	4	01	01	Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5	2	4	01	02	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
5	2	4	01	03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5	2	4	01	04	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
5	2	4	01	05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus
5	2	4	01	06	Belanja modal Pengadaan Jalan Tol
5	2	4	01	07	Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta
5	2	4	01	08	Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	02		Belanja modal Pengadaan Jembatan
5	2	4	02	01	Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5	2	4	02	02	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi
5	2	4	02	03	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5	2	4	02	04	Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
5	2	4	02	05	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus
5	2	4	02	06	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5	2	4	02	07	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5	2	4	02	08	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	02	09	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan

5	2	4	03		Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air Irigasi
5	2	4	03	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Waduk
5	2	4	03	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengambilan Irigasi
5	2	4	03	03	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembawa Irigasi
5	2	4	03	04	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembuang Irigasi
5	2	4	03	05	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengaman Irigasi
5	2	4	03	06	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pelengkap Irigasi
5	2	4	04		Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air Pasang Surut
5	2	4	04	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Waduk
5	2	4	04	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengambilan Pasang Surut
5	2	4	04	03	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembawa Pasang Surut
5	2	4	04	04	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembuang Pasang Surut
5	2	4	04	05	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengaman Pasang Surut
5	2	4	04	06	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pelengkap Pasang Surut
5	2	4	04	07	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Sawah Pasang Surut
5	2	4	05		Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air Rawa
5	2	4	05	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air Pengembangan Rawa dan Poder
5	2	4	05	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengambilan Pasang Rawa
5	2	4	05	03	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembawa Pasang Rawa
5	2	4	05	04	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembuang Pasang Rawa
5	2	4	05	05	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengamanan Pasang Surut
5	2	4	05	06	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pelengkap Pasang Rawa
5	2	4	05	07	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Sawah Pengembangan Rawa
5	2	4	06		Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengaman Sungai dan Penanggulangan
5	2	4	06	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Waduk Penanggulangan Sungai
5	2	4	06	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengambilan Pengamanan Sungai
5	2	4	06	03	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembuang Pengaman
5	2	4	06	04	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembuang Pengaman Sungai
5	2	4	06	05	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengaman Pengamanan Sungai
5	2	4	06	06	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pelengkap Pengamanan Sungai
5	2	4	07		Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	4	07	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	03	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	04	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	05	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	06	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	2	4	08		Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air Bersih/Baku
5	2	4	08	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengambilan Air Bersih/Baku
5	2	4	08	03	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembawa Air Bersih
5	2	4	08	04	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	05	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	2	4	09		Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air Kotor
5	2	4	09	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembawa Air Kotor
5	2	4	09	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Waduk Air Kotor
5	2	4	09	03	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pembuang Air Kotor
5	2	4	09	04	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pengaman Air Kotor
5	2	4	09	05	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Pelengkap Air Kotor
5	2	4	10		Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air
5	2	4	10	01	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air Laut
5	2	4	10	02	Belanja modal	Pengadaan Bangunan	Air Tawar
5	2	4	11		Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Air Minum Bersih
5	2	4	11	01	Belanja modal	Pengadaan	Air Muka Tanah
5	2	4	11	02	Belanja modal	Pengadaan	Air Sumber /Mata Air
5	2	4	11	03	Belanja modal	Pengadaan	Air Tanah Dalam
5	2	4	11	04	Belanja modal	Pengadaan	Air Tanah Dangkal
5	2	4	11	05	Belanja modal	Pengadaan	Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	4	12		Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Air Kotor
5	2	4	12	01	Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Air Kotor
5	2	4	12	02	Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Air Buangan Industri
5	2	4	12	03	Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Air Buangan Pertanian
5	2	4	13		Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	13	01	Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Pengolahan Sampah Organik
5	2	4	13	02	Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	14		Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	14	01	Belanja modal	Pengadaan Instalasi	Pengolahan Bahan Bangunan

5	2	4	15		Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	4	15	01	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Air
5	2	4	15	02	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5	2	4	15	03	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
5	2	4	15	04	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	2	4	15	05	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	2	4	15	06	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	2	4	15	07	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	2	4	15	08	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	2	4	15	09	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Surva (PLTS)
5	2	4	15	10	Belanja modal	Pengadaan	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	2	4	15	11	Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga
5	2	4	16		Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Gardu Listrik
5	2	4	16	01	Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	4	16	02	Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	4	16	03	Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	2	4	17		Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Pertahanan
5	2	4	17	01	Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Pertahanan Di Darat
5	2	4	18		Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Gas
5	2	4	18	01	Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Gardu Gas
5	2	4	18	02	Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	4	19		Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Pengaman
5	2	4	19	01	Belanja modal	Pengadaan	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	2	4	20		Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Air Minum
5	2	4	20	01	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Pembawa
5	2	4	20	02	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Induk Distribusi
5	2	4	20	03	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Cabang Distribusi
5	2	4	20	04	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Sambungan Rumah
5	2	4	21		Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Listrik
5	2	4	21	01	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Transmisi
5	2	4	21	02	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Distribusi
5	2	4	22		Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Telepon
5	2	4	22	01	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Telepon Di atas Tanah
5	2	4	22	02	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5	2	4	22	03	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Telepon Didalam Air
5	2	4	23		Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Gas
5	2	4	23	01	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	4	23	02	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Pipa Distribusi
5	2	4	23	03	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan Pipa Dinas
5	2	4	23	04	Belanja modal	Pengadaan	Jaringan BBM
5	2	5			Belanja Modal	Aset Tetap Lainnya	
5	2	5	01		Belanja modal	Pengadaan	Buku
5	2	5	01	01	Belanja modal	Pengadaan	Umum
5	2	5	01	02	Belanja modal	Pengadaan	Filsafat
5	2	5	01	03	Belanja modal	Pengadaan	Agama
5	2	5	01	04	Belanja modal	Pengadaan	Ilmu Sosial
5	2	5	01	05	Belanja modal	Pengadaan	Ilmu Bahasa
5	2	5	01	06	Belanja modal	Pengadaan	Matematika & Pengetahuan alam
5	2	5	01	07	Belanja modal	Pengadaan	Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	5	01	08	Belanja modal	Pengadaan	Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5	2	5	01	09	Belanja modal	Pengadaan	Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5	2	5	02		Belanja modal	Pengadaan	Terbitan
5	2	5	02	01	Belanja modal	Pengadaan	Terbitan Berkala
5	2	5	02	02	Belanja modal	Pengadaan	Buku Laporan
5	2	5	03		Belanja modal	Pengadaan	Barang-Barang Perpustakaan
5	2	5	03	01	Belanja modal	Pengadaan	Peta
5	2	5	03	02	Belanja modal	Pengadaan	Naskah (Manuskrip)
5	2	5	03	03	Belanja modal	Pengadaan	Musik
5	2	5	03	04	Belanja modal	Pengadaan	Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	5	03	05	Belanja modal	Pengadaan	Three Dimensional Artetacs and Realita
5	2	5	03	06	Belanja modal	Pengadaan	Bentuk Micro (Microform)
5	2	5	03	07	Belanja modal	Pengadaan	Bekaman Suara
5	2	5	03	08	Belanja modal	Pengadaan	Berkas Komputer (Computer Files)
5	2	5	03	09	Belanja modal	Pengadaan	Film Bergerak dan Rekaman Video
5	2	5	03	10	Belanja modal	Pengadaan	Tarscalt

5	2	5	04		Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5	2	5	04	01	Belanja modal Pengadaan Pahatan
5	2	5	04	02	Belanja modal Pengadaan Lukisan
5	2	5	04	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian
5	2	5	04	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga
5	2	5	04	05	Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan
5	2	5	04	06	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen
5	2	5	04	07	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
5	2	5	04	08	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan
5	2	5	05		Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5	2	5	05	01	Belanja modal Pengadaan Senam
5	2	5	05	02	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
5	2	5	05	03	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5	2	5	05	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5	2	5	06		Belanja modal Pengadaan Hewan
5	2	5	06	01	Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak
5	2	5	06	02	Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas
5	2	5	06	03	Belanja modal Pengadaan Binatang Melata
5	2	5	06	04	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan
5	2	5	06	05	Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5	2	5	06	06	Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan
5	2	5	07		Belanja modal Pengadaan Tanaman
5	2	5	07	01	Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
5	2	5	07	02	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hortikultura
5	2	5	07	03	Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
5	2	5	07	04	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias
5	2	5	07	05	Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5	3				BELANJA TAK TERDUGA
5	3	1			Belanja Tak Terduga
5	3	1	01		Belanja Tak Terduga
5	3	1	01	01	Belanja Tak Terduga
6					TRANSFER
6	1				TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6	1	1			Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6	1	1	01		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	1	01	01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	2			Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6	1	2	01		Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	2	01	01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	2				TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6	2	1			Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	1	01		Bantuan Keuangan ke Provinsi
6	2	1	01	01	Bantuan Keuangan ke Provinsi
6	2	1	02		Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	1	02	01	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	2			Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01		Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01	01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	3			Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6	2	3	01		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	2	3	01	01	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	2	4			Transfer Dana Otonomi Khusus
6	2	4	01		Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
6	2	4	01	01	Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota

7					PEMBIAYAAN
7	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7	1	1			Penggunaan SILPA
7	1	1	01		Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
7	1	1	01	01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
7	1	2			Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan
7	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	01	01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN
7	1	3	01	02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD
7	1	3	01	03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
7	1	4			Pinjaman Dalam Negeri
7	1	4	01		Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	01	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	02		Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	02	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	03		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	03	01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	04		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	04	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	05		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	05	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	06		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	4	06	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	5			Penerimaan Kembali Piutang
7	1	5	01		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	02		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	02	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	03		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	03	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	04		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	04	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	05		Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	5	05	01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	6			Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	01		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	01	01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	02		Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	02	01	Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	03		Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	03	01	Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	04		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	04	01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	7			Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	01		Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	01	01	Pinjaman Luar Negeri
7	1	8			Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	01		Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	01	01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya

	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	01	01 Pembentukan Dana Cadangan
7	2	2		Penvertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7	2	2	01	Penvertaan Modal pada BUMN
7	2	2	01	01 Penvertaan Modal pada BUMN
7	2	2	02	Penvertaan Modal pada BUMD
7	2	2	02	01 Penvertaan Modal pada BUMD
7	2	2	03	Penvertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	2	03	01 Penvertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	3		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7	2	3	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	01	01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	02	01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	03	Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	03	01 Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	04	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	04	01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	05	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	05	01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	06	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	3	06	01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	4		Pemberian Pinjaman Daerah
7	2	4	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	01	01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	02	01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	03	01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	4	04	01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	5		Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7	2	5	01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	01	01 Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	02	Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	02	01 Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	03	01 Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	04	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7	2	5	04	01 Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7	2	6		Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	01	01 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	7		Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	01	01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
8				PENDAPATAN - LO
8	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8	1	1		Pendapatan Pajak Daerah - LO
8	1	1	01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8	1	1	01	01 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	1	01	02 PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	1	01	03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	1	01	04 PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	1	01	05 PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	1	01	06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	1	01	07 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO

8	1	1	01	08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	1	01	09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	1	01	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	1	01	11	PKB - Kendaraan bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8	1	1	02	01	BBNKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	1	02	02	BBNKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	1	02	03	BBNKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	1	02	04	BBNKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	1	02	05	BBNKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	1	02	06	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	1	02	07	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	1	02	08	BBNKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	1	02	09	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	1	02	10	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	1	02	11	BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium - LO
8	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO
8	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO
8	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas - LO
8	1	1	04		Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	05		Pajak Rokok - LO
8	1	1	05	01	Pajak Rokok - LO
8	1	1	06		Pajak Hotel - LO
8	1	1	06	01	Hotel - LO
8	1	1	06	02	Motel - LO
8	1	1	06	03	Losmen - LO
8	1	1	06	04	Gubuk Pariwisata - LO
8	1	1	06	05	Wisma Pariwisata - LO
8	1	1	06	06	Pesangrahan - LO
8	1	1	06	07	Rumah Penzinapan dan sejenisnya - LO
8	1	1	06	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO
8	1	1	07		Pajak Restoran - LO
8	1	1	07	01	Restoran - LO
8	1	1	07	02	Rumah Makan - LO
8	1	1	07	03	Kafetaria - LO
8	1	1	07	04	Kantin - LO
8	1	1	07	05	Warung - LO
8	1	1	07	06	Bar - LO
8	1	1	07	07	Jasa Boga/ Katering - LO
8	1	1	08		Pajak Hiburan - LO
8	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LO
8	1	1	08	02	Pertunjukan Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8	1	1	08	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO
8	1	1	08	04	Pameran - LO
8	1	1	08	05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO
8	1	1	08	06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8	1	1	08	07	Permainan Bilvar, Golf, Bowling - LO
8	1	1	08	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO
8	1	1	08	09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) - LO
8	1	1	08	10	Pertandingan Olahraga - LO
8	1	1	09		Pajak Reklame - LO
8	1	1	09	01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO
8	1	1	09	02	Pajak Reklame Kain - LO
8	1	1	09	03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO
8	1	1	09	04	Pajak Reklame Selebaran - LO
8	1	1	09	05	Pajak Reklame Serialan - LO
8	1	1	09	06	Pajak Reklame Udara - LO
8	1	1	09	07	Pajak Reklame Apung - LO
8	1	1	09	08	Pajak Reklame Suara - LO
8	1	1	09	09	Pajak Reklame Film/Slide - LO
8	1	1	09	10	Pajak Reklame Peragaan - LO
8	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasikan sendiri - LO
8	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO
8	1	1	11		Pajak Parkir - LO
8	1	1	11	01	Pajak Parkir - LO

8	1	1	12		Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	12	01	Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	13		Pajak Sarang burung walet - LO
8	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	1	14	01	Asbes - LO
8	1	1	14	02	Batu Tulis - LO
8	1	1	14	03	Batu setengah permata - LO
8	1	1	14	04	Batu Kapur - LO
8	1	1	14	05	Batu Apung - LO
8	1	1	14	06	Batu Permata - LO
8	1	1	14	07	Bentonit - LO
8	1	1	14	08	Dolomit - LO
8	1	1	14	09	Feldspar - LO
8	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LO
8	1	1	14	11	Grafit - LO
8	1	1	14	12	Granit/Andesit - LO
8	1	1	14	13	Gips - LO
8	1	1	14	14	Kalsit - LO
8	1	1	14	15	Kaolin - LO
8	1	1	14	16	Leusit - LO
8	1	1	14	17	Magnesit - LO
8	1	1	14	18	Mika - LO
8	1	1	14	19	Marmer - LO
8	1	1	14	20	Nitrat - LO
8	1	1	14	21	Opisidien - LO
8	1	1	14	22	Quartz - LO
8	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LO
8	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LO
8	1	1	14	25	Perlit - LO
8	1	1	14	26	Phospat - LO
8	1	1	14	27	Talk - LO
8	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8	1	1	14	29	Tanah Diatome - LO
8	1	1	14	30	Tanah Liat - LO
8	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8	1	1	16	01	BPHTB - Pemindahan Hak - LO
8	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
8	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LO
8	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LO
8	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LO
8	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LO
					Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi
8	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO
8	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LO
8	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO
8	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LO
8	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LO
8	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LO
8	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LO
8	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Penguburan Mayat - LO
8	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	2	06	01	Peletaran - LO
8	1	2	06	02	Los - LO
8	1	2	06	03	Kios - LO

8	1	2	07		Retribusi Peneulian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	2	07	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Peneulian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8	1	2	09		Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	2	09	01	Penediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8	1	2	09	02	Penediaan Peta Foto - LO
8	1	2	09	03	Penediaan Peta Digital - LO
8	1	2	09	04	Penediaan Peta Tematik - LO
8	1	2	09	05	Penediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8	1	2	10		Retribusi Penediaan dan/atau Penvedotan Kakus - LO
8	1	2	10	01	Penediaan dan/atau Penvedotan Kakus - LO
8	1	2	11		Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LO
8	1	2	11	01	Rumah Tangga - LO
8	1	2	11	02	Perkantoran - LO
8	1	2	11	03	Industri - LO
8	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	2	12	01	Peneulian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO
8	1	2	12	02	Peneulian dalam keadaan terbunkus - LO
8	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LO
8	1	2	14	01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO
8	1	2	15		Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah - LO
8	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8	1	2	15	02	Laboratorium - LO
8	1	2	15	03	Ruangan - LO
8	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	2	16	01	Penediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO
8	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
8	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LO
8	1	2	17	02	pelelangan Ternak - LO
8	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LO
8	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LO
8	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	18		Retribusi Terminal - LO
8	1	2	18	01	Pelayanan Penediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO
8	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO
8	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	20		Retribusi Tempat Penampungan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila - LO
8	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO
8	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LO
8	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO
8	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8	1	2	23	03	Pelayanan Tempat olahraga - LO

8	1	2	24		Retribusi Penyebrangan Air - LO
8	1	2	24	01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8	1	2	24	02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8	1	2	25		Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah - LO
8	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	27	01	Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8	1	2	29		Retribusi Izin Travel - LO
8	1	2	29	01	Pemberian Izin Travel kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	29	02	Pemberian Izin Travel kepada Badan - LO
8	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO
8	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan tertentu - LO
8	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu - LO
8	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor
8	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
8	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penvertaan modal pada
8	1	3	01	02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penvertaan modal pada
					Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penvertaan modal pada
8	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penvertaan modal pada
8	1	3	02	02	Dst
8	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penvertaan modal pada
8	1	3	03	02	Dst
8	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah - LO
8	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
8	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
8	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro - LO
8	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LO
8	1	4	03	02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8	1	4	03	04	Dst
8	1	4	04		Pendapatan Bunga - LO
8	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito - LO
8	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Dana Berakumulasi - LO
8	1	4	04	03	Dst
8	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO
8	1	4	06		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari - LO
8	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8	1	4	06	04	Dst
8	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8	1	4	07	02	Dst

8	1	4	08	Pendapatan Denda Pajak - LO
8	1	4	08 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8	1	4	08 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8	1	4	08 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8	1	4	08 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8	1	4	08 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8	1	4	08 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8	1	4	08 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	4	08 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8	1	4	08 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8	1	4	08 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	4	08 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	4	08 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	4	08 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8	1	4	09	Pendapatan Denda Retribusi - LO
8	1	4	09 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	4	09 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8	1	4	09 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
8	1	4	09 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LO
8	1	4	09 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	4	09 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	4	09 07	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	09 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	4	09 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	4	09 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	4	09 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	4	09 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	4	09 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	4	09 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	4	09 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	09 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	4	09 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	4	09 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8	1	4	09 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	4	09 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	4	09 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	4	09 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8	1	4	09 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO
8	1	4	09 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8	1	4	09 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	4	10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8	1	4	10 02	Pendapatan Denda Kerasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	10 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
8	1	4	11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8	1	4	11 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8	1	4	11 02	Dst
8	1	4	12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8	1	4	12 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa - LO
8	1	4	12 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembonekaran Reklame - LO
8	1	4	12 03	Dst
8	1	4	13	Pendapatan dari Pengembalian - LO
8	1	4	13 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8	1	4	13 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8	1	4	13 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8	1	4	13 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8	1	4	13 05	Dst
8	1	4	14	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8	1	4	14 01	Fasilitas Sosial - LO
8	1	4	14 02	Fasilitas Umum - LO
8	1	4	14 03	Dst
8	1	4	15	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8	1	4	15 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8	1	4	15 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8	1	4	15 03	Dst
8	1	4	16	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	16 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8	1	4	16 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	16 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO

8	1	4	17		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8	1	4	17	01	Ansuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8	1	4	17	02	Ansuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8	1	4	18		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan - LO
8	1	4	18	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	18	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8	1	4	19		Pendapatan Zakat* - LO
8	1	4	19	01	Pendapatan Zakat*..... - LO
8	1	4	20		Pendapatan BLUD - LO
8	1	4	20	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8	1	4	20	02	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8	1	4	20	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8	1	4	21		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	1	4	21	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	2				PENDAPATAN TRANSFER - LO
8	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
8	2	1	01		Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO
8	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
8	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO
					Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
8	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
8	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Peneusahaan Hutan - LO
8	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO
8	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Peneusahaan Perikanan - LO
8	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LO
8	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
8	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
8	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO
8	2	1	04	05	DAK Bidang Kelangka Berencana - LO
8	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LO
8	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LO
8	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LO
8	2	1	04	13	DAK Bidang Linekonek Hidup - LO
8	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LO
8	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LO
8	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
8	2	2	01		Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur - LO
8	2	2	02		Dana Keistimewaan - LO**
8	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LO

Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

8	2	2	03	Dana Penyesuaian - LO
8	2	2	03 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8	2	2	03 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8	2	2	03 03	Dana Insentif Daerah - LO
8	2	2	03 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8	2	2	03 05	Bantuan Operasional Sekolah - LO***
8	2	3		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	2	3	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	3	01 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak..... - LO
8	2	3	02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8	2	3	02 01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya..... - LO
8	2	3	03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
8	2	3	03 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
8	2	4		Bantuan Keuangan - LO
8	2	4	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8	2	4	01 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO
8	2	4	02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8	2	4	02 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8	2	4	03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
8	2	4	03 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
8	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8	3	1		Pendapatan Hibah - LO
8	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	02 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8	3	1	03 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri..... - LO
8	3	1	04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO
8	3	1	04 01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
8	3	1	04 02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
8	3	2		Dana Darurat - LO
8	3	2	01	Dana Darurat - LO
8	3	2	01 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8	3	3		Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01	Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01 01	Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01 02	Dst
8	4			SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8	4	1		Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8	4	1	01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8	4	1	01 01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8	4	1	01 02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8	4	1	01 03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8	4	1	01 04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8	4	1	01 05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8	4	1	01 06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8	4	1	01 07	Dst
8	4	2		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8	4	2	01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8	4	2	01 01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8	4	2	01 02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8	4	2	01 03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
8	4	2	01 04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
8	4	2	01 05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
8	4	2	01 06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8	4	2	01 07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
8	4	2	01 08	Dst

8	4	3			Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	01		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	01	01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	01	02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
8	4	3	01	03	Dst
8	5				PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
8	5	1			Pendapatan Luar Biasa - LO
8	5	1	01		Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8	5	1	01	01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
9					BEBAN
9	1				BEBAN OPERASI - LO
9	1	1			Beban Pegawai - LO
9	1	1	01		Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga - LO
9	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan - LO
9	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional - LO
9	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum - LO
9	1	1	01	06	Tunjangan Beras - LO
9	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9	1	1	01	08	Pembulatan Gaji - LO
9	1	1	01	09	Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9	1	1	01	10	Uang Paket - LO
9	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9	1	1	01	12	Tunjangan Komisi - LO
9	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran - LO
9	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kelengkapan - LO
9	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan - LO
9	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian - LO
9	1	1	01	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
9	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
9	1	1	01	21	Dst
9	1	1	02		Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO
9	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO
9	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO
9	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO
9	1	1	02	05	Dst
9	1	1	03		Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
9	1	1	03	01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9	1	1	03	02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9	1	1	03	03	Dst
9	1	1	04		Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9	1	1	04	01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO
9	1	1	04	02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9	1	1	04	03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO
9	1	1	06	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
9	1	1	06	04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LO
9	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	06	08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9	1	1	06	09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO

9	1	1	06	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9	1	1	06	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9	1	1	06	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakalan Kekayaan Daerah - LO
9	1	1	06	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
9	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9	1	1	06	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9	1	1	06	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
9	1	1	06	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO
9	1	1	06	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO
9	1	1	07		Uang Lembur - LO
9	1	1	07	01	Uang Lembur PNS - LO
9	1	1	07	02	Uang Lembur Non PNS - LO
9	1	2			Beban Barang dan Jasa
9	1	2	01		Beban Bahan Pakai Habis
9	1	2	01	01	Beban Persediaan alat tulis kantor
9	1	2	01	02	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender
9	1	2	01	03	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
9	1	2	01	04	Beban Persediaan perangkat, material dan benda pos lainnya
9	1	2	01	05	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9	1	2	01	06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9	1	2	01	07	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
9	1	2	01	08	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas
9	1	2	01	09	Dst
9	1	2	02		Beban Persediaan Bahan/ Material
9	1	2	02	01	Beban Persediaan bahan baku bangunan
9	1	2	02	02	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman
9	1	2	02	03	Beban Persediaan bibit ternak
9	1	2	02	04	Beban Persediaan bahan obat-obatan
9	1	2	02	05	Beban Persediaan bahan kimia
9	1	2	02	06	Beban Persediaan Makanan Pokok
9	1	2	02	07	Dst
9	1	2	03		Beban Jasa Kantor
9	1	2	03	01	Beban Jasa telepon
9	1	2	03	02	Beban Jasa air
9	1	2	03	03	Beban Jasa listrik
9	1	2	03	04	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
9	1	2	03	05	Beban Jasa surat kabar/majalah
9	1	2	03	06	Beban Jasa kawat/faksimili/internet
9	1	2	03	07	Beban Jasa paket/pengiriman
9	1	2	03	08	Beban Jasa Sertifikasi
9	1	2	03	09	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9	1	2	03	10	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9	1	2	03	11	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9	1	2	03	12	Dst
9	1	2	04		Beban Premi Asuransi
9	1	2	04	01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9	1	2	04	02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9	1	2	04	03	Dst
9	1	2	05		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9	1	2	05	01	Beban Jasa Service
9	1	2	05	02	Beban Penggantian Suku Cadang
9	1	2	05	03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9	1	2	05	04	Beban Jasa KIR
9	1	2	05	05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9	1	2	05	06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9	1	2	06		Beban Cetak dan Pengandaan
9	1	2	06	01	Beban Cetak
9	1	2	06	02	Beban Pengandaan
9	1	2	07		Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9	1	2	07	01	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas
9	1	2	07	02	Beban sewa gedung/ kantor/tempat
9	1	2	07	03	Beban sewa ruang rapat/pertemuan
9	1	2	07	04	Beban sewa tempat parkir/uang tolbat/hangar sarana mobilitas
9	1	2	07	05	Dst

9	1	2	08		Beban Sewa Sarana Mobilitas
9	1	2	08	01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9	1	2	08	02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9	1	2	08	03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9	1	2	08	04	Dst ...
9	1	2	09		Beban Sewa Alat Berat
9	1	2	09	01	Beban Sewa Eskavator
9	1	2	09	02	Beban Sewa Bulldoser
9	1	2	09	03	Dst ...
9	1	2	10		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9	1	2	10	01	Beban sewa meja kursi
9	1	2	10	02	Beban sewa komputer dan printer
9	1	2	10	03	Beban sewa proyektor
9	1	2	10	04	Beban sewa generator
9	1	2	10	05	Beban sewa tenda
9	1	2	10	06	Beban sewa pakaian adat/tradisional
9	1	2	10	07	Dst ...
9	1	2	11		Beban Makanan dan Minuman
9	1	2	11	01	Beban makanan dan minuman harian pegawai
9	1	2	11	02	Beban makanan dan minuman rapat
9	1	2	11	03	Beban makanan dan minuman tamu
9	1	2	11	04	Beban makanan dan minuman pelatihan
9	1	2	11	05	Dst ...
9	1	2	12		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9	1	2	12	01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9	1	2	12	02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9	1	2	12	03	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
9	1	2	12	04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9	1	2	12	05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9	1	2	12	06	Dst ...
9	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
9	1	2	13	01	Beban pakaian kerja lapangan
9	1	2	13	02	Dst ...
9	1	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9	1	2	14	01	Beban pakaian KORPRI
9	1	2	14	02	Beban pakaian adat daerah
9	1	2	14	03	Beban pakaian batik tradisional
9	1	2	14	04	Beban pakaian olahraga
9	1	2	14	05	Dst ...
9	1	2	15		Beban Perjalanan Dinas
9	1	2	15	01	Beban perjalanan dinas dalam daerah
9	1	2	15	02	Beban perjalanan dinas luar daerah
9	1	2	15	03	Beban perjalanan dinas luar negeri
9	1	2	16		Beban Perjalanan Pindah Tugas
9	1	2	16	01	Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah
9	1	2	16	02	Beban perjalanan pindah tugas luar daerah
9	1	2	17		Beban Pemulangan Pegawai
9	1	2	17	01	Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
9	1	2	17	02	Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
9	1	2	18		Beban Pemeliharaan
9	1	2	18	01	Beban Pemeliharaan Tanah
9	1	2	18	02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9	1	2	18	03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9	1	2	18	04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	2	18	05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9	1	2	19		Beban Jasa Konsultasi
9	1	2	19	01	Beban Jasa Konsultasi Penelitian
9	1	2	19	02	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan
9	1	2	19	03	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan
9	1	2	20		Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	20	01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9	1	2	20	02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	21		Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	21	01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9	1	2	21	02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	22		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9	1	2	22	01	Beban beasiswa tugas belajar U3
9	1	2	22	02	Beban beasiswa tugas belajar S1
9	1	2	22	03	Beban beasiswa tugas belajar S2
9	1	2	22	04	Beban beasiswa tugas belajar S3

9	1	2	23	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
9	1	2	23 01	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan
9	1	2	23 02	Beban sosialisasi
9	1	2	23 03	Beban bimbingan teknis
9	1	2	23 04	Dst.....
9	1	2	24	Beban Honorarium Non Pegawai
9	1	2	24 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9	1	2	24 02	Moderator
9	1	2	24 03	Dst.....
9	1	2	25	Honorarium PNS
9	1	2	25 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9	1	2	25 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9	1	2	25 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	25 04	Dst.....
9	1	2	26	Honorarium Non PNS
9	1	2	26 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	26 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap
9	1	2	26 03	Dst.....
9	1	2	27	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9	1	2	27 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9	1	2	27 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9	1	3		Beban Bunga
9	1	3	01	Bunga Utang Pinjaman
9	1	3	01 01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9	1	3	01 02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	3	01 03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9	1	3	01 04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9	1	3	01 05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9	1	3	02	Bunga Utang Obligasi
9	1	3	02 01	Bunga Utang Obligasi
9	1	4		Beban Subsidi
9	1	4	01	Beban Subsidi
9	1	4	01 01	Beban Subsidi kepada BUMN
9	1	4	01 02	Beban Subsidi kepada BUMD
9	1	4	01 03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9	1	5		Beban Hibah
9	1	5	01	Beban Hibah kepada Pemerintah
9	1	5	01 01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9	1	5	02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	5	02 01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9	1	5	02 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9	1	5	02 03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9	1	5	03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9	1	5	03 01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD.....
9	1	5	03 02	Dst.....
9	1	5	04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9	1	5	04 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat.....
9	1	5	04 01	Dst.....
9	1	5	05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	05 01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.....
9	1	5	06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***
9	1	5	06 01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.....
9	1	6		Beban Bantuan Sosial
9	1	6	01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9	1	6	01 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...
9	1	6	02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9	1	6	02 01	Beban Bantuan Sosial kepada
9	1	7		Beban Penyusutan dan Amortisasi
9	1	7	01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9	1	7	01 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9	1	7	01 02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9	1	7	01 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9	1	7	01 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

9	1	7	01	05	Beban Penyusutan Alat Angkut Berat Tak Bermotor
9	1	7	01	06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9	1	7	01	07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9	1	7	01	08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9	1	7	01	09	Beban Penyusutan Alat Benkel Bermesin
9	1	7	01	10	Beban Penyusutan Alat Benkel Tak Bermesin
9	1	7	01	11	Beban Penyusutan Alat Ukur
9	1	7	01	12	Beban Penyusutan Alat Penolahan Pertanian
9	1	7	01	13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
9	1	7	01	14	Beban Penyusutan Alat Kantor
9	1	7	01	15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9	1	7	01	16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9	1	7	01	17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9	1	7	01	18	Beban Penyusutan Alat Studio
9	1	7	01	19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9	1	7	01	20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9	1	7	01	21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9	1	7	01	22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9	1	7	01	23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9	1	7	01	24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9	1	7	01	25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9	1	7	01	26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9	1	7	01	27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9	1	7	01	28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory
9	1	7	01	29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9	1	7	01	30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9	1	7	01	31	Beban Penyusutan Senjata Api
9	1	7	01	32	Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api
9	1	7	01	33	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9	1	7	02		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9	1	7	02	01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9	1	7	02	02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9	1	7	02	03	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9	1	7	02	04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9	1	7	02	05	Beban Penyusutan Tugu Peringatan
9	1	7	02	06	Beban Penyusutan Candi
9	1	7	02	07	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
9	1	7	03		Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	7	03	01	Beban Penyusutan Jalan
9	1	7	03	02	Beban Penyusutan Jembatan
9	1	7	03	03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9	1	7	03	04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9	1	7	03	05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9	1	7	03	06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
9	1	7	03	07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9	1	7	03	08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9	1	7	03	09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9	1	7	03	10	Beban Penyusutan Bangunan Air
9	1	7	03	11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9	1	7	03	12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9	1	7	03	13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9	1	7	03	14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9	1	7	03	15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9	1	7	03	16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9	1	7	04		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9	1	7	04	01	Beban Amortisasi Goodwill
9	1	7	04	02	Beban Amortisasi Lisensi dan franchise
9	1	7	04	03	Beban Amortisasi Hak Cipta
9	1	7	04	04	Beban Amortisasi Paten
9	1	7	04	05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
9	1	8			Beban Penyisihan Piutang
9	1	8	01		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9	1	8	01	01	Beban Penyisihan Piutang Pajak

9	1	8	02	Beban Penvisihan Piutane Lainnya
9	1	8	02 01	Beban Penvisihan Bagian Lancar Tagihan Janjeka Panjang
9	1	8	02 02	Beban Penvisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Janjeka Panjang kepada Entitas Lainnya
9	1	8	02 03	Beban Penvisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anasuran
9	1	8	02 04	Beban Penvisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
9	1	8	02 05	Beban Penvisihan Uang Muka
9	1	8	02 06	Dst.....
9	1	9		Beban Lain-lain
9	1	9	01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	01 01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	02	Beban Penvisihan Dana Bersalur
9	1	9	02 01	Beban Penvisihan Dana Bersalur
9	1	9	03	Beban Lain-lain
9	1	9	03 01	Beban Lain-lain
9	2			BEBAN TRANSFER
9	2	1		Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9	2	1	01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	1	01 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota....
9	2	1	01 02	Dst....
9	2	2		Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9	2	2	01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	2	01 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota....
9	2	2	01 02	Dst.....
9	2	3		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9	2	3	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9	2	3	01 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi....
9	2	3	01 02	Dst....
9	2	3	02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9	2	3	02 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota....
9	2	3	02 02	Dst....
9	2	4		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	01 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....
9	2	4	01 02	Dst....
9	2	5	01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9	2	5	01 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik....
9	2	5	01 02	Dst....
9	2	6		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9	2	6	01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
9	2	6	01 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota...
9	2	6	01 02	Dst....
9	3			DEFISIT NON OPERASIONAL
9	3	1		Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9	3	1	01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9	3	1	01 01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9	3	1	01 02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9	3	1	01 03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9	3	1	01 04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9	3	1	01 05	Defisit Pelepasan Investasi Janjeka Panjang - LO
9	3	1	01 06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9	3	2		Defisit Penyelesaian Kewajiban Janjeka Panjang - LO
9	3	2	01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Janjeka Panjang - LO
9	3	2	01 01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9	3	2	01 02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9	3	2	01 03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9	3	2	01 04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9	3	2	01 05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9	3	2	01 06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9	3	2	01 07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO

9	3	3			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9	3	3	01	03	Dst
9	4				BEBAN LUAR BIASA
9	4	1			Beban Luar Biasa
9	4	1	01		Beban Luar Biasa
9	4	1	01	01	Beban Bencana Alam
9	4	1	01	02	Beban Luar Biasa Lainnya
9	4	1	01	03	Dst

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN II		
3	BKO		
4	SACIAN HUKUM		

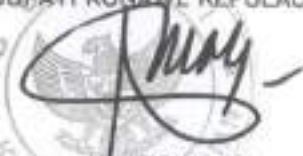
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



9	3	3			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9	3	3	01	03	Dst
9	4				BEBAN LUAR BIASA
9	4	1			Beban Luar Biasa
9	4	1	01		Beban Luar Biasa
9	4	1	01	01	Beban Bencana Alam
9	4	1	01	02	Beban Luar Biasa Lainnya
9	4	1	01	03	Dst

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRHAN, S.H.
NIP 19691004 200112 1 003

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH